

PENCAPAIAN MINIMAL PENDIDIKAN INDONESIA MENJELANG 2020

# BERITA INDONESIA<sup>®</sup>

Edisi 13/Th.I/ 5 - 18 Mei 2006

Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)

## PENDIDIKAN NASIONAL PE-ER TAK KUNJUNG SELESAI





**TokohINDONESIA**  
Majalah Biografi  
Pertama dan Satu-satunya  
di Indonesia



[www.tokohindonesia.com](http://www.tokohindonesia.com)

**The Excellent Biography**



Sampul:  
Eri Irawan  
Karikatur:  
Dandy Hendrias

Edisi No.13/Th.I/5 - 18 MEI 2006

**DARI REDAKSI** ..... 4  
**SURAT KOMENTAR** ..... 5  
**HIGHLIGHT/KARIKATUR BERITA** ..... 7  
**BERITA TERDEPAN** ..... 12  
**VISI BERITA** ..... 13

**BERITA UTAMA**  
**PENDIDIKAN NASIONAL**  
**PR YANG TAK KUNJUNG SELESAI**

Belum genap dua tahun disosialisasikan dan dipraktikkan, Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004 urung diterapkan secara nasional. Kurikulum 2006 ditawarkan pemerintah. Tapi, mengapa muncul sinyal penolakan dari DPR ..... 14



**LENTERA**  
**PELUANG AL-ZAYTUN DI TENGAH**  
**PASAR DUNIA**

Pemerintah harus menaruh perhatian terbuka kepada setiap lembaga pendidikan tinggi, dan berusaha untuk bertindak selaku fasilitator yang objektif ..... 34

**BERITA PEREMPUAN**  
 Persembahkan Kaum Hawa ..... 52  
 Usulkan Perempauan TNI Turut Ambil Kebijakan ..... 53

**BERITA IPTEK**  
 Kartu Kredit Masa Depan ..... 54

**BERITA MEDIA**  
 Tragedi Tentara di Perbatasan ..... 56  
 Kontroversi Kelinci Berdasi ..... 57

**BERITA HUMANIORA**  
 Perang Armada di Jalanan ..... 58  
 Sepakat Tanggung Bersama Dana Pendidikan ..... 59

**BERITA DAERAH**  
 Banjir Mengisolasi Trenggalek ..... 60

**BERITA KESEHATAN**  
 Kontroversi Sebab Lesi ..... 61

**BERITA FEATURE**  
 Tambora Mengguncang Jagad ..... 62

**BERITA LINGKUNGAN**  
 Gajah Mati Tinggalkan Cemas ..... 64

**BERITA BUDAYA**  
 Kaum yang Selalu Ceria ..... 65



WILSON EDWARD

**Kurikulum** Memang Harus Selalu Berubah ..... 17  
**Sekolah Bebas** Kembangkan Kurikulum ..... 18  
**Sinyal Penolakan** dari Senayan ..... 20  
**KBK di Mata** 'Orang Sekolah' ..... 22

**BERITA POLITIK**  
 Kesempatan di Tengah Kesempatan ..... 24

**BERITA EKONOMI**  
 Menunggu Permen Usaha Penangkapan Ikan ..... 26

**BERITA WAWANCARA**  
 Dr. Bomer Pasaribu ..... 30

**BERITA HUKUM**  
 Jaksa Korek File Pak Harto ..... 32  
 Rosario Untuk Tibo ..... 33

**BERITA NEWSMAKER**  
 Drs. Taufiq Effendi, MBA ..... 40

**BERITA MANCANEGARA**  
 Iran Pantang Mundur ..... 42  
 Prahara Guncang Nepal ..... 43

**BERITA OPINI**  
 M. Aziz Syamsuddin, SH., MH. .... 44

**BERITA PROFIL**  
 Rama Pratama, SE. AK ..... 45

**BERITA NASIONAL**  
 "Mbah Buyut" Siap "Hajatan" ..... 46  
 Sosialisasi Perpes 78 ..... 48

**BERITA OLAH RAGA**  
 Tm Kanguru Kejodohan Jerman ..... 49

**BERITA HANKAM**  
 Kehandalan Si 'Baret Merah' ..... 50  
 Aksi Penyelundupan Pojokan TNI ..... 51



**BERITA TOKOH**  
 Utomo Dananjaya ..... 28

## Demokrasi, Toleransi dan Perdamaian

### Pemimpin Umum:

Syaykh Dr AS Panji Gumilang

### Pemimpin Redaksi:

Ch Robin Simanullang

### Redaktur Senior:

MYR Agung Sidayu  
Imam Supriyanto  
Syahbuddin Hamzah  
Dandy Hendrias  
Suryo Pranoto  
Anis Fuadi

### Redaktur Pelaksana:

Anna Fauzia Diponegoro  
Mangatur Lorieicide Paniroy (Website)

### Sekretaris Redaksi

Retno Handayani

### Kepala Litbang dan Pusat Data:

Suryo Pranoto

### Staf Redaksi:

Hapason Tampubolon  
Samsuri  
Nawawi  
Ikhwan Triatmo  
Sarjiman  
Henry Maruwas  
Christian Natamado  
M Subhan  
Sanita Retmi  
Amron Ritonga  
Hotman L Gaol

### Wartawan Foto:

Wilson Edward

### Redaktur Bahasa dan Pracetak

Marjuka Situmorang  
Mangatur Lorieicide Paniroy

### Desainer:

Eri Irawan, Esero Design

### Biro Redaksi:

**Medan:** H. M. Aulia E Panggabean (Kepala)  
Bontor Simanullang **Purwakarta:** Benhard Sihite

### Penerbit:

PT Berita Satria Wiratama  
Bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Indonesia dan  
PT Citraprinsip Publisitas Indoaprint

### Komisaris:

Syaykh Dr AS Panji Gumilang

### Direktur/ Pemimpin Perusahaan:

Ch Robin Simanullang

### Wakil Pemimpin Perusahaan:

Samsuri

### Iklan dan Promosi:

Imam Supriyanto  
Watty Soetikno

### Keuangan dan Umum:

Mangatur Lorieicide Paniroy

### Sirkulasi dan Distribusi:

Abdul Halim  
Marjuka Situmorang

### Harga:

Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)

### Percetakan:

PT Gramedia  
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

### Alamat Redaksi/Tata Usaha:

Jalan Cucakrawa No.14A  
Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 8293113, 70930474, 83701736  
Fax. 9101871

### E-mail:

redaksi@berindo.com - iklan@berindo.com

### Website:

www.beritaindonesia.co.id



Kegiatan belajar para murid di kelas

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*  
Salam Sejahtera

Pembaca yang budiman,

Dunia pendidikan, kini kembali menjadi sorotan. Bukan saja mengenai banyaknya jumlah sekolah yang rusak, tapi juga biaya yang semakin tinggi dan kurikulum yang terus berubah-ubah. Sementara itu, program pemberantasan buta aksara belum jua usai. Setitik berita menggembirakan di tengah berkecamuknya dunia pendidikan ini adalah turut sertanya pemerintah propinsi dan daerah untuk *sharing* dalam pendanaan pembangunan bidang pendidikan.

Kendati jumlahnya berbeda-beda, ada yang 30:20:50, ada juga 20:20:60, telah menjadi bukti bahwa pembangunan pendidikan bukan saja menjadi tanggung-jawab pemerintah, tapi tanggungjawab bersama. Dengan kerjasama dalam hal pendanaan ini diharapkan dapat mengurai satu per satu persoalan pendidikan. Memang, pendidikan gratis yang 'benar-benar' gratis masih jauh dari impian, namun pendidikan murah dan terjangkau masih sangat ditunggu-tunggu.

Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional yang biasa jatuh pada 2 Mei, Berita Utama nomor ini kami ambil tema pendidikan. Laporan Utama kali ini memang tidak secara langsung menyoroti masalah dana dan biaya pendidikan, namun lebih banyak menyoroti masalah kurikulum yang memang terus berubah. Berdasarkan Undang Undang Sistem Pendidikan, bahwa kurikulum pendidikan nasional harus berbasis kompetensi, ini tentu saja sangat erat hubungannya dengan buku ajar dan kualitas guru atau pendidik. Seperti dikatakan oleh Prof.Dr. Arief Rachman, bahwa kurikulum harus didukung empat hal, Yaitu, materinya harus baik, gurunya harus mengerti, alat-alat penunjang atau peraganya, lalu manajemen dari sekolahnya.

Selain pendidikan kami juga menulis mengenai berbagai bencana di tanah air. Seperti Gunung Merapi yang siap memuntahkan laharnya, banjir di Trenggalek dan lain-lain. Untuk lebih lengkapnya, silahkan menyimak sajian kami.

Selamat menikmati sajian kami.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*



Surat atau komentar tentang apa saja baik berkenaan dengan isi majalah Berita Indonesia maupun ide/gagasan/pandangan tentang isu-isu aktual dapat dikirimkan ke Redaksi Berita Indonesia, dengan alamat sebagai berikut:

- [http://www.beritaindonesia.co.id/surat\\_pembaca/](http://www.beritaindonesia.co.id/surat_pembaca/)
- email: [redaksi@berindo.com](mailto:redaksi@berindo.com)
- surat : Jalan Cucakrawa No.14A  
Bukit Duri, Tebet, Jaksel 12840  
Telp. (021) 70930474, 8293113  
(021) 83701736  
Fax. (021) 8293113, 9101871

### Manajemen Transportasi Kacau Balau

Hanya selang beberapa hari terjadi 2 kali kecelakaan KA. Yang pertama menunjukkan *human error* dari sang masinis, karena tidak mengindahkan sinyal. Yang kedua di Jakarta karena ketidaksabaran pengemudi Metromini. Kecelakaan yang harusnya bisa dihindari sehingga rakyat kecil tidak melulu menjadi korban, sudah saatnya menjadi perhatian serius pemerintah. Ini me-

nunjukkan betapa rendahnya disiplin bangsa kita dalam berlalu lintas juga terhadap tugas. Cerita-cerita pilu di media telah berulang kali diliput, namun tidak ada upaya preventif yang serius dari pihak-pihak dan instansi terkait. Masing-masing hanya sibuk mempertahankan jabatannya saja untuk kepentingan kelompok/partai tertentu.

Kapan bangsa kita bisa belajar dari kesalahan? Sudah saatnya pemerintah punya cetak biru sistem manajemen transportasi yang terpadu sekaligus menegakkan disiplin berlalu lintas sehingga angka kecelakaan bisa ditekan seminimal mungkin.

**Frans Winata,**  
[franswin@hotmail.com](mailto:franswin@hotmail.com)

### Nasib Kepala SD di Pulau Kelapa

Sungguh sangat menyenangkan kunjungan Sidak Presiden SBY ke Kepulauan Seribu. Beliau mengunjungi sebuah Se-

kolah Dasar di Pulau Kelapa. Bagi siswa dan para guru dan khususnya Kepala Sekolah juga suatu *surprise* dikunjungi oleh orang nomor satu di NKRI ini. Suatu peristiwa yang kemungkinannya kecil untuk terulang kembali dialami oleh seorang Kepala SD tersebut.

Namun kegembiraan tersebut tidak terlalu lama dialaminya, karena Presiden mendapati bahwa SD tersebut kebersihan lingkungannya tidak baik alias kumuh dan jorok, sehingga Presiden pun berang. Suatu pengalaman pahit bagi Kepala SD tersebut karena dianggap tidak mampu mengurus Sekolah Dasar.

Hal ini sebenarnya adalah sesuatu yang tidak adil, karena kondisi demikian bisa saja dialami oleh Kepala SD, SMP, SMU bahkan Perguruan Tinggi dan Instansi Pemerintah lainnya. Jadi sebaiknya berikanlah arahan dan petunjuk kemudian peringatan-peringatan secara bertahap agar Kepala SD ter-

sebut mampu mengubah sikap kepemimpinannya dalam mengurus sekolah.

**Bambang Sunarto,**  
[basunara@yahoo.com](mailto:basunara@yahoo.com)

### Perda Larangan Merokok Patut Didukung

Larangan merokok di tempat umum yang ditetapkan oleh Pemprov DKI sangat baik dan patut didukung oleh masyarakat. Yang menjadi persoalan adalah penerapan atau Sidak oleh petugas yang terkait di lapangan tampaknya masih belum merata. Contoh kenapa di terminal Kampung Melayu, dimana sebagian besar sopirnya merokok sampai saat ini belum disidak, padahal banyak penumpang yang tidak merokok.

Selanjutnya bagi para penumpang angkutan umum termasuk saya diharapkan ikut berperan serta untuk mengingatkan para sopir atau penumpang lain yang merokok di dalam mobil agar tidak me-

## BUNG WARTO



rokok sesuai Perda Nomor 2 tersebut. Akhirnya Perda tersebut tidak akan efektif manakala penerapan di lapangan masih setengah hati atau tidak konsisten.

**Ardiansyah,**  
ardiansyah@bri.co.id

### Pemda Bogor Harus Tingkatkan Kepedulian Terhadap Usaha Mikro

Beberapa hari ini para pedagang kaki lima (termasuk tukang koran) di Bogor sedang dilanda keresahan yang amat sangat. Penyebabnya, apa lagi kalau bukan karena praktek pengurusan yang sangat ditakuti. Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya mengembirakan, memiliki tempat usaha bukanlah persoalan yang gampang. Apalagi mencari pekerjaan yang mapan. Oleh karenanya menjadi wirausaha mandiri dalam skala mikro, seperti tukang koran, tukang rokok, tukang semir, atau pun tukang dagang makanan ke-

liling (atau mangkal/menunggu lapak) menjadi pilihan yang tidak bisa ditawar-tawar.

Masalahnya kebebasan berusaha bukan pula persoalan yang gampang di Bogor. Peraturan Daerah (Perda) No 13 Tahun 2005 telah memupus harapan pada wirausaha mikro ini. Media massa menulis, sekitar 3000-an agen dan pengecer koran akan gulung tikar karena tergusur oleh peraturan tersebut. Pertanyaannya, apakah Pemda Bogor sudah mempersiapkan dampak sosial dan ekonomis, atas diperlakukannya Perda tersebut? Kalau sudah, sejauh mana rencana bisnis yang akan diimplementasikan kepada mereka? Terus terang, untuk hidup di jaman yang serba susah ini bukanlah perkara yang gampang, termasuk menjadi wirausaha mandiri berskala mikro. PHK yang dilakukan perusahaan telah menyebabkan semua pengangguran berbondong-bondong masuk menjadi wira-

usaha mikro.

Akibatnya persaingan menjadi sangat ketat. Belum selesai warga mengkonsolidasikan permasalahan ekonomi internal, kini pengurusan dengan getol dilakukan oleh Pemda.

Harapan kami, semoga Pemda Bogor dapat segera memberikan penjelasan di mana saja tempat-tempat yang bebas pengurusan, sehingga para tukang koran dan usaha mikro lainnya dapat berjualan dengan tenang, tanpa harus ketakutan kalau-kalau ada pengurusan secara mendadak. Dengan demikian, kepastian berusaha bagi para tukang koran semakin jelas – kemudahan untuk memperoleh informasi melalui media cetak semakin gampang diperoleh.

**Yohan BP,**  
mediaku@gmail.com

### Polusi Suara Bikin Hidup Tidak Tenang

Sejalan dengan keinginan Pemprov DKI Jakarta untuk

menertibkan polusi sebagai akibat rokok maka saya mengusulkan agar polusi suara turut diperhatikan. Tingkat kebisingan yang tinggi selain merusak organ tubuh juga sangat mempengaruhi jiwa seseorang dalam menjalankan hidup sehari-hari.

Itu sebabnya pekerja di pabrik perlu pakai pelindung telinga dalam bekerja (pada bagian mesin misalnya). Terus terang di negara kita ini sangat minim mungkin tidak ada tata tertib berkendara. Siapa saja bisa seenaknya membuat, merubah knalpot sedemikian rupa sehingga menimbulkan suara yang sangat mengganggu, terutama suara yang dihasilkan dari knalpot sepeda motor. Saya perhatikan semakin lama hampir semua sepeda motor bersuara keras.

Mohon hal ini menjadi perhatian pejabat terkait sehingga kita semua bisa hidup lebih tenang. Surat kami ini tidak ada sedikit pun mendiskreditkan para pengendara sepeda motor. Saya pun mengendarai sepeda motor namun saat bersebelahan dengan sepeda motor yang mengeluarkan suara keras, jantung saya serasa berhentak lebih kencang dan keinginan untuk berjalan kencang muncul. Terima kasih.

**Ratmono Ratmansunu,**  
ratmonoratmansunu@yahoo.com

### Usul Agar BI Terbit Tiap Pekan

Saya mau usul bagaimana kalau BI setiap pekan diterbitkan mengingat penjualan BI di daerah kami tergolong cepat. Maju terus!

**Imam,** agen BI di Jogja  
(0274) 7100936

### Suka Baca Berita di Situs BI

Saya sangat menyukai berita-berita yang disajikan di situs BeritaIndonesia.co.id tapi kalau bisa penyampainnya jangan terlalu ringkas/simpel. Terima kasih.

**Bustomy,**  
anwarfauziah@yahoo.co.id

PASTIKAN

TARIF IKLAN BERITAINDONESIA

Halaman	Ukuran	Harga
Jacket Cover	204 x 268 mm	Rp. 40.000.000
Cover 2	204 x 268 mm	Rp. 20.000.000
Cover 2 Plus	408 x 268 mm	Rp. 35.000.000
Cover 3	204 x 268 mm	Rp. 17.000.000
Cover 3 Plus	408 x 268 mm	Rp. 30.000.000
Cover 4 (Kulit Belakang Luar)	204 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Him Dalam (Full Page)	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
1 Him Dalam Berhadapan (Facial Page)	408 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Him Dalam Tengah (Center Page)	408 x 268 mm	Rp. 32.000.000
Advertorial / Pariwara	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
2/3 Him Vertical Trimed	204 x 213 mm	Rp. 9.000.000
2/3 Him Horizontal Trimed	153 x 268 mm	Rp. 8.000.000
1/2 Him Horizontal Trimed	102 x 268 mm	Rp. 7.000.000
1/2 Him Vertical Trimed	204 x 134 mm	Rp. 6.000.000
1/3 Him Vertical Trimed	204 x 67 mm	Rp. 4.000.000
1/3 Him Horizontal Trimed	51 x 268 mm	Rp. 3.000.000
Iklan kupung (kanan & kiri) minimal lima kali pemuatan		@ Rp. 5.000.000

PEMASANGAN IKLAN:

Telp. (021) 8293113, 70930474, 83701736 Fax. (021) 8293113, 9101871

▶ 17/04/2006

**Presiden Izinkan Penahanan Ali Mazi**

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani izin pemeriksaan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengelolaan aset Gelora Senayan yang membawa kerugian negara sebesar Rp 1,9 triliun, dan dilanjutkan dengan penahanan. "Penahanan dilakukan jika dikhawatirkan yang bersangkutan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, atau mempersulit proses pemeriksaan dan pengadilan," ujar juru bicara Presiden, Andi Mallarangeng. Ketika dugaan korupsi terjadi, Ali Mazi saat itu menjadi pengacara PT Indobuildco.

**Kepala SDN 01 Pulau Kelapa Akan Dipecat**

Kekecewaan Presiden SBY saat berkunjung ke SD 01 di Pulau Kelapa, Kabupaten Kepulauan Seribu, rupanya berbuntut panjang. Kepala SDN 01 Juhri Usman bakal dipecat setidaknya dimutasi ke tempat lain. Rencana mutasi atau pemecatan itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Dasar (Diknas) DKI Jakarta Sylviana Murni. "Kepala sekolah itu akan diberi sanksi dan harus

dimutasi," kata dia. "Puskesmas sudah baik, dikelola dengan baik. Tapi pendidikan kondisinya tidak bagus dan sangat tidak layak. Saya minta turun semuanya. Pak gubernur dan pak menteri semua lihat," kata presiden.

18/04/2006

**Neloe Tersangka Pencucian Uang**

Lepas dari jeratan hukum kasus penyalahgunaan kredit Bank Mandiri, mantan direktur utama Bank Mandiri, ECW Neloe, kembali ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan rekening atas nama ECW Neloe di Swiss sebesar 5,3 juta dolar AS. Direktorat Reserse Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri, menetapkan Neloe sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. "Neloe untuk pertama kalinya diperiksa sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atas uang yang disimpan pada bank di Swiss," kata Kabid Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Bambang Kuncoko.

**Wapres ke China**

Wapres Jusuf Kalla disertai sejumlah menteri dan pejabat negara lainnya, termasuk beberapa gubernur dan anggota

DPR, hari ini bertolak ke China untuk melakukan kunjungan kenegaraan hingga 22 April mendatang. Selain bertemu Wapres China, Jusuf Kalla dan rombongan akan mengunjungi kota Shanghai, Shen Zhen dan Hai Kou. Kunjungan Wapres ini merupakan upaya untuk menarik sebanyak mungkin investor China menanamkan modalnya di Indonesia dalam bidang infrastruktur, khususnya pembangunan jalan tol dan pembangkit tenaga listrik.

19/04/2006

**Timor Leste Belum Bisa Jadi Anggota ASEAN**

UBUD - Meskipun berada di kawasan Asia Tenggara, negara baru Timor Leste belum bisa menjadi anggota ASEAN karena berbagai hal. Secara ekonomi, Timor Leste belum mampu untuk mengikuti berbagai kegiatan ASEAN yang berjumlah ratusan setiap tahunnya. Sementara dari segi teknis administratif, perlu dilakukan amandemen terlebih dahulu terhadap pasal 18 Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC), yang didalamnya menyebutkan negara-negara Asia Tenggara adalah 10 negara, yaitu yang sekarang menjadi anggota PBB. Oleh karena itu, walaupun Timor Leste ingin

**Karikatur Berita**

menjadi anggota ASEAN, hal itu tidak bisa dilakukan segera. Diperlukan waktu untuk memprosesnya, selain soal kesiapan Timor Leste sendiri untuk mengikuti berbagai kegiatan ASEAN,” jelas menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda. Hassan mencontohkan Laos harus melakukan persiapan sekitar 5-10 tahun untuk menjadi anggota ASEAN.

20/04/2006

### Toemion Mulai Disidang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mulai menyidangkan mantan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Theo F. Toemion. Theo diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek Indonesia Investment Year (IY) yang telah merugikan negara sebesar Rp 27 miliar. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Meufri itu, dibuka untuk umum sekitar pukul 10.00 WIB. Sidang kali ini mengagendakan berkas dakwaan setebal 46 halaman yang dibacakan oleh JPU yang terdiri dari Muhibuddin, Chatarina, dan Riono secara bergantian.

21/04/2006

### Warga Merapi Dievakuasi

Seribu lebih warga lereng Merapi di wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah mulai dievakuasi ke tempat penampungan sementara. Mereka berasal dari delapan dusun di Kecamatan Dukun dan Srumbung, yang lokasinya paling dekat, sekitar 4 - 5 km dari puncak Merapi.

Sekda Kab Magelang Agus Subandono menjelaskan, evakuasi tersebut sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya korban jiwa saat Merapi meletus. Meski demikian, banyak warga yang menolak dievakuasi. Diantaranya adalah warga dusun Gemer, Desa Ngargomulyo Kecamatan Dukun yang berpenduduk 208 jiwa. Demikian pula di Dusun Batur Ngisor yang berpenduduk 159 orang, yang bersedia dievakuasi hanya 4 orang.

### Raja Gyanendra Kembalikan Kekuasaan

Setelah lebih dari dua pekan digoyang gelombang unjuk rasa puluhan ribu rakyat, Raja Nepal, Gyanendra akhirnya “mengalah” dengan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Gyanendra juga meminta kelompok oposisi yang terdiri atas tujuh partai politik untuk segera memilih perdana menteri baru. Pernyataan ini disampaikan Gyanendra di hadapan stasiun TV pemerintah, Jumat (21/4) “Kami kembalikan kekuasaan eksekutif kepada rakyat sebagai bentuk praktik demokrasi. Harus ada pemilu segera untuk memilih pemerintahan baru yang akan bertanggung jawab menjalankan pemerintahan. Kami akan tetap memegang komitmen pada demokrasi multipartai dan juga pada konstitusional monarki. Kami berharap perdamaian bisa pulih di Nepal,” kata Gyanendra.

### HUT Ratu Dirayakan di Puri Windsor

Ratu Inggris Elizabeth II disambut dengan sorak-sorai saat bertemu dengan massa di luar Puri Windsor. Ribuan orang berkumpul untuk mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-80 kepadanya, Jumat (21/4). Ketika ratu yang tersenyum muncul melalui gerbang Raja Henry VIII dari puri kuno itu dengan mantel warna fuschia (jambon), lengkap dengan topi berbulu dengan warna yang sama, rakyat memberikannya tiga sorak sorai dan bergabung saat band militer mengumandangkan Happy Birthday to you. Acara hari Jumat yang merupakan hari ulang tahun ke-80 Elizabeth II antara lain diisi dengan penghormatan senjata 21 kali di Windsor, penghormatan 41 kali di Hyde Park di London, dan sebuah santap malam resmi di Istana Kew.

22/04/2006

### GAM Harus Segera Bubarkan

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) harus segera mengganti nama dan fungsi organisasinya setelah pengesahan UU Pemerintahan Aceh dan sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Aceh. Hal itu disampaikan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Kebijakan Keamanan dan Luar Negeri Javier Solana di kantor AMM Banda Aceh. “Mereka (GAM) harus mentransformasikan organisasinya ke dalam partai politik sebagaimana di sebuah negara demokrasi. Misi perubahan ini berdasarkan integritas teritorial negara Indonesia”, ujarnya. Menurut Solana, AMM juga akan

## Karikatur Berita



mengirimkan pengacara dari Swedia untuk mempelajari ada tidaknya anggota GAM yang belum mendapat amnesti dari pemerintah Indonesia karena dituduh terkait masalah kriminal di sejumlah daerah. AMM akan menyelesaikan semua kasus itu selambatnya 15 Juni 2006.

23/04/2006

### Tugas AMM Diperpanjang

Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa sepakat memperpanjang lagi masa tugas Misi Pemantau Aceh (AMM) hingga pertengahan Agustus 2006. Selama perpanjangan masa tugas, AMM akan memantau pemilihan kepala daerah di provinsi NAD. "Tugas AMM sekarang akan berakhir 15 Juni 2006. Karena itu, kita butuh perpanjangan. Kita mengundang lagi untuk pepanjangan tugas AMM dua bulan", ujar Wapres Jusuf Kalla dalam jumpa pers bersama Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Kebijakan Keamanan dan Luar Negeri Javier Solana usai pertemuan di kediaman Wapres di Jakarta. Dalam pertemuan itu Wapres didampingi Menko Polhukam Widodo AS, Menlu Hassan Wirayuda, Menkum & HAM Hamid Awaludin, Menkominfo Sofyan Djalil dan Kepala BRR Aceh Kuntoro Mangkusubroto.

24/04/2006

### Wapres: Harga BBM Tak Akan Naik

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, meski harga minyak dunia terus merangkak naik dan telah mencapai

US\$ 75 per barel, pemerintah tetap tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Seperti pada tarif dasar listrik (TDL), pemerintah lebih memilih efisiensi. "Sekarang ini, saya kira tidak perlulah dinaikkan. Kita tinggal (memilih) efisiensi sajalah, memperbaiki listrik dan sebagainya, termasuk cara untuk hemat,"kata Wapres di Jakarta. Harga minyak dunia saat ini sudah 32% diatas asumsi harga minyak dalam APBN 2006 sebesar US\$ 57 per barel. Namun, rata-rata harga minyak selama tiga bulan pertama tahun ini adalah 61 per dolar atau Cuma 7% diatas asumsi APBN. Lonjakan harga yang mencetak rekor baru tersebut dipicu memanasnya isu program nuklir Iran dan gejolak politik di Nigeria merupakan penghasilan minyak mentah terbesar keempat dan keenam dunia.

25/04/2006

### KB Indonesia Terbaik di Dunia

Konsep pelayanan keluarga berencana (KB) di Indonesia meraih penilaian terbaik di dunia dan akan menjadi program percontohan bagi negara-negara lain. "Indonesia satu-satunya negara di dunia yang melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi keagamaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KB," kata Deputy Direktur Senior Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, Amerika Serikat, Jose G rimon II usai pembukaan Quality Conference KB/Kesehatan Reproduksi (KR) ke-3 di Surabaya.

Pendapat Rimon didukung Robert Cunane, Deputy Direktur United States Agency International Development (USAID) Indonesia. Cunane mengatakan, selama 35 tahun USAID menjalin kemitraan dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam mengembangkan program KB, dan paling berhasil di dunia.

### Presiden ke Timur Tengah

Presiden SBY memulai lawatannya selama 10 hari hingga 4 Mei mendarat ke sejumlah negara di Timur Tengah. Yakni Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Persatuan Emirat Arab dan Jordania. Di Arab Saudi Presiden akan berkunjung ke Riyadh Mekah dan Madinah. Selain bertemu Raja Abdullah bin Abdulaziz Al-Saud, Presiden SBY akan menerima tanda kehormatan tertinggi dari Pemerintah Arab Saudi, Qiladah al-Malik Abdul Aziz. Presiden dan keluarga juga akan menjalankan ibadah umroh. Sementara di Kuwait, Presiden dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan Emir Kuwait Sheikh Sabah al-Ahamad al-Jeber al-Sabah dan mengadakan pertemuan bilateral dengan PM Kuwait Sheikh Nasser al-Mohammad al-Ahmad al-Sabah.

### Bursah Zarnubi Ketua Umum PBR

Zaenal Ma'arif memutuskan mundur sebagai Wakil Ketua DPR menyusul kealahannya dalam Mukhtar Islah Partai Bintang Reformasi (PBR) di Denpasar, Bali. "Itu sebagai bentuk



pertanggungjawaban saya. Kekalahan saya menunjukkan saya tidak pantas sebagai pimpinan. Karena itu, mulai besok saya mengundurkan diri sebagai Wakil ketua DPR. Saya tidak pantas duduk di sana”, ujar Zaenal. Bursah Zarnubi terpilih sebagai Ketua Umum PBR periode 2006-2011 dengan memperoleh 211 suara, disusul Zaenal Ma'arid 139 suara, Djafar Lejeber 71 suara, Ade Daud Nasution 32 suara dan Ismail Royan 8 suara. Sementara yang tidak sah 5 suara dan abstain 2 suara. Sebelumnya, muktamirin secara aklamasi menetapkan KH Zainuddin MZ sebagai Ketua Dewan Syuro. Lembaga baru ini berwenang memberi pertimbangan kepada DPP PBR.

28/4/06

**Kerusuhan Melanda Dili**

DILI - Sedikitnya dua orang terbunuh dan 27 orang luka-luka setelah ratusan mantan tentara dan pendukungnya mengamuk di ibukota Dili, Timor Leste, Jumat (28/4). Kerusakan dipicu oleh pemecatan terhadap 600-an tentara yang memprotes diskriminasi di lingkungan militer. Para mantan tentara dan pendukungnya membakar toko-toko di ibu kota Dili. Saksi mata mengatakan, bunyi tembakan terdengar dari Pasar Komoro di bagian sebelah barat Dili yang diserang para perusuh. Namun belum jelas benar dari pihak mana tembakan berasal. Ratusan tentara yang marah juga

menyerbu Kantor Perdana Menteri Mari Alkatiri berjanji akan mendengarkan keluhan mereka. Kerusuhan di Dili dipicu oleh pemecatan terhadap 600 tentara, Maret lalu. Jumlah itu hampir sepertiga dari seluruh tentara Timor Leste yang mencapai 1.600-an orang. Pemecatan dilakukan setelah para tentara memprotes diskriminasi di lingkungan kerja dan aturan promosi yang tidak jelas. Akibat kerusuhan ini, 27 orang luka-luka, termasuk beberapa beberapa polisi. Salah seorang perwira yang diidentifikasi sebagai Wakil Kepala Unit Reaksi Cepat berada dalam kondisi kritis akibat luka di perutnya. (AP, BBC, Kompas, 29/4/06)

29/4/06

**Anggota Teroris Digredek**

Baku tembak selama hampir satu jam mewarnai penyerangan beberapa tersangka teroris di sebuah rumah kontrakan di Desa Binangun, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dua tersangka teroris, Jabir dan Abdul Hadi tewas tertembak. Jabir yang diidentifikasi sebagai pengebom Hotel JW Marriot menjadi target pencarian Detasemen Khusus 88 Antiteror. Dia tewas bersama rekannya Abdul Hadi alias Bambang alias Badrudin Saleh. “Mereka merupakan kaki tangan Noordin M Top. Sangat berbahaya”, kata Kapolri Jenderal Pol. Sutanto yang langsung meninjau lokasi kejadian. Dalam penyerangan itu juga berhasil ditangkap Mustafirin yang

berperan sebagai kurir Noordin M Top. Sedangkan target utama Noordin M Top diduga berhasil lolos dan masih dalam pengejaran. Sehari sebelumnya polisi berhasil menangkap Sholihin, tersangka pelaku peledakan Atrium dan Duren Sawit, di wilayah Temanggung.

29/4/06

**Amuk Massa di Tuban**

Sejak pagi hingga petang kota Tuban mencekam akibat amuk massa yang diwarnai aksi anarki berupa perusakan dan pembakaran. Ribuan massa memprotes hasil pemilihan kepala daerah dua hari sebelumnya (27/4) yang dinilai terlalu memihak pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Haeny Relawati - Lilik Soehardjono yang diusung Partai Golkar dan memimpin perolehan suara. Massa yang mengamuk meneriakkan yel-yel kemenangan pasangan nomor dua, yakni Noor Nahar Hussein - Go Tjong Ping yang diusung PKB dan PDIP. Nahar adalah Ketua PC NU Tuban sedangkan Tjong Ping adalah Ketua TITD Klenteng Kwan Sing Bio. Massa menyerbu dan membakar gedung KPUD, kompleks Pemda Kabupaten Tuban dan kantor DPD Golkar. Mereka juga membakar rumah pribadi Haeny serta hotel dan pom bensin. Untuk mengamankan situasi, 10 SSK dari Polwil Bojonegoro, Jombang dan Madiun serta 3 SSK dari Yonif 521 diterjunkan ke Tuban. Jam malam juga diberlakukan mulai pukul 19.00 hingga 04.00 WIB.

**Karikatur Berita**



29/4/06

### Berlusconi Mundur

ROMA - Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi mengumumkan pengunduran dirinya hari Sabtu (29/4) malam, beberapa jam setelah kubu Romano Prodi (L'Unione) yang memenangkan posisi ketua Majelis Rendah dan Ketua Senat dalam pemungutan suara yang berlangsung ketat. Berlusconi yang partainya kalah tipis dalam pemilu 9-10 April lalu, menyatakan, ia akan melakukan sidang kabinet terakhir hari Selasa (2/5) besok. Setelah itu ia akan menyerahkan pengunduran dirinya kepada Presiden Carlo Azeglio Ciampi. Ciampi, yang masa jabatannya berakhir tanggal 18 Mei, harus membuat keputusan apakah ia akan meminta Prodi langsung membentuk pemerintahan baru atau menyerahkan tugas itu kepada pengganti dirinya. Pernyataan Berlusconi muncul setelah kubunya, Forza Italia, kalah dalam pertarungan kursi ketua Senat dan Majelis Rendah. Pemungutan suara di kedua majelis itu, Sabtu, berlangsung sangat ketat. Fausto bertinotti (66), pemimpin partai Komunis yang merupakan aliansi kubu Prodi, baru terpilih setelah pemungutan suara dilakukan empat putaran. Dalam tiga putaran pertama, Bertinotti gagal meraih suara mayoritas. Sejumlah pihak menyakini anggota dari aliansi kubu Prodi sendiri yang memberikan suara penolakan terhadap Bertinotti.

30/4/06

### Perginya Sang Legenda

Pramoedya Ananta Toer, seorang pujangga besar Indonesia itu telah pergi untuk selama-lamanya, Minggu (30/4) pagi pukul 08.55 WIB, dalam cuaca Kota Jakarta yang cerah. Ia meninggal dunia di rumahnya, kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur. Pria yang akrab dipanggil Pram itu di rawat di rumah tersebut sejak Sabtu sekitar pukul 19.00 WIB karena ia meminta pulang ketika sedang menjalani perawatan di ICU RS St Carolus Jakarta. Dia meninggal dalam usia 81 tahun dengan keluhan nyeri di dada, sesak nafas dan lemah karena sudah seminggu tidak makan.

“Apakah sampah sudah dibakar? Menjadi kata-kata terakhir Pram sebelum sang pujangga menutup mata untuk selama-lamanya, disaksikan isterinya Maemunah serta para sahabat yang setia menungguinya disaat-saat kritis. Entah apa yang dimaksud Pram dengan “sampah” dan dibakar”. Yang terang, sepanjang perjalanan hidup yang dilakoninya sebagai seorang pujangga besar, sosok ini telah menghasilkan karya-karya monumental dalam dunia kesusteraan. Karya sastra-sastra itu tidak hanya enak dibaca, tapi sekaligus memberi inspirasi bagi khazanah kehidupan yang multidimensi: sosial, politik, kebudayaan, kemanusiaan, dan peradaban. (Investor Daily, 1/5/06)

30/4'06

### Zaenal Cabut Pernyataan Mundur

Zaenal Ma'arif menelan ludah sendiri. Dia menarik pernyataannya untuk mundur dari jabatan wakil ketua DPR RI. Perubahan sikap politisi Partai Bintang Reformasi (PBR). “Sebenarnya secara pribadi dan hati, saya sudah bulat untuk mundur. Tapi, banyak yang meminta saya untuk mengurungkan niat itu. Saya pun menarik ucapan untuk mundur dari wakil ketua DPR RI,” papar Zaenal di kediamannya di Jajar, Laweyan, Solo. Sebelumnya, Zaenal mengumumkan mundur dari jabatan wakil ketua DPR setelah kalah dalam perebutan ketua umum PBR. Dia mengaku kehilangan nyali setelah kalah dari Bursah Zarnubi. Zaenal menyebut, beberapa tokoh nasional meminta dirinya tidak mundur dari DPR RI.

Alasan beberapa tokoh umat Islam itu, kata Zaenal, dirinya merupakan satu-satunya wakil dari partai berasakan Islam yang duduk di kursi pimpinan DPR RI. Karena itu, keberadaan dia di DPR sangat penting sebagai jembatan bagi umat Islam untuk menyalurkan aspirasinya. “Jadi, sekarang saya maju bukan karena keinginan pribadi, tapi didorong mereka-mereka (kalangan umat Islam). Risikonya saya dianggap tidak *gentleman* atau tidak konsisten. Saya *ya* harus menerima,” imbuhnya. (Indo Pos, 1/5/06)



# Momok BBM Muncul Kembali

**Belum sempat menarik nafas lega, harga minyak dunia menohok ke angka yang mencemaskan. Pemerintah mulai gelisah. Asumsi harga minyak di APBN terlalu rendah. Bisa melambungkan subsidi, atau harga BBM naik lagi.**

**S**i emas hitam berubah lagi. Pemerintah kaget, cemas lantaran harganya tiba-tiba saja menyentuh angka 72 dolar AS per barel. Boleh jadi ini dipicu oleh konflik nuklir antara AS dan Iran. Syukurlah, sudah kembali ke level 70,86 dpb, mungkin karena AS mengendorkan tekanannya pada Iran, negara penghasil minyak terbesar di dunia.

Meskipun anggota OPEC, barangkali, Indonesia yang paling trauma menghadapi geliat si emas hitam. Sebab, kenaikan harga minyak tahun lalu masih meninggalkan luka yang menganga. Lantaran panik dihadang defisit APBN 2005, pemerintah dua kali menaikkan harga BBM sampai rata-rata 158%.

Tidak aneh bilamana Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (24/4) buru-buru memberi jaminan: "Pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM dalam negeri". JK berjanji, efisiensi dan alokasi subsidi BBM akan ditingkatkan, tetapi akan diputuskan dalam pembahasan APBN Perubahan, Agustus nanti. Yang pasti asumsi harga minyak 57 dpb pada APBN 2006 tidak aktual lagi, dan alokasi subsidi BBM sekitar Rp 15 triliun tidak lagi memadai. Menurut JK, defisit anggaran akan meningkat dari Rp 57 triliun ke Rp 75 triliun.

Bisakah jaminan JK dipegang? Jawabannya adalah prediksi berikut ini. New York Mercantile Exchange (pusat bursa minyak dunia), mengemukakan angka-angka perkiraan seperti ini: Mei \$ 70,97 dpb; Juni \$72,78 dpb; Juli 73,81 dpb; Agustus 74,32 dpb; September 74,61 dpb; Oktober 74,77 dpb; November 74,87 dpb; dan Desember 74,86 dpb. Normalnya seperti itu. Tetapi bisa berubah drastis jika konflik AS-Iran meledak, dan terjadi musim dingin yang ekstrim di belahan Barat.

Menko Perekonomian Budiono, menanggapi geliat harga minyak, lebih memilih sikap hati-hati. Kata Boediono, pemerintah akan menghitung kembali berbagai asumsi dalam APBN 2006, dan kemampuan neraca pembayaran. Asumsi APBN 2006; pertumbuhan ekonomi 6,2%, inflasi tahunan 8,0%, kurs Rp 9.900 per dolar AS dan harga minyak 57 dpb.

Melihat rekor semua pemerintah yang silih berganti, tiada tahun tanpa kenaikan harga BBM. Kalau terjadi juga, ini sebuah malapetaka. Mudah-mudahan janji JK terbukti sampai akhir tahun ini.

Sebenarnya pemerintah sangat paham bagaimana menjinakkan geliat si emas hitam. Predaturnya adalah penghematan, peningkatan produksi BBM dan pengembangan bahan bakar alternatif (BBA). Boleh jadi, naik atau tidaknya harga BBM tahun ini, bisa ditelusuri dari jejak ketiga predator tersebut.



Soal konsumsi BBM, Dirjen Anggaran Depkeu Achmad Rochjadi melihat tanda-tanda yang menurun. Berarti seruan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghemat BBM, didengar oleh para konsumen BBM.

Tetapi bagaimana soal produksi BBM—mentah dan olahan? Agaknya masih jauh, menunggu datangnya 2010. Sebab mulai tahun itulah, Indonesia kembali berperan sebagai eksportir minyak mentah. Tetapi produksinya masih berkutat pada 1,55 juta bph.

Produksi minyak mentah tahun ini diharapkan mencapai 1,125 juta bph. Sedangkan konsumsi masih bertengger pada angka 1,5 juta bph. Padahal Indone-

sia harus tetap bergabung di Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Jadi jatah ekspor harus dipenuhi. Artinya, mengekspor dan mengimpor minyak mentah.

Ekspor dimaksudkan untuk menjaga peran di OPEC. Sedangkan impor untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, dan mengisi kilang-kilang Pertamina. Karena itu, Pertamina harus sekitar 400.000 bph minyak mentah dan olahan, tentu dengan harga internasional. Faktor inilah yang mendikte Indonesia menaikkan harga BBM setiap terjadi gejolak harga minyak dunia.

Juga soal kemampuan kilang Pertamina, butuh waktu. Empat tahun ke depan, tujuh kilang Pertamina akan ditambah kapasitas produksinya agar mampu memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri. Tidak lagi dibeli dari Singapura. Tujuh kilang tersebut; Pangkalan Brandan (5.000 bph), Dumai (170.000 bph), Cilacap (348.000 bph), Plaju (133.000 bph), Balongan (125.000 bph), Balikpapan (260.000 bph), dan Papua (10.000 bph). Direktur Utama Ari Hernanto Soemarno mengatakan kemampuan seluruh kilang Pertamina saat ini antara 250.000 bph sampai 400.000 bph.

Pengembangan BBA juga butuh waktu. Kelompok Bakrie Brothers sudah bertekad melakukan investasi besar-besaran di sektor kelapa sawit, dikembangkan sebagai BBA pengganti solar. Lagipula Kantor Meristek tahun ini memulai program penguatan dan pengembangan BBA. Yang menarik pemberian keringanan pajak bagi industri pengembang BBA, dan Kantor Menristek memberikan dukungan teknologi dan infrastruktur BBA cair nabati; minyak sawit, buah jarak, singkong, tebu dan batubara cair.

"Pengembangan dan kebutuhan mendesak, energi alternatif tidak bisa ditawarkan lagi," kata Menristek Kadiman Kusmayanto.

Namun mata rantainya panjang juga. Sebut saja; pembibitan, penanaman, panen, memprosesnya jadi bahan baku dan proses produksi BBA dalam jumlah besar. Yang terpenting industri dan bisnis BBA mendapat kemudahan dan akses pasar di Pertamina. ■ SH

# MUTU PENDIDIKAN

**P**ernahkah Anda membaca atau mendengar kisah Liliput? Kisah tentang seorang pria Liliput yang ingin menggelindingkan sebuah batu ke puncak bukit. Namun batu itu tidak pernah sampai ke puncak. Begitulah kisah tentang sistem pendidikan Indonesia. Ganti rezim ganti sistem, ganti menteri ganti kebijakan. Selalu dimulai dari awal lagi. Kebanyakan kandas di tengah jalan.

Pemerintah reformasi sudah mengganti kurikulum SD-SMP-SMA-SMK dari CBSA 1994 (Cara Belajar Siswa Aktif) ke KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Tidak hanya kurikulum yang selalu berubah. Nama departemennya pun berubah sesuai selera rezim yang berkuasa. Di zaman Orla: Departemen Pendidikan dan Pengajaran, Orba: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Orref: Departemen Pendidikan Nasional. Pergantian nama membawa perubahan sistem dan substansi pendidikan.

Mata pelajaran yang elementer pun sering jadi korban. Misalnya, mata pelajaran Kebangsaan (Civic), Sejarah Nasional, Kebudayaan Nasional dan Budi Pekerti, dewasa ini tidak ditemukan lagi. Semestinya mata pelajaran tersebut dipertahankan untuk memelihara kesadaran berbangsa bagi setiap generasi baru Indonesia.

Dewasa ini, Departemen Pendidikan Nasional—muara dari sistem pendidikan bangsa—berencana merevisi KBK atau Kurikulum 2004. Kurikulum reformasi ini diterapkan tidak lama setelah Bambang Sudibyo ditunjuk sebagai Mendiknas. KBK sudah diuji coba di sejumlah sekolah. Kurang berhasil.

Karena itu, UU Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan pembentukan Badan Standardisasi Pendidikan Nasional (BSPN) untuk merevisi KBK agar bisa diterapkan di sekolah-sekolah pemerintah dan swasta di seluruh Indonesia. KBK memuat 16 mata pelajaran dengan jam belajar lebih dari 1.000 jam setahun. Langkah pertama pimpinan BSPN Prof. Dr. Bambang Suhendro adalah memangkas jam belajar mengajar—SD cukup 35 menit, SMP 40 menit, sedangkan SMA dan

SMK 45 menit per mata pelajaran.

Saat ini memang anak-anak kelebihan muatan, selain materi pelajarannya terlampaui rumit, juga terlalu banyak (16 mata pelajaran). Tentu orang tua sangat terbebani karena harus membeli banyak buku dan keperluan lainnya.

Apa pun bentuk kurikulum atau perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, guru tetap menempati posisi sentral untuk pencapaian tingkat kecerdasan anak didik. Namun citra guru yang seharusnya kompeten dan berwibawa, terkikis oleh rendahnya pendapatan dan kesejahteraan me-



reka. Sedangkan guru menjadi barometer maju atau mundurnya mutu pendidikan. Paling tidak, ada lima varian untuk memperoleh guru yang benar-benar prima; dedikasi, tingkat kesejahteraan, kompetensi dan sistem pengangkatan.

Seorang guru harus memiliki dedikasi tinggi pada tugas utamanya. Karena itu gaji dan tunjangan kesejahteraannya harus mencukupi kebutuhan layak, sehingga dia tidak bekerja sambilalan yang bisa mengganggu konsentrasinya mengajar. Dia sendiri harus memiliki kompetensi jika ingin menghasilkan anak didik yang kompeten. Dan dalam pengangkatan seorang guru harus benar-benar obyektif, berdasarkan jurusan pendidikan dan kompetensinya—bukan lantaran koneksi, apalagi sogokan.

Pada era 1950-an, guru sekolah rakyat (SR) harus datang ke sawah atau ladang untuk menggiring murid masuk sekolah. Karena, pada musim tanam dan panen padi banyak kelas

yang kosong. Kilas balik ini hanya untuk menggambarkan betapa besarnya pengabdian guru, dan betapa rendahnya kesadaran orang tua, meskipun sekolah serba gratis.

Sekarang, sebagian besar guru di kota punya pekerjaan sampingan, memberi les privat atau mengajar rangkap di sekolah-sekolah lain, bahkan ada yang jadi tukang ojek. Guru di desa juga bekerja sambilan sebagai tukang ojek, petani atau pedagang. Mereka tidak meneladani para pendahulunya. Pengabdian guru rendah, tetapi orang tua murid punya kesadaran sangat tinggi untuk menyekolahkan anak mereka. Kendalanya, tingginya biaya pendidikan yang tak terjangkau oleh kantong mereka. Dampaknya, sama saja antara dulu dan sekarang—banyak anak usia sekolah yang tidak menikmati bangku sekolah atau keluar dari sekolah sebelum waktunya.

Idealnya, negara menanggung biaya pendidikan anak-anak dari SD sampai SMA. Kebijakan ini bisa menjembatani jurang ketidakadilan di sektor pendidikan. Karena hanya anak-anak keluarga kaya yang bisa men-

capai pendidikan setinggi-tingginya. Sedangkan anak-anak keluarga miskin, paling tinggi tamat SMP, kebanyakan tamat SD.

Belum lama ini, tersebar berita gembira. Ada kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah—provinsi, kabupaten dan kota—untuk bersama-sama menanggung biaya pendidikan, paling tidak, dari SD sampai SMA dan SMK. Tetapi yang perlu diawasi oleh pemerintah dan DPR agar pendidikan benar-benar gratis. Jangan lagi ada alasan untuk mengenakan berbagai pungutan kepada orang tua murid.

Kalau ingin memperbaiki mutu pendidikan, pemerintah, paling tidak, harus memperhatikan empat hal: ciptakan guru-guru yang prima, batasi jumlah siswa, paling banyak, 20 per kelas, kurangi jam belajar, cukupi sarana dan prasarana. Tetapi pemerintah sendiri harus konsisten berpegang pada sistem pendidikan yang berkesinambungan. ■



KABUPATEN COLO

# PENDIDIKAN NASIONAL PR YANG TAK KUNJUNG SELESAI



**Belum genap dua tahun disosialisasikan dan dipraktikkan, Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004 urung diterapkan secara nasional. Kurikulum 2006 ditawarkan pemerintah. Tapi, mengapa muncul sinyal penolakan dari DPR.**

**K**etika isu ini mencuat ke permukaan, tidak banyak media massa nasional yang menyorotinya sebagai berita. Dalam catatan *Berita Indonesia*, hanya surat kabar *Kompas* yang paling getol mewartakannya kepada khalayak pembaca, baik dalam bentuk berita liputan, berita investigasi, maupun ulasan dan analisis pakar/pemerhati pendidikan tanah air.

Isu pembatalan Kurikulum 2004 —yang sangat populer di kalangan praktisi pendidikan dasar dan menengah tanah air sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)— sendiri mulai mencuat sekitar awal Februari 2006.

Awalnya, ada isu yang berkembang bahwa Kurikulum 1994 yang lebih dikenal dengan sebutan Kurikulum CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) akan digantikan dengan KBK 2004, dan resmi diberlakukan pada 2006.

Muncul sebuah ironi. Setelah hampir dua tahun lamanya dengan segenap ikhtiarnya sekolah-sekolah telah mempraktikkan KBK dalam proses belajar-mengajar, termasuk memilih bahan-bahan ajar (buku) yang sesuai semangat KBK, belakangan mereka dikagetkan oleh kabar baru.

Apa itu? KBK 2004 yang dalam prediksi kalangan pendidik dan tenaga pendidikan di seluruh Indonesia pasti ditahbiskan sebagai kurikulum nasional, dan diberlakukan secara resmi pada 2006 ini, ternyata urung diberlakukan.

Pemerintah (baca: Depdiknas) menyodorkan —belum ada nama resmi—Kurikulum 2006 sebagai pengganti Kurikulum 2004, dengan embel-embel ‘Kurikulum 2006 hanyalah revisi Kurikulum 2004’.

Lepas dari apologi pemerintah tersebut, kalangan sekolah dan guru di tanah air memang pantas bingung mendengar rencana peluncuran kurikulum 2006.

Pasalnya, selama dua tahun terakhir, pemerintah telah mensosialisasikan KBK 2004 secara nasional, dan bahkan mengujicobakannya di sekolah (jenjang SD, SMP, dan SMU) tertentu di sejumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Uji coba di sekolah itu sifatnya baru sebatas *pilot project*. Artinya, hanya sekolah-sekolah berkualifikasi bagus yang dipilih sebagai tempat uji coba sebab KBK 2004 mensyaratkan guru yang berkualitas (menguasai materi pelajaran yang diajarkannya dan proaktif dalam merangsang kreativitas muridnya).

Bukan itu saja, meskipun tidak ada instruksi resmi dari Depdiknas –namun ada kesan ‘dipaksa’ diterapkan— sebagian besar sekolah di tanah air berupaya menerapkan KBK, bahkan termasuk sekolah-sekolah ‘kelas bawah’ ikut-ikutan demi tak mau disebut ketinggalan jaman atau karena alasan gengsi, mungkin.

Hampir setiap manajemen sekolah dan tenaga pendidiknya menyesuaikan sistem belajar-mengajarnya pada KBK meski di awal-awal sempat menimbulkan kegagahan dalam menjabarkannya.

Apa alasan pemerintah tidak jadi memberlakukan Kurikulum 2004, malah akan memberlakukan Kurikulum 2006? Rencana pemerintah mengganti Kurikulum 1994 dengan Kurikulum 2006 –bukan dengan Kurikulum 2004— tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Lembaga independen yang dibentuk April 2005 sebagai amanah dari UU Sistem Pendidikan Nasional itu menilai, KBK lebih sarat dengan isi tanpa standar kompetensi yang jelas, karenanya perlu direvisi.

Menurut Ketua BSNP, Prof. Bambang Soehendro, kepada *Berita Indonesia*, pada 2006 memang direncanakan ada pergantian kurikulum tetapi penggantinya bukan KBK yang disusun 2004 itu.

“Kurikulum yang baru nanti adalah hasil kreasi dari guru-guru di sekolah berdasarkan standar isi dan standar



kompetensi yang akan dikukuhkan dengan peraturan menteri dalam waktu dekat,” ujar mantan Dubes RI untuk UNESCO (1999-2004) itu.

Kurikulum 2006 bersifat lebih memberdayakan guru untuk membuat konsep pembelajaran yang membumi sesuai kebutuhan dan kondisi sekolah. Untuk itu, BSNP akan mengeluarkan panduan berupa kurikulum modelnya, dengan Pusat

Kurikulum Balitbang Depdiknas dan direktorat terkait sebagai fasilitator dan pendamping.

Alasan lain mengapa pemerintah merevisi KBK 2004, adalah, berdasarkan evaluasi terhadap pengujian di sekolah-sekolah tertentu di sejumlah daerah di tanah air, karena hasilnya tidak seperti diharapkan.

Ada beberapa faktor penyebab ‘gagalnya’ KBK dalam versi pemerintah. Seperti, kurang memadainya ketersediaan sarana/fasilitas penunjang pendidikan yang sesuai dengan tuntutan KBK di setiap sekolah (seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, bahan ajar, dan sarana komunikasi).

Faktor terpenting lainnya, minimnya pemahaman guru tentang konsep KBK 2004, dan sering kali guru malahan masih terbawa-bawa konsep pembelajaran pola lama.

Anehnya, meskipun pemerintah dipastikan meluncurkan Kurikulum 2006 kalangan Komisi X (bidang pendidikan) DPR-RI –seperti disuarakan dua Wakil Ketuaanya: Profesor DR. Anwar Arifin (F-PG) dan Masduki Baidlowi (F-PKB)— melempar isyarat keras bahwa tidak tertutup kemungkinan DPR menolak pergantian kurikulum tersebut. **(Baca: DPR Berhak Menolak Kurikulum 2006) ■ AF**



Prof. Dr. Arief Rachman (Pendidik)

# “Kurikulum Memang Harus Selalu Berubah”

**K**esannya, setiap ganti menteri pasti ganti kebijakan, termasuk ganti kurikulum. Menurut **Prof. Dr. Arief Rachman**, memang kurikulum harus terus berubah. Pendidikan yang baik, memang perlu mengubah-ubah kurikulum.

“Sulit dibayangkan bila kita memakai kurikulum zaman dulu. Sekarang ini *kan* penemuan-penemuan di bidang teknologi seperti komputer sudah demikian pesat. Jadi, materi mata pelajarannya juga harus diganti. Itu artinya, kurikulum juga harus diganti,” kata Direktur SMU Labschool, Jakarta ini. Berikut petikan wawancaranya.

## Mengapa kurikulum terus berubah-ubah?

Kurikulum pendidikan di Indonesia ini adalah dinamis. Dia selalu harus berubah mengikuti perubahan ilmunya itu sendiri. Dia harus memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Kita sebagai pendidik tidak boleh mengajar sesuatu yang tidak ada gunanya. Begitu pun kurikulum harus mengikuti perkembangan dari anak didik kita. Jadi, orang yang melihat kurikulum harus siap menerima kenyataan bahwa kurikulum itu akan selalu berubah-ubah. Kurikulum tidak akan berhenti di satu tempat. Perubahan-perubahan itu harus dicermati oleh para pengambil kebijakan sektor pendidikan baik yang ada di pusat maupun di daerah.

## Mengapa pemerintah daerah juga perlu mencermati perubahan kurikulum?

Ya, sebab diperlukan kurikulum bermuatan lokal. Yang harus dicermati secara lokal oleh pemerintah daerah terhadap kurikulum adalah muatan lokal apa yang dibutuhkan daerahnya.

Anak-anak SMU di suatu daerah tertentu perlu diberikan pelajaran dengan muatan lokal. Ambil contoh, Bali. Di sana perlu diberikan kurikulum manajemen pariwisata, atau pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan sektor pariwisata.

## Bagaimana dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK?

Pada hakikatnya, KBK adalah perubahan kurikulum lama yang menekankan aspek pengetahuan menjadi aspek kompetensi.

Kompetensi ini bisa diukur. Misalnya, kompetensi membaca, ini harus bisa



PROF. DR. ARIEF RACHMAN

diukur seberapa jauh anak ini mengetahui kosa katanya, seberapa jauh anak itu mengetahui kalimat-kalimatnya, dan seberapa jauh anak itu mengerti mengapa tulisan itu dibuat. Jadi lebih rinci sehingga guru sebenarnya lebih terbantuan dengan KBK untuk melihat satu masalah lebih detail.

## Lalu, sudahkan masuk ke dalam kurikulum nasional?

KBK itu beberapa tahun terakhir ini belum dijadikan suatu keputusan sebagai kurikulum nasional. Baru menjadi uji coba di beberapa sekolah. Sekolah-sekolah yang sudah mengujicoba kurikulum berbasis kompetensi ini juga berkeinginan untuk tetap melanjutkannya, meskipun sekarang

juga ada kurikulum 2006.

## Bagaimana dengan kurikulum 2006?

Kurikulum 2006 itu menyeleksi Kurikulum 2004 apa saja yang perlu dan tidak perlu dilanjutkan, atau bahkan apa saja yang mesti dibuang.

## Jadi, bagaimana sebenarnya kita menyikapi sebuah kurikulum?

Kalau kita bicara kurikulum, kira-kira itulah bentuk kurikulum yang harus kita capai di Indonesia ini. Lebih dari itu, sebuah kurikulum yang nantinya menghasilkan silabus, pokok bahasan-pokok bahasan, materi-materi, harus memungkinkan guru untuk mengajar. Kemudian bisa meningkatkan standar proses.

Dibuatnya standar proses adalah menjadi sebuah strategi agar seorang guru kalau mengajar, menarik, bisa memotivasi, berinteraksi dan sangat menggugah minat anak.

Secara sederhana tidak sekadar anak tahu, tapi harus bisa membuat anak ingin tahu. Tidak hanya mendorong anak ingin tahu apa? Tapi juga mendorong anak ingin tahu mengapa?

Sehingga kurikulum itu sebenarnya akan membantu seseorang berpikir kritis, analitis, komprehensif atau menyeluruh, kompetitif dan lain lain. Jadi, kita meningkatkan keterampilan berfikir kita. Ketrampilan berfikir sederhana adalah menghafal, tapi kalau berpikir kritis lain lagi.

## Lalu apa yang mesti dipersiapkan?

Sebuah kurikulum itu harus punya empat perangkat pendukung. Yaitu, materinya harus baik, gurunya harus mengerti, alat-alat penunjang atau peraganya, kemudian manajemen dari sekolah.

Misalnya, sebaiknya kalau mengajarkan matematika pada jam dimulainya belajar, jangan mengajarkan matematika pada jam terakhir setelah olah raga, sebab untuk belajar matematika anak perlu energi yang lebih prima dan suasana yang abstrak dan tenang. Sebaliknya, mengajarkan sejarah sebaiknya pada jam terakhir agar bisa diajarkan drama dan lain-lain.

## Apakah sekarang sudah siap?

Kita harus siap. Sebab memang ini yang harus kita lakukan. Kalau kita akan memakai KBK maka kita harus persiapkan.

Kalau kompetensi ini bisa diukur, maka akan lebih baik daripada cuma menghafal. ■ **AD, RH**

Kepala BSNP, Prof. DR. Bambang Suhendro

# Sekolah Bebas Kembangkan Kurikulum

**U**ndang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengamanatkan pembentukan delapan standar nasional pendidikan. Standar dibuat oleh badan independen Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Sejak dibentuk pada Mei 2005, 15 anggota BSNP bekerja ekstra keras memenuhi amanat UU Sisdiknas menyelesaikan SNP. Dua diantaranya, yang sangat relevan dengan persoalan kurikulum, sudah pada tahap *draft* akhir yakni standar isi pendidikan dan standar kompetensi lulusan. *Draft* tinggal menunggu pengesahan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) dan berlaku efektif. *Draft* akhir inilah yang ramai diwacanakan sebagai kurikulum baru 2006, pengganti Kurikulum 2004 alias KBK.

Untuk memahami latar belakang perubahan kurikulum 2004, *Berita Indonesia* mewawancarai Profesor DR. Bambang Suhendro, Ketua BSNP, di ruang kerjanya, Gedung Depdiknas, Jakarta, akhir April silam. Berikut petikannya.

**Belum berlaku efektif, tapi Kurikulum 2004 hendak diubah. Apa latar belakangnya?**

Berdasarkan ketentuan UU No. 20/2003 dan PP 19/2005, kurikulum dikembangkan oleh masing-masing sekolah. Ada wewenang sekolah mengembangkan kurikulum secara mandiri.

Hanya saja, sekolah harus mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi pendidikan. Akan ada panduan agar mereka mudah mengembangkan standar isi dan standar kompetensi lulusan menjadi kurikulum di tingkat satuan pendidikan yang operasional di sekolah-sekolah. Nanti akan disertakan pula model kurikulum.

Standar isi adalah lingkup materi yang harus diberikan supaya peserta didik mempunyai kompetensi, seperti yang diatur dalam standar kompetensi lulusan. Standar isi berisi kompetensi-kompetensi pada setiap mata pelajaran yaitu kemampuan, sikap, dan keterampilan menerapkan ilmu. Jadi ada sikap, ada pengetahuan, dan ada kemampuan yang bisa dikerjakan dengan pengetahuan itu. Ini semua disebut dengan kompetensi.

Standar isi yang kita kembangkan berisi mata pelajaran yang dikemas dalam lima kelompok yaitu agama/akhlak mulia, ilmu pengetahuan/teknologi, kewarganegaraan, estetika, dan kesehatan/pendidikan jasmani.

Yang dikembangkan oleh sekolah adalah apa-apa saja kompetensi siswa pada setiap mata pelajaran pada setiap tahun. Misalnya siswa kelas satu semester satu harus bisa apa, kelas satu semester dua harus bisa apa, demikian seterusnya sampai kelas enam SD dan kelas tiga SMP-SMA. Ini semua standar isi.



BAMBANG SOEHENDRO

WILSON EDWARD

### Ada wewenang sekolah menyusun kurikulum sendiri?

Benar, supaya lebih relevan dengan kepentingan sekolah, peserta didik, dan sifat spesifik sosial, ekonomi, dan sumber daya yang dimilikinya. Singkatnya, itu harus relevan dengan kebutuhan dan kehidupan sehari-hari.

Namun agar setiap sekolah punya panduan dan ukuran, dibuatlah standar-standar pencapaian minimum. Silakan kembangkan sendiri tetapi sekolah harus memenuhi standar minimum.

Standar isi yang kami kembangkan antara lain waktu belajar tatap muka lebih sedikit, karena yang kita kembangkan adalah yang minimum. Kita bandingkan dengan negara lain, jam tatap muka pertahun sekolah di Indonesia sangat besar. Bahkan termasuk negara dengan beban jam belajar yang sangat tinggi di dunia, meskipun belum yang tertinggi.

Standar penilaian adalah bagian dari delapan standar itu. Bagaimana sebaiknya guru melakukan penilaian, mudah-mudahan akhir tahun ini kami selesai membuat pedoman guru menilai hasil belajar siswa.

### Standar baru ini memakai pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau gabungan keduanya?

Semuanya, kualitatif dan kuantitatif. Yang namanya kompetensi harus jelas. Misalnya, siswa kelas satu SD, untuk pelajaran matematika, harus bisa penjumlahan, pengurangan sampai 20. Itu kuantitatif.

Kualitatif, misalnya, siswa harus mempunyai sikap ilmiah. Sikap tidak bisa diukur secara kuantitatif tapi berdasarkan pengamatan guru. Misalnya sikap berwarga negara atau taat hukum bukan sesuatu yang bisa diuji tapi diamati oleh guru selama siswa sekolah.

### BSNP sudah mewacanakan itu semua?

Sudah kita wacanakan dalam prosesnya. Dimulai dari Tim Ahli yang membuat *draft* kira-kira seperti apa perbaikan yang bisa dilakukan terhadap Kurikulum 1994 dan Kurikulum 2004 dalam hal standar isi dan standar kompetensi. Jadi, bukan di kurikulumnya secara utuh.

Kita mengundang dan melibatkan kalangan guru, pakar pendidikan, dan komunitas pendidikan tanah air untuk dimintai masukan. Yang terakhir kita lakukan uji publik di Jakarta. Setelah uji publik, *draft* kita rumuskan kembali tanpa mengubah substansi. Kita perbaiki redaksionalnya untuk kita rumuskan *draft* akhirnya. ■ HT, SB

## Beda Kurikulum (KBK) 2004 dan Kurikulum 2006

### Kurikulum 1994 dan Kurikulum 2004 (KBK):

- Sangat menitikberatkan pada aspek kemampuan kognisi.
- Dipaparkan kompetensi dasar, dijabarkan indikator penilaian, dan dipetakan pula materi pokok pelajaran yang mesti diajarkan guru kepada peserta didik.
- Beban pelajaran di Indonesia antara 1.100 - 1.200 jam satu tahun harus ditanggung siswa semua jenjang pendidikan (SD-SMU). Di luar negeri rata-rata jam belajar siswa maksimal 800-900 jam satu tahun. Itu artinya ada kelebihan jam belajar 20 persen pada kurikulum pendidikan di Indonesia dibandingkan kurikulum luar negeri.

Jumlah beban jam pelajaran itu, menurut sementara pakar, terlalu banyak dan berat sehingga membosankan dan mengurangi kreativitas siswa (khususnya dirasakan siswa SD dan SMP).

Dampak lainnya, Jika dijumlahkan jam belajar yang dibebankan kepada siswa, siswa justru merasa tidak memiliki kesempatan untuk bermain, bersosialisasi, dan istirahat karena waktunya tersita oleh kegiatan ekstrakurikuler dan mengerjakan pekerjaan rumah (PR).

PR setiap mata pelajaran rata-rata mencapai satu jam. Bila setiap mata pelajaran ada PR, beban jam siswa untuk mengerjakan PR sangat banyak.

- Satu jam pelajaran untuk siswa di seluruh tingkat pendidikan (SD-SMU) rata-rata 45 menit. Dinilai jam pelajaran selama ini menyita waktu siswa untuk beristirahat.

### Kurikulum 2006:

- Lebih menitikberatkan pada standar kompetensi (perpaduan dari aspek kognisi, aspek afeksi, dan aspek psikomotorik) dan standar isi.
- Menuntut kelulusan pada satu kompetensi tertentu sesuai dengan standar kompetensi yang disusun BSNP.
- Tidak dipaparkan materi pokok pelajaran untuk siswa. Sekolah dan guru diberikan wewenang untuk berkreasi dan menyusun sendiri sesuai kondisi sekolah dan kompetensi siswa.
- Beban jam pelajaran siswa dikurangi menjadi 1.000 jam satu tahun. Asumsinya, dalam satu tahun terdapat 36-40 minggu efektif kegiatan belajar-mengajar. Dan, dalam satu minggu meliputi 36-38 jam pelajaran.
- Jam pelajaran untuk siswa SD dan SMP dikurangi. SMU tetap.

Satu jam pelajaran untuk SD sama dengan 35 menit, SMP 40 menit, dan SMU tetap 45 menit. Namun, pengurangan jam pelajaran ini dinilai bertentangan dengan model kegiatan belajar-mengajar yang dikembangkan sekolah swasta. Misalnya, model *full day school* yang mewajibkan siswa berada di sekolah dari pagi sampai petang hari.

- Menuntut kreativitas guru mengembangkan sistem pengajaran yang sesuai dengan kondisi sekolah dan kompetensi siswa.

Keterangan: Diolah dari berbagai sumber. ■ RF

# Sinyal Penolakan dari Senayan

**Bagi DPR, Kurikulum 2004 sudah final untuk diberlakukan secara nasional. Tapi, mereka menilai, BSNP justru mengubahnya padahal secara normatif-yuridis tidak berwenang melakukan itu.**

**K**omisi X DPR-RI, mempertanyakan rencana penerbitan Kurikulum 2006. Adalah Anwar Arifin dan Masduki Baidlawi, dua pimpinan komisi yang membidangi masalah pendidikan bersikap kritis terhadap rencana pemerintah mengeluarkan Kurikulum 2006.

Mereka juga menyoroti tindak-tanduk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang baru terbentuk tahun 2005 karena dinilai telah menyalahi wewenangnya. Terlebih lagi, BSNP telah memublikasikan adanya perubahan yang sejatinya belum pasti itu.

Dalam kritiknya, Profesor Anwar Arifin, Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar, mengatakan BSNP telah mengambil pekerjaan Pusat Kurikulum (Puskur), termasuk pula pekerjaan Pusat Buku (Pusbuk), Balitbang Depdiknas.

Karena bukan badan eksekutif, BSNP seharusnya berada di luar wilayah teknis kerja, apalagi sampai mengevaluasi kinerja Puskur dan Pusbuk. Kekesalan Anwar semakin menjadi-jadi tatkala BSNP ternyata memublikasikan kepada masyarakat tentang adanya perubahan kurikulum yang sebenarnya belum pasti.

"BSNP telah mengobrok-abrik Kurikulum 2004 yang di mata DPR sudah dianggap final dan harus difinalkan pada Desember 2005. Sekarang, begitu selesai implementasinya datanglah BSNP melakukan perubahan. Hebatnya lagi, perubahan yang belum pasti itu dipublikasikan kepada masyarakat," ungkap Anwar Arifin dengan nada tinggi.

"DPR berhak dan bisa menolak kurikulum baru itu. BSNP tidak berwenang mengubah kurikulum. Kalau sekadar

meminta masukan masyarakat boleh-boleh saja. Yang paling berwenang adalah Pusat Kurikulum," tandas Anwar Arifin, dalam perbincangan khusus dengan M. Subhan dari *Berita Indonesia*, di kantornya Gedung DPR/MPR, Jakarta, belum lama ini.

"Di sanalah tempat memasak dan menggodok semua bahan sampai menjadi sebuah kurikulum. Setelah selesai, barulah BSNP menilai hasil kerja Pusat Kurikulum dengan parameter apakah sesuai dengan

(KBK) dan Pelaksanaan Ujian Nasional, ada sejumlah poin penting yang menjadi kesimpulan rapat.

Salah satu poinnya berbunyi, Komisi X DPR RI sepakat dengan BSNP bahwa BSNP secara normatif yuridis, tidak memiliki wewenang untuk menetapkan, melakukan perubahan atau penyempurnaan kurikulum nasional, sesuai dengan tugas pokoknya seperti tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

BSNP hanya mengembangkan standar nasional pendidikan (SNP) untuk dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum serta standar lainnya, setelah BSNP mengusulkan hasil pemantauan dan pelaporan pencapaiannya.

Persoalannya, kembali pada Anwar Arifin, sekarang ini BSNP hendak membuat standar. BSNP berada di bawah instruksi Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas).

Padahal, menurut anggota DPR dari Dapil Sulawesi Selatan ini, Mendiknas hanya punya dua tugas. Pertama, membuat Renstra (Rencana Strategis). Kedua, menetapkan SNP. "Hanya itu. Yang lain-lain bisa dilimpahkan ke bawah ke otonomi," jelasnya.

Yang menjadi titik kritis di mata Anwar adalah bahwa dua tugas Mendiknas tersebut (membuat SNP dan membuat Renstra) ternyata tidak sejalan dengan UU Sisdiknas.

"Apa yang dikerjakan Mendiknas belum mencerminkan harapan dari kita (DPR). Kami sangat kecewa dengan menteri kita ini karena sudah setahun setengah ini dia bekerja tidak berdasarkan UU."

Pendapat senada dengan Anwar Arifin dikemukakan Masduki Baidlawi, juga Wakil Ketua Komisi X. Menurut hemat Masduki, Kurikulum 2004 sudah dikonsepsi demikian rupa dengan alasan yang rasional dan juga sudah diujicobakan di



WILSON EDWARD

**ANWAR ARIFIN**

standar nasional atau tidak."

Secara jujur, Anwar mengakui sebagian besar anggota Komisi X DPR tidak *happy* dengan keberadaan BSNP itu meskipun pernah mereka undang ke Senayan untuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Dari data yang diperoleh *Berita Indonesia*, mengutip laporan singkat hasil RDPU Komisi X dengan BSNP pada Selasa (14 Maret 2006) bermaterikan pembahasan masalah Kurikulum Berbasis Kompetensi



WILSON EDWARD

### Mendiknas Bambang Soedibyo

berbagai sekolah di tanah air.

Karenanya, anggota Fraksi PKB itu menilai, Kurikulum 2004 sudah cukup berhasil dan walaupun ada kekurangan tinggal diperbaiki kekurangan tersebut. Tidak perlu diubah.

“Saya mengimbau jangan ada perubahan kurikulum baru. KBK saja yang disempurnakan misalnya dengan mengurangi keterlibatan guru dalam proses administrasi sehingga waktunya mendalami materi pengajaran relatif memadai,” ujar anggota DPR dari Dapil Jawa Timur XI (Gresik, Lamongan, Bojonegoro, dan Tuban) itu.

Selaku wakil rakyat, dia mengingatkan, jangan sampai kebijakan pemerintah yang baru itu membuat rakyat terombang-ambing akibat adanya kebijakan yang berubah-ubah di dunia pendidikan nasional.

Dia mengungkapkan kekhawatirannya kalau kebijakan pemerintah itu berdampak buruk pada masyarakat. Ada beban baru bagi orangtua siswa.

“Saya khawatir, orang tua siswa akan terbebani oleh kebijakan kurikulum baru ini karena sebagai eksekutif mereka pasti terpaksa membeli buku-buku pelajaran baru yang harus disesuaikan dengan kurikulum baru buat anak-anaknya,” jelas Wakil Sekjen PBNU ini, menunjuk satu eksekutif dari perubahan kurikulum.

Sejalan dikeluarkannya kurikulum baru, dia memastikan, kemunculan buku-buku pelajaran baru yang diberi *embel-embel*. ‘Buku ini sudah disesuaikan dengan

kurikulum baru 2006’.

Hal ini akan memunculkan anggapan bahwa buku-buku panduan sebelumnya tidak layak lagi dipergunakan sebagai bahan ajar. Sangat relevan dengan itu, Masduki mengingatkan adanya komitmen pemerintah kepada masyarakat tentang penggunaan buku pelajaran wajib yang dipakai di sekolah akan diberlakukan minimal lima tahun.

Dia pesimis dengan jaminan BSNP bahwa perubahan kurikulum tidak akan

diikuti perubahan buku panduan belajar siswa di sekolah. “Apa bisa dijamin bahwa buku yang sudah telanjur dipakai sekarang tidak berganti di tengah jalan?” sambung Ferdiansyah, anggota Komisi X dari F-PG lainnya.

Melihat eksekusi yang ditimbulkan dari perubahan kurikulum tersebut, Masduki menilai, langkah BSNP terlalu berlebihan. BSNP mengubah kurikulum dengan senaknya tanpa memikirkan beban yang mesti diemban masyarakat. ■ **RF, SB**

## DR. Fasli Djalal (Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas)

# “Hanya Penyempurnaan”

**T**ugas pemerintah pusat (baca: Depdiknas, red.) adalah membuat standar isi dan standar kompetensi kurikulum. Berdasarkan itu, sekolah sendiri yang membuat standar agar penjabaran kurikulum agar lebih efektif ketika mereka ajarkan kepada anak didiknya.

Sebenarnya sekolah memiliki hak penuh, termasuk para guru, untuk mengembangkan kurikulum. Tinggal nanti sekolah menambah atau mengurangi serta mempertegas muatan lokalnya. Dengan KBK itu, sekolah dan guru memiliki keleluasaan.

Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah suatu pendekatan berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, jadi bukan buatan menteri atau Dirjen. Kurikulum kita memang harus berbasis kompetensi karena merupakan mandat dari UU. Sebenarnya kurikulum ini sudah diujicobakan sebelum UU Sisdiknas sendiri dikeluarkan.

Kini, kita tinggal menyempurnakan lagi dengan standar berbasis kompetensi. Dengan kurikulum yang disempurnakan itu, kita berikan keleluasaan pada guru-guru dan pihak sekolah. Sekarang ini yang ada adalah standar kompetensi dan standar isi 2006. Pada standar ini yang harus dipenuhi adalah proses belajar mengajar.

Tentu saja, kurikulum ini sangat berkaitan erat dengan kualitas SDM guru. Sekarang ini Balitbang Depdiknas sedang membuat contoh model kurikulum untuk diterapkan di sekolah-sekolah.

Sebenarnya, membuat perumusan dari kurikulum dan membuat metode mengajar ini adalah tugas guru sehari-hari dalam aktivitas mengajarnya.

Jika kurikulum yang disempurnakan tadi sudah diujicobakan, namun masih ada yang merasa terlalu berat, atau menganggap penjabarannya tidak rinci, maka Balitbang Depdiknas akan memikirkan untuk membuat standar kompetensi dengan membuat model-model atau contoh-contohnya.

Guru adalah sebagai pengembang, pembuat dan pelaksana kurikulum. Karenanya, penyeteraan guru menjadi syarat penting agar kapasitas guru seimbang dengan perubahan kurikulum. ■ **RD, RH**



ANNA

Fasli Djalal

# KBK di Mata 'Orang Sekolah'

**Tujuan KBK sangat dimengerti dan dipahami komunitas sekolah. Tapi tidak efektif diterapkan akibat terbatasnya sarana pendukung di sekolah dan lemahnya pemahaman guru.**



FOTO-FOTO WILSON EDWARD

**M. Husin Kepala SMP 35 Condet**

**M**eskipun letaknya di tengah kampung, suasana SMP Negeri 35 Jakarta Timur tampak asri dan teduh. Tak aneh, keceriaan selalu menghiasi raut wajah siswa dan guru sekolah di kawasan Condet itu.

Tatkala *Berita Indonesia* mengunjungi sekolah tersebut pada Selasa (25/4) sore, sekelompok siswa kelas satu sedang mengikuti pelajaran Biologi secara berkelompok.

Dengan tekun mereka menyimak arahan ibu guru yang berdiri di depan kelas. Tak tampak sedikitpun kesan 'terbebani' pada siswa-siswi tersebut dengan model pengajaran yang diterapkan sang guru.

Agaknya, suasana belajar-mengajar itu adalah salah satu metode guru dalam menerapkan tuntutan Kurikulum 2004 alias KBK. Sang guru rupanya merasa dituntut harus bisa menciptakan suasana gembira dan ceria pada anak didiknya.

Benarkah sekolah dan guru 'menikmati' tuntutan standar yang ada pada KBK? Dalam penuturannya kepada *Berita Indonesia*, M. Husin, S.Pd, Kepala SMP Negeri 35, mengaku bahwa sesungguhnya KBK bagus. Hanya, masalahnya perlu du-

kungan sarana dan prasarana serta buku yang memadai.

Dia mencontohkan pengadaan buku pelajaran. "Sekarang harga bukunya saja mencapai Rp 25.000 perbuku. Kalau ada 15 kelas dan katakanlah dalam satu kelas ada 40 siswa, bisa dihitung sendiri totalnya berapa," ujar Husin.

Di sisi lain, merujuk program sekolah gratis dari pemerintah maka pihak sekolah tidak diperkenan memungut biaya apapun kepada siswa. Dia juga mengakui, pemerintah memang mengucurkan dana sebesar Rp. 100 ribu persiswa setiap bulannya.

Namun, dana itu bukan untuk pengadaan buku melainkan untuk seluruh kegiatan mulai dari proses belajar mengajar, kegiatan ekstra kurikuler, sampai biaya perawatan dan operasional lainnya.

"Kurikulum KBK itu kan mengacu pada bagaimana siswa dan guru berkompetensi secara dua arah. Kalau gurunya kreatif tidak ada masalah karena sistem penilaian pada KBK berproses pada saat guru berinteraksi dengan siswa di kelas," paparnya.

"Saat itu guru langsung memberikan penilaian meski itu tidak diketahui si anak didik. Sebaliknya, bila guru tidak peduli dia justru akan kebingungan saat tahap

penilaian. Ke mana nilai itu akan dimasukkan. Dan inilah yang dialami oleh banyak guru."

Padahal, dari tatap muka itulah, guru dapat menilai sejauh mana kemampuan dan daya serap anak-anak didiknya. Misalnya, dari pelajaran Bahasa Indonesia saja ada empat komponen penilaian: membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Belum lagi, faktor terlalu banyaknya jumlah siswa dalam satu kelas sehingga menyulitkan proses penilaian anak peranak oleh guru.

Tri Murni, guru Biologi SMPN 35, memahami tujuan ideal KBK untuk menggalikan potensi anak secara utuh. Penilaiannya diambil melalui proses belajar secara terus menerus dengan pengalaman belajar siswa secara individu dan klasikal. Konsekuensinya, seorang guru dituntut untuk bisa melakukan penilaian secara utuh kepada siswa, dengan tidak hanya melihat dari satu sisi (kekurangan siswa), tapi dari berbagai sisi atau dari kemampuan lain yang dimilikinya.

Berdasarkan pengalamannya menerjemahkan tuntutan KBK, Tri Murni menjelaskan, "Untuk bisa melakukan itu guru harus mampu melakukan pendekatan yang bervariasi agar bisa menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan sehingga pada akhirnya secara psikologis anak mampu berpikir positif (*positif thinking*)."

Menurutnya, ada empat syarat penting agar KBK efektif diterapkan. Pertama, dalam satu kelas cukup 20-25 siswa. Kedua, sekolah hanya satu *shift*. Ketiga, sarana dan prasarana pendukung di sekolah memadai. Keempat, kondisi guru yang baik secara intelektual dan psikologis, tanpa beban, saat berhadapan dengan anak didik.

"Kita tidak dapat mengatakan Kurikulum 2004 sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1994 atau Kurikulum 2006 sebagai perbaikan Kurikulum 2004 lebih bagus ataupun lebih jelek. Yang terpenting, bagaimana kurikulum itu bisa diterapkan secara optimal. Apalagi tujuan pemerintah memang bagus dengan terus memacu kreativitas bukan hanya pada anak tetapi juga pada guru," lanjut Tri Murni.

Wakil Kepala SMPN 35, Dewi Ariertin, berpendapat senada. Menurutnya, KBK menuntut guru lebih kreatif. Bagi mereka



**Jasni Evawati Kepala SMA 2 Depok**



Guru yang sedang membimbing anak belajar kelompok dalam kelas

yang mengajar IPA misalnya itu tak mengalami kesulitan karena mereka sudah terbiasa dengan sistem penilaian yang berproses sesuai dengan tuntutan KBK. “Dan bagi guru yang belum memahami sepenuhnya memang agak kesulitan, namun proses ke arah tersebut sudah mulai dilakukan,” kata Dewi.

Kepala SMA Negeri 2 Depok, Jawa Barat, Jasni Evawati, pun menilai Kurikulum 2004 yang berbasis kompetensi cukup baik. Sayangnya, sosialisasi KBK kepada kalangan guru relatif belum maksimal.

Menunjuk pengalaman penerapan KBK di sekolah yang dipimpinnya, Jasni mengaku sudah berjalan baik meski masih terdapat kekurangan di sejumlah aspek.

“Memang harus diakui kendala dana dan fasilitas selalu ada. Apalagi kurikulum ini menuntut guru sedapat mungkin menggali potensi yang dimiliki siswa. Tapi jangan dengan alasan itu, kita tidak berupaya untuk membuat perubahan,” tandas Jasni Evawati.

Dia juga memahami, KBK mengisyaratkan kepada sekolah untuk menentukan sendiri sesuai dengan kemampuan dan kondisi sekolah bersangkutan, tentu dengan mengacu pada standarisasi kompetensi dan isi yang ditetapkan pemerintah.

Lepas dari hal normatif itu, Jasni mengungkapkan adanya kesulitan awal yang ditemui para guru dalam menerapkan KBK, terutama pada saat melakukan penilaian pada siswa.

Selama ini guru biasanya memberikan nilai berdasarkan ulangan harian dan

ulangan umum. Tapi, dengan sistem KBK, guru harus memberikan nilai setiap saat bertatap muka dengan siswa. Ini memang tugas baru bagi guru. Apalagi, jumlah siswa setiap kelas yang terlalu padat menyulitkan penilaian.

“Jumlah siswa 40 orang perkelas memang sedikit merepotkan guru dalam memberikan penilaian secara teliti pada setiap siswa dengan keterbatasan waktu yang hanya 45 menit untuk setiap mata pelajaran. Idealnya memang dalam satu kelas itu diisi 20-25 anak. Ke depan angka tersebut barang kali bisa dicapai,” ujarnya penuh harap.

Untuk dicatat, SMA 2 Depok kini dipilih sebagai sekolah percontohan (*pilot project*) menuju sekolah unggulan yang bertaraf internasional. “Mudah-mudahan jalan menuju ke sana segera tercapai, dan itu sudah kami programkan,” ucap Jasni kepada *Berita Indonesia*.

### Uji Coba KBK

Pemerintah sebenarnya telah mengujicobakan KBK di sekolah-sekolah tertentu di kabupaten/daerah di seluruh Indonesia. Untuk Jakarta saja, di tingkat SMU, ada 89 SMU percontohan —yang secara terbatas telah melaksanakan KBK. Menurut Depdiknas, banyak kendala yang menghadang pelaksanaan KBK.

Bagaimana evaluasi akhir dari proyek uji coba tersebut? Dalam laporan investigasinya Februari-Maret 2006, —*Kompas* menggambarkan bahwa ternyata hasil uji coba KBK relatif kurang memuaskan.

Dua kendala utama adalah komponen fasilitas penunjang pembelajaran (ruang

kelas, laboratorium, perpustakaan, bahan ajar, dan sarana komunikasi) dan komponen mutu pendidik (minimnya pemahaman guru terhadap konsep KBK).

Benarkah demikian kenyataannya? Dari aspek substansi isi, seperti dituturkan Hisyam Zaini Afni, Wakil Kepala Urusan Kurikulum SMA Negeri 46 Jakarta, masih terlalu membebani dan tidak mudah diterapkan secara ideal. Apalagi, materinya juga tidak lebih ramping bahkan lebih banyak dari Kurikulum 1994.

Zaini mencontohkan, pada Kurikulum 1994, untuk tingkat awal SMU ada 12-13 mata pelajaran. Tapi, ternyata, pada KBK justru bertambah menjadi 16 mata pelajaran.

Lain lagi dengan pengalaman di SMA Negeri 35 Jakarta Pusat. Kata Tuti Rahmani, Wakil Kepala Bidang Kurikulum, sejak ada KBK suasana kelas memang lebih dinamis karena siswa dituntut aktif berdiskusi.

Hanya, “Secara materi lebih sulit karena siswa dituntut menguasai konsep-konsep secara tuntas dan mampu menganalisis masalah. Soal ulangan di sekolah pun berubah menjadi lebih analisis meski berbentuk pilihan berganda,” jelasnya.

Lagi-lagi pengalaman Yulma, Wakil Kepala SMP Negeri 19, Kebayoran Jakarta Selatan —salah satu sekolah uji coba KBK. Yulma mengatakan pihaknya hampir tidak menemukan kendala sebab para guru yang berjumlah 65 orang sejak awal sudah diberi penyadaran untuk melakoni pembelajaran dengan berorientasi pada tiga aspek yaitu, kognitif, psikomotorik, dan afektif. ■ SB, AF

# Kesempatan di Tengah Kesempitan

**Anggota DPR diberi kesempatan menambah wawasannya dengan melawat ke luar negeri. Selama lima tahun ada 35 negara tujuan kunjungan. Apakah tidak ada cara lain yang berbiaya murah?**

**K**emasannya lawatan resmi. Jadwal acara dan susunan delegasi diputuskan di dalam rapat-rapat resmi. Tetapi isinya, jalan-jalan dan *pele-siran* dengan para anggota keluarga. Itulah yang terjadi Desember tahun lalu pada delegasi parlemen yang melawat ke Mesir. Mereka memanfaatkan fasilitas negara untuk jalan-jalan.

Perjalanan itu menimbulkan riak di dalam negeri. Pers dan para pengamat mengkritiknya sebagai penghamburan uang negara. Dan yang membikin heboh, mereka berhari-hari di Negeri Piramida itu hanya untuk melakukan studi tentang perjudian, dan berwisata di obyek-obyek purbakala.

Buntutnya, beberapa anggota delegasi dipanggil pulang karena tidak melapor dan tidak pamin pada fraksinya. Bahkan, salah seorang anggota delegasi, Djoko Edy AR, harus menelan pil pahit, ditarik dari keanggotaan DPR (*recall*) oleh fraksinya, Partai Amanat Nasional.

Kali ini, rencana kunjungan enam anggota parlemen ke Australia dipersalahkan banyak kalangan, juga di lingkungan Komisi I DPR sendiri yang membidangi masalah luar negeri dan pertahanan.

Mereka bertekad berangkat dengan biaya pribadi dan tidak membawa bendera DPR. Adakah sponsor di balik kepergian mereka? Inilah yang mengundang prasangka. Politikus senior dari Partai Golkar, Marzuki Darusman, memberi komentar yang hipotetis dan diplomatis.

“Sulit bagi politisi untuk menampik kalau ada celah, mereka akan mengambil peluang itu. Antara kepentingan dan tujuan mulia seringkali sulit dibedakan”.

Namun mantan Jaksa Agung di era Abdurrahman Wahid itu menilai langkah mereka sangat riskan. “Kalau semata-mata menyokong eksekutif, risikonya

terlalu besar,” lanjutnya, “dan ujungnya menciderai citra DPR”.

Akhirnya, keberangkatan delegasi ditangguhkan sampai 3 Mei 2006. Alasannya, mereka bersikeras berangkat di tengah ketegangan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia, akibat pemberian visa sementara kepada 42 anggota gerakan separatis Papua dan keluarganya oleh Negeri Kangguru itu.

Delegasi itu rencananya dipimpin Theo

pihak luar akan adanya kepentingan tertentu. Namun, “Tidak ada kepentingan tertentu, hanya didasari persoalan nasionalisme,” cetus Effendi Simbolon, seolah menjawab Marzuki.

Marzuki juga mengoreksi langkah Ketua DPR Agung Laksono yang keluar dari prosedur sehingga menimbulkan prasangka. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu dinilai terlalu reaktif menyikapi hubungan bilateral Indonesia-Australia yang kurang harmonis. Tetapi sejauh ini belum ada silang pendapat antara Agung dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, orang nomor satu di ‘Beringin’.

Theo mengatakan, alasan kepergian mereka untuk mendesak parlemen Australia agar segera membatalkan pemberian visa sementara kepada 42 warga Papua.

Mungkinkah mereka diterima di sana untuk menyampaikan suara pemerintah? AS Hikam, politikus PKB yang juga Ketua Pokja Luar Negeri Komisi I, mengatakan kunjungan itu bisa menimbulkan kesan mereka meminta-minta perbaikan hubungan diplomatik. Tapi Agung berpendapat lain, kalau anggota DPR diam saja atau lambat bereaksi, justru itu yang harus dipersoalkan.

Setelah perjalanan 15 anggota DPR ke Jerman (akhir Maret 2006) –konon menghabiskan ongkos negara hampir Rp 1 miliar— untuk melihat sistem peringatan dini tsunami yang dirancang Jerman untuk Aceh, DPR masih punya sederet panjang program lawatan ke luar negeri yang akan menelan anggaran negara sekitar Rp 16 miliar.

Informasi menyebutkan, pada 2006 ini, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR-RI merencanakan kunjungan setidaknya ke enam negara. “Totalnya 35 negara dalam lima tahun,” kata Abdillah Toha, Ketua BKSAP.

Ketua DPP PAN itu membantah lawatan anggota Dewan ke luar negeri hanya menghabiskan uang negara. Dia lebih condong melihatnya sebagai wahana menambah wawasan para anggota DPR. ■ SH, AF



WILSON EDWARD  
**THEO SAMBUAGA**

Sambuaga, Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Golkar. Selain Theo ada Happy Bone Zulkarnaen dan Yuddy Chrisnandi (FPG), Ali Mochtar Ngabalin (FBPD), Effendy Simbolon (FPDIP), Dedy Djamiluddin Malik (FPAN), dan Jeffrey Massey (FPDS).

Marzuki mengingatkan, sikap bersikeras ke Australia mengundang dugaan

## Atut atau Marissa Cagub Banten dari PDIP



**R**atu Atut Chosiyah, kini Pelaksana Tugas Gubernur Banten, meraih suara terbanyak pada pemilihan calon gubernur dari PDI Perjuangan (PDIP) Banten, yang diselenggarakan dalam Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) PDIP Banten, awal April 2006.

Atut mengungguli Marissa Haque — kandidat lainnya yang saat ini anggota F-PDIP DPR-RI. Atut memperoleh dukungan 714 suara dan Marissa 543 suara. Kandidat lainnya, Mochtar Mandala (mantan Direktur Utama Bank Duta) 5 suara, Ampu Tanuwijaya 3 suara, dan Arudji 1 suara.

Untuk posisi calon wakil gubernur,

suara terbanyak diperoleh Yandra Doni (569 suara) diikuti Tubagus Imam Ariadi (485), Iwan Rosadi (61), Buety Nasir (26), Zakaria Mahmud (24), dan Fauna (1 suara).

Peluang Marissa Haque, meski berada di urutan kedua, belum tertutup. Sebab, menurut Ketua PDIP Banten Jayeng Rana, dua nama peraih suara terbanyak hasil Rakerdasus itu akan diusulkan ke DPP PDIP di Jakarta.

“Siapa yang akan diusung PDIP pada pemilihan kepala daerah Banten nanti sepenuhnya wewenang DPP PDIP,” kata Jayeng. ■



## PAN, Mitra Kritis Pemerintah

**PADA** acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas), selama dua hari pertengahan April silam, posisi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam konteks hubungannya dengan pemerintah agak kentara.

Sebagai mitra kritis merupakan pilihan posisi PAN terhadap eksistensi pemerintahan SBY-JK. Ketua DPP PAN, Hakam Naja mengatakan, posisi itu adalah pilihan terbaik bagi PAN.

“Para kader sepakat PAN akan memosisikan diri sebagai mitra yang selalu bersikap kritis. Ini adalah pilihan terbaik, apalagi bila menyadari kondisi persoalan bangsa yang sangat rumit. PAN lebih memilih tidak selalu bersikap mutlak setuju atau apriori. PAN harus bersikap

rasional,” kata Hakam Naja.

Keputusan strategis lain yang disepakati para petinggi partai berlabang Matahari Terbit itu adalah target meraup 18,2 persen suara atau setara 100 kursi di DPR-RI pada Pemilu 2009.

Pada Rakernas itu, Fraksi PAN di DPR berketetapan terus mendorong dan mendukung lahirnya UU Antiporno-grafi dan Pornoaksi (APP). Pertimbangannya, seperti disampaikan Sekjen PAN Zulkifli Hasan, RUU APP bertujuan melindungi masyarakat sekaligus mencegah dan menanggulangi masalah akibat perbuatan asusila, asosial, dan amoral seseorang dan sekelompok orang. ■

## Isu ‘KLB’ Menerpa Partai Demokrat



**DESAKAN** digelarnya kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) dilancarkan sejumlah pengurus daerah. Tapi, petinggi PD mengabaikan dan cenderung membantahnya.

Alasan 28 DPD menggagas KLB karena Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dinilai mengubah AD/ART tanpa melalui kongres. Visi dan misi PD telah dianggap menyimpang dari amanat Kongres I Partai Demokrat di Bali.

Bukan hanya itu, Jopie Yusuf, salah seorang deklarator PD, mengaku punya bukti bahwa 15 dari 16 ketua DPD PD yang juga pendiri partai disingkirkan dalam Musda dari 16 ketua DPD.

Kepada *Sinar Harapan* (8/4), Wakil Ketua Umum DPP PD, Ahmad Mu-barok, mengatakan, “Tidak ada permintaan KLB. Itu hanya pekerjaan dari orang yang kecewa...Tidak perlu ditanggapi permintaan itu”. ■ **af**

## Imbauan Presiden kepada Senator

**MUNGKIN** karena kapasitas anggota DPD sebagai wakil daerah dan masyarakat daerah bersangkutan, Presiden SBY meminta para ‘senator’ untuk mengawasi dan mengkritisi praktik-praktik penyimpangan penggunaan anggaran di daerah.

“Harapan saya semua pihak menyadari betul, uang dan anggaran yang kita kumpulkan dengan susah payah benar-benar digunakan secara tepat untuk rakyat dan kemajuan daerah dan bukan untuk membeli barang konsumtif, apalagi untuk tindakan yang menyimpang seperti pemborosan dan korupsi,” ujar SBY usai mengadakan pertemuan konsultatif dengan petinggi DPD-RI yang dipimpin Ketua DPD, Ginandjar Kartasasmita, di Istana Negara, Jakarta, akhir Maret 2006. ■

# Menunggu Permen Usaha Penangkapan Ikan

**Sektor Kelautan dan Perikanan berpotensi menjadi lokomotif baru pertumbuhan ekonomi nasional. Industri pengolahan hasil perikanan, yang selama ini beroperasi jauh di bawah kapasitas, diharapkan memperoleh pasokan bahan baku yang cukup bila diintegrasikan dengan usaha penangkapan ikan.**

**A**da keinginan kuat dari Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi untuk mensinergikan usaha perikanan tangkap dengan usaha pengolahan hasil perikanan.

Caranya, sebelum melakukan ekspor, setiap perusahaan pemilik kapal penangkap ikan asing harus terlebih dahulu mengolahnya di pabrik, secara terintegrasi dalam satu kesatuan manajemen usaha.

Usai Freddy berwacana, terbukti minat investor asing melakukan penanaman modal di bidang usaha penangkapan ikan di Indonesia meningkat.

Karenanya, saat ini sangat ditunggu-tunggu lahirnya Peraturan Menteri (Permen) Perikanan dan Kelautan Tentang Usaha Penangkapan Ikan, yang akan memayungi perpaduan usaha perikanan tangkap dan pengolahan hasil.

Permen itu dimaksudkan pula untuk menggantikan ketentuan lama, yang hanya bersifat kerjasama bilateral ber-

bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Indonesia dengan negara asing.

Momentum perubahan memang pas sekali dengan berakhirnya perjanjian kerjasama perihal usaha penangkapan ikan, di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Selama ini eksploitasi perikanan di ZEE Indonesia hanya dipayungi MoU dan perjanjian Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982.

## Memberi Nilai Tambah

Freddy sangat ingin pemanfaatan perikanan Indonesia disesuaikan dengan ketentuan baru, agar bisa memberikan manfaat dan nilai tambah yang lebih besar kepada Indonesia.

Seperti memacu peningkatan nilai tambah produk perikanan, menyerap banyak tenaga kerja, menambah devisa negara, dan mendorong pertumbuhan industri pendukung kegiatan perikanan.

Sesuai ketentuan baru, yang hingga saat ini masih dalam tahap penggodokan yang intensif, setiap izin operasi kapal ikan asing akan dihentikan kecuali bila di darat mereka investasi mendirikan pabrik pengolahan hasil perikanan.

Bila itu telah terpenuhi, barulah mereka boleh melakukan ekspor ke luar negeri.

“Kami tidak main-main. Kalau tidak ada izin, tidak bisa menangkap ikan di wilayah Indonesia,” kata Freddy. “Kebijakan ini sangat efektif. Sebab, jika perusahaan asing tidak berinvestasi di Indonesia,

mereka tidak boleh lagi menangkap ikan di Indonesia. Jika tidak berinvestasi di sini, perusahaan-perusahaan itu pasti akan bangkrut, karena tidak mendapatkan bahan baku ikan dari wilayah kita,” tambahnya.

Berdasarkan perjanjian bilateral, izin operasi kapal penangkap ikan asal Filipina telah dihentikan sejak Desember 2005 lalu. Kemudian, dengan Thailand baru akan dihentikan pada September 2006 ini, dan China di akhir tahun 2007.

Ketika Indonesia memperbarui MoU-nya dengan Filipina, apa yang Freddy wacanakan telah dapat dituangkan dalam butir-butir perjanjian. Tepat pada hari Kamis, 23 Februari 2006, Menteri Freddy dengan Menteri Agrikultur Filipina Domingo F. Panganiban menandatangani kesepakatan kerjasama usaha perikanan di kota General Santos, Filipina Selatan.

Turut pula melakukan penandatanganan sejumlah pengusaha perikanan asal kedua negara. Seperti, antara RD Corporation asal Filipina dengan PT Anugerah Bahari Utama (Indonesia), yang membentuk usaha patungan PT RD Anugerah Indonesia. Perusahaan ini investasi 9 juta dolar AS untuk pembangunan kapal, galangan, *cold storage*, serta pembangunan fisik pabrik dan fasilitasnya.

Demikian pula Signal Marine Corporation, yang bermitra dengan PT Sinar Pure Food International menggarap usaha penangkapan ikan tuna dan pengalanganannya di Bitung, Sulawesi Utara.

“Dalam kerjasama ini kami tidak hanya bicara tentang izin penangkapan ikan, tetapi lebih jauh lagi tentang bagaimana pengelolaan perikanan secara menyeluruh,” kata Freddy.

Freddy terbukti berhasil menggolkan kebijakan terbarunya. Saat ini sudah ada 10 perusahaan PMDN dan PMA yang



Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi.

mengajukan izin ke BKPM.

Bahkan, sebelum itu telah hadir di Indonesia sejumlah pengusaha perikanan China, dipimpin oleh Dirjen Perikanan China Chien Hoa melihat sendiri potensi pelabuhan perikanan di kawasan Timur Indonesia seperti Tual, Biak dan Mimika yang berdekatan dengan perairan Arafura, sebuah kawasan perairan yang memiliki kekayaan potensi perikanan.

Kata Husni Manggabarani, Dirjen Perikanan Tangkap, pengusaha perikanan China akan membangun sejumlah industri pengolahan hasil perikanan sebagai bentuk kewajiban atas pengoperasian armada kapal asing asal mereka di ZEE Indonesia.

Thailand juga turut mendukung ide Freddy, dengan membangun usaha penangkapan ikan yang terintegrasi dengan pembangunan pengolahan dalam satu manajemen usaha terpadu.

Tiga perusahaan perikanan Thailand telah bermitra dengan perusahaan lokal, untuk menanamkan investasi 50 juta dolar AS di bidang penangkapan ikan dan pengolahannya.

Mereka adalah Century Fisheries Co Ltd (bermitra dengan PT Sumber Laut Utama dan PT Bina Usahamina Indonesia), berlokasi di Jambi. Lalu, TF Enterprise bermitra dengan PT Minatama Mutiara di Merauke, dan Thai Royal bermitra dengan Panca Mitra Multiperdana, di Pontianak.

Bastian Siri, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) DKP, menyebutkan, setiap industri penangkapan ikan harus sesuai dengan kebijakan terbaru pemerintah sehingga bisa lebih banyak menguntungkan Indonesia.

Erni Widjajati, Kasubdit Bidang Investasi, pada Direktorat Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Tangkap, mengakui pihaknya sangat intensif menyusun peraturan baru usaha penangkapan ikan ini.

“Tekanannya tentang *joint venture* (pembentukan perusahaan patungan, *Red*). Kerjasama-kerjasama bilateral ini akan berakhir. Sebagai penggantinya kita sedang menyusun peraturan pembentukan perusahaan *joint venture* di industri usaha perikanan tangkap, dan pengolahannya di darat,” kata Erni.

Margiu Lamberto Hutauruk, Kasubbag Hukum pada Ditjen Perikanan Tangkap, juga sangat mengharapkan Permen Tentang Usaha Perikanan Tangkap ini dapat segera keluar sehingga tersedia pegangan untuk memayungi ketentuan hukum di bidang industri usaha perikanan tangkap Indonesia. ■ HT

# Purwakarta Menuju “The Real City”

**S**istem pembangunan nasional harus memiliki kejelasan jenis, jangka waktu, dan substansi perencanaan untuk memberi wujud kesejahteraan rakyat. Konsep dasar pembangunan adalah menuju ke perubahan yang lebih baik, maka tidak akan ada pembangunan atau pembaruan tanpa perubahan. Hasil (*output*) dan manfaat (*outcomes*) perencanaan pembangunan daerah harus jelas dan kuat, sehingga setiap program tidak menciptakan polemik di masyarakat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Purwakarta, Wahyu Subroto, SH, M.Sc mengemukakan hal tersebut kepada Benhard Sihite dari Majalah *Berita Indonesia*.

Kata Wahyu, Bappeda yang bertugas memutakhirkan program pembangunan harus memiliki analisis yang tepat dalam merencanakan pembangunan daerah. Perancangan itu mengacu kepada kekuatan sumber daya daerah, tata ruang, lingkungan hidup, serta menyikapi isu strategis yang berkembang seperti kemiskinan, pengangguran dan lain-lain.

Wahyu menambahkan, setiap kerangka keputusan strategis harus memberi konsistensi dan sinkronisasi antara kebijakan, dengan program dan kegiatan. Keputusan juga harus mampu menghasilkan kesepakatan di antara semua *stake holder*.

Wahyu Subroto menilai sudah tepat kiat jitu Bupati Purwakarta, Drs Lily Hambali Hasan, M.Sc di setiap pengambilan keputusan pembangunan Purwakarta. Yakni, dengan melibatkan semua *stake holder* seperti aparat pemerintahan, perguruan tinggi, masyarakat dan dunia usaha sehingga efektif mendapatkan dukungan.

Kiat melibatkan *stake holder* dalam pengambilan keputusan terlihat benar saat pembangunan Sadang Terminal Square (STS). Pembangunan STS mampu mendatangkan investasi swasta sebesar Rp 60 milyar.

STS inilah yang telah mengubah wajah Purwakarta, menuju kota yang sesungguhnya atau *The Real City*. Kiat yang sama juga ditempuh dalam pemindahan Pasar Rebo, yang hingga kini masih terus berproses.

## Pembangunan Melalui Tiga Tahap

Ke depan sejumlah program sejenis masih akan terus berlanjut. Sebab berdasarkan kajian Bappeda, demikian Wahyu, program pembangunan terbukti mampu menunjukkan keberpihakan kepada rakyat Purwakarta.

Kata Wahyu, sesuai UU No. 17/2003 setiap program pembangunan daerah harus melalui tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pengawasan.

Dalam tahap perencanaan *input* yang masuk digodok dan dijabarkan ke dalam bentuk program supaya menjadi kegiatan di setiap unit kerja daerah. Di sinilah Bappeda, yang berperan sebagai pemikir pembangunan daerah, memberikan roh pembangunan supaya dapat memakmurkan rakyat.

Selaku Kepala Bappeda, Wahyu menyebut dirinya wajib untuk tetap proaktif mengolah dan mengembangkan pesan memakmurkan rakyat, dengan menuangkannya ke dalam produk rancangan pembangunan daerah.

Sementara, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan harus pula memiliki visi dan misi yang terukur. Pengukuran Standar Analisa Belanja (SAB) dan Satuan Biaya (SB) harus mengandung nilai kewajaran, dan memberi rasa keadilan di masyarakat.

Keteguhan untuk melewati tiga tahapan pembangunan membuat setiap program yang diputuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta selalu didukung seutuhnya oleh warga. Sebab setiap pengambilan keputusan strategis selalu terlebih dahulu dikaji dan dianalisa, dengan melibatkan para pakar, tokoh dan unsur masyarakat sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku. ■ BS, HT



Pembangunan Sadang Terminal Square (STS) Purwakarta

## ♦ UTOMO DANANJAYA

# MENJEMBATANI PEMBARUAN

**Mas Tom "The Living Bridge" adalah judul buku biografi menandai genap 70 tahun usia tokoh pembaru pemikiran Islam Indonesia, Utomo Dananjaya. Utomo mempunyai peran strategis diantara berbagai ekstrimitas pemikiran yang saling berbeda.**

**M**emiliki nama yang tak kalah populer dengan sahabat karibnya, Nurcholish Madjid (Almarhum), atau Cak Nur, sosok Utomo Dananjaya memang sangat lekat dengan cendekiawan muslim yang meninggal 29 Agustus 2005 itu.

Sampai-sampai situs internet [www.tokohindonesia.com](http://www.tokohindonesia.com) harus mendokumentasikan, bahwa Cak Nur, ikon pembaruan pemikiran dan pergerakan Islam Indonesia, setelah melafalkan nama Allah lalu menghembuskan nafas terakhir persis di sisi istri, anak, menantu, dan Utomo sebagai satu-satunya 'orang lain' di luar anggota keluarga.

Saat ini, Utomo menjabat Direktur Institute for Education Reform Universitas Paramadina. Utomo yang pada periode tahun 1967-1969 menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Pelajar Islam Indonesia (PII), memulai kedekatan hubungan pribadi dan pemikiran, tentang gerakan keislaman yang mantap dengan Cak Nur sejak awal tahun 1970-an.

Saat itu Utomo, Humas dan Manajer Publisiti TIM, mengusulkan nama Nurcholish kepada Komisi Sastra Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), yang sedang dipimpin oleh budayawan Umar Kayam (Alm), untuk berbicara di forum TIM, dan disetujui pula.

Nurcholish Madjid, tokoh pluralis yang dikenal memiliki pemikiran keagamaan yang progresif, saat itu serta-merta tampil dengan menghentak publik dalam sebuah orasi tentang Pembaruan Pemikiran Islam.

Pidato itu sontak menyulut polemik

keras, dan dicatat sebagai pidato yang paling bersejarah dalam dinamika perkembangan Islam di tanah air. Bahkan Prof. William Liddle, seorang Indonesianis dari *The Ohio State University*, AS, turut menilai pidato itu sebagai revolusi yang telah mengubah dunia kaum Muslim Indonesia. (Majalah *Tempo*, 11 September 2005).

Usai pidato itu, Utomo serta-merta menjadi turut sebagai bagian dari suatu pergerakan yang dikenal sebagai *pembaruan pemikiran Islam*. Momentum inilah yang telah menyeret aktivis yang, ketika masih muda sangat begitu militan dan berobsesi sekali untuk ingin mendirikan Negara Islam, terjun ke kancha pergulatan dakwah Islam yang tidak biasa.

Utomo mulai mewartakan hal-hal yang melawan pandangan umum, menggugat interpretasi monolitik atas Islam, dan karena itu oleh banyak orang pikiran dan gagasannya dinilai sebagai "kesesatan".

pula sebagai suatu gerakan yang terencana, sistematis, dan dilembagakan. Kelak, persahabatan keduanya tersaksikan emosional sekaligus intelektual yang sangat produktif.

Dari persahabatan keduanya ini pulalah lahir Paramadina, sebuah lembaga pencerahan yang mempromosikan ide-ide kebebasan berpikir, keterbukaan, toleransi beragama, dan tesis-tesis tentang bagaimana membangun peradaban Islam yang inklusif.

Paramadina adalah eksperimenasi Utomo atas gagasan pembaruan pemikiran Islam, yang sudah dilontarkan Nurcholish sejak awal 1970-an. Karena itu, bagi banyak orang Paramadina adalah Nurcholish dan Utomo.

## Dari Majelis Reboan

Syahdan, sebuah kelompok pengajian bernama Majelis Reboan terbentuklah pada tahun 1983, sebagai sebuah dunia yang lain lagi bagi Utomo.

Sejak pembentukannya Utomo terlihat sudah terlibat aktif, di Majelis yang sesungguhnya tak lebih sebagai tempat kumpul-kumpul sejumlah kalangan intelektual, aktivis, praktisi politik, hingga kelompok profesional dan bisnis.

"Di sini prinsipnya kita hanya *mengaji* saja, tapi bukan baca Yasin atau ceramah melainkan diskusi dengan niat *lillahi ta'ala*," kata Utomo, sebagaimana tertuang dalam buku *"Mas Tom The Living Bridge"*, karya seorang penulis sekaligus intelektual muda Ahmad Gaus AF.

Pada mulanya Majelis Reboan didirikan dengan semangat untuk memperlebar ruang kebebasan publik, termasuk kebebasan berbicara yang pada masa itu (dekade 1980-an) sulit ditemukan. Wilayah *civil society*

nyaris habis, dan sebagian besar kekuatan masyarakat terkooptasi oleh rezim. Elemen-elemen kekuatan Islam merunduk di bawah tanah, lantaran rezim



UTOMO DANANJAYA

Utomo secara elok mengambil peran mengawal gagasan pembaruan pemikiran Islam yang ditabuh oleh Nurcholish. Bukan hanya mengawal, menjadikannya

memperlihatkan kecenderungan anti-Islam.

Meskipun bukan organisasi besar, kegiatan Majelis Reboan cukup banyak menyedot perhatian publik. Lebih-lebih ketika Cak Nur (Nurcholish Madjid) dan Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) mulai sering dilibatkan. Kenang Utomo, Cak Nur dan Gus Dur dua tokoh yang menjadi bahan bakar Majelis. Gus Dur berbicara politik praktis, Cak Nur membahas isu-isu keislaman. Sosok keduanya penting sebagai pemantik publikasi.

Tampilnya Gus Dur sebagai Ketua Umum PB NU, dalam Muktamar NU di Situbondo tahun 1984 membawa angin segar dalam diskursus keislaman di tanah air. Pada saat itu NU juga mengumumkan deklarasi untuk kembali ke "Khitah 26". Maksudnya, mundur dari percaturan politik praktis.

Majelis Reboan tidak melewatkan momentum tersebut. Kemenangan Gus Dur dirayakan dengan syukuran dan makan malam di gedung YTKI (Yayasan Tenaga Kerja Indonesia), Jakarta. Utomo mengundang sejumlah tokoh, terutama dari kalangan muda, untuk ikut berkumpul dan bersuka cita.

Keesokannya tajuk rencana harian *Kompas* mengapresiasi acara itu sebagai pertemuan kalangan intelektual muda yang masih bersih, sederhana, jujur dan rendah hati, belum tercemar Orde Baru.

Dalam perjalanan waktu kemudian sejumlah aktivis Majelis Reboan hijrah ke Paramadina. Utomo ingat betul kisah kronologinya.

Ketika Cak Nur selesai belajar di Amerika, dan pulang ke tanah air pada 1984 dengan menggondol gelar doktor, sebagian anggota Majelis Reboan meminta Nurcholish untuk mendirikan lagi sebuah forum, yang lalu kelak diberi nama Paramadina. Dalam rapat kedua pembentukan barulah Cak Nur diundang.

"Saya mau tapi harus ada Utomo," kata Cak Nur, ketika itu. Jadilah Utomo ikut pula aktif dalam pendirian Paramadina.

Adalah Cak Nur dan Utomo yang mengusulkan nama Paramadina bagi lembaga baru yang hendak didirikan. *Parama*, yang artinya utama atau prima, itu usulan dari Cak Nur dan *Dina*, yang artinya agama, usulan dari Utomo.

Jadilah nama Paramadina diterima antusias oleh para pendiri. Dalam rapat-rapat pendirian, Utomo mengusulkan agar disusun Manifesto Pendirian. Usul ini disambut oleh Cak Nur, dengan menyusun Wawasan Dasar Yayasan Wakaf Paramadina.

Di mata Utomo, antara Majelis Reboan

dan Paramadina memiliki kesamaan. Yaitu sama-sama memperjuangkan kebebasan, pluralisme, dan toleransi agama. Paramadina mengembangkan doktrin, Majelis Reboan mempraktekkan peradaban. Untuk kerja-kerja kemanusiaan semacam itulah, hampir seluruh hidup Utomo dicurahkan di mana saja, tidak hanya di Paramadina dan Majelis Reboan.

## BIODATA

**NAMA** : Utomo Dananjaya  
**LAHIR** : Kuningan, Jawa Barat 6 Februari 1936  
**ISTRI** : Mien Muthmainnah Sudibya

### ANAK/MENANTU:

1. Tatat Rahmita UtamiEman Sulaiman Mukhtar
2. Lulu Lutfiasari/Indra Darma Lubis
3. Yanyan Ridayani (Alm)
4. Rini Fajarini Dewi/Agus Setiawan
5. Agus Mukhlis Barlian/Hani Ariati Sudarwati
6. Poppy Ismalina/Johanes Nicolaas Warouw

**CUCU** : 9 orang

### PENDIDIKAN:

- Sekolah Rakyat, Mandirancan, 1951
- Sekolah Menengah Pertama, Kuningan, 1953
- Sekolah Guru A, Bandung, 1957
- Pendidikan Guru SLP, Bandung, 1961
- IKIP Bandung, 1965

### PEKERJAAN DAN ORGANISASI:

- Ketua Perhimpunan LP3ES, 2005-Sekarang
- Ketua Yayasan Pekerti, 1997
- Sekarang Ketua Pengawas P3M, 1998-Sekarang
- Direktur Institute for Education Reform Universitas Paramadina, 2003-Sekarang
- Wakil Rektor Universitas Paramadina Mulya, 1998-2002
- Ketua Tim Pendiri Universitas Paramadina Mulya, 1995-1998

**ALAMAT KANTOR:** Wisma Kodel Lt. 11  
 Jalan HR Rasuna Said Kav. B-4, Kuningan  
 Jakarta Selatan

**ALAMAT RUMAH:** Jalan Cipinang Jaya II E/20  
 Jakarta 13410

## Menjembatani Perbedaan

Utomo adalah kritikus yang jenaka. Endang Basri Ananda, seorang mubaligh kenamaan pernah merasakan kritik jenaka ini.

Dalam sebuah ceramah, Endang Basri Ananda berbicara panjang lebar tentang berbagai bencana yang menimpa negeri mulai angin topan, banjir, tanah longsor, gempa bumi. Kata Endang, Tuhan murka karena manusia sudah ingkar dan menjauhi-Nya.

"Wah, Tuhan ente *kok* kejam banget di mana-mana menebar bencana dan cobaan," sindir Utomo.

Sindirannya juga Utomo sampaikan kepada

Salamullah, sebuah kelompok pengajian pimpinan Lia Aminuddin, yang gencar mengumumkan akan ada berbagai bencana di muka bumi sebagai kutukan Tuhan. Kepada Abdur Rahman, yang disebut-sebut sebagai Imam Besar Jamaah Salamullah, Utomo berpesan, "Tolong bilang pada Jibril, sekali-kali kasih berita gembira *dong*, jangan berita buruk terus. Supaya kita semua punya harapan hidup".

Pada kesempatan lain Utomo pernah mendengarkan khutbah Jumat seorang kenalan bernama Drs Abujamin Roham. Roham menguraikan kelebihan Al-Quran dibanding kitab-kitab suci lain seperti Injil. Al-Quran disebutnya sebagai kitab suci paling sempurna, dan paling lengkap, sedangkan Injil tidak.

Oleh sebab itu seharusnya umat manusia hanya berpegang pada kitab suci yang sempurna, yakni Al-Quran. Usai shalat Jumat Utomo menghampiri sang khatib, sambil menyampaikan pertanyaan retorik, "Tuhan ente masih bodoh, ya, waktu membuat Injil?"

Utomo merupakan kritikus jenaka yang mampu berdiri di semua kelompok. Tak jarang ia menjembatani berbagai perbedaan di antara kelompok-kelompok yang berbeda, dengan tetap memiliki warna dan sikap yang jelas. Itu sebab, orang banyak menyebut Utomo sebagai "the living bridge" atau "jembatan hidup".

Ungkapan "temannya musuh adalah musuh", itu tidak berlaku buat Utomo. Dua orang atau dua pihak yang sedang bermusuhan, tetap bisa sama-sama menganggap Utomo sebagai teman pada saat yang sama.

Ketika Gus Dur bertikai dengan orang-orang ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia), Utomo tetap berkawan baik dengan Gus Dur sekaligus dengan orang-orang ICMI. Utomo tidak ikut mengeritik ICMI sebagaimana Gus Dur. Tetapi juga tidak masuk ICMI, seperti banyak temannya yang lain.

Sebagai "jembatan hidup" Utomo berdiri di antara kelompok yang liberal dan yang konservatif. Ia tetap konsisten dengan mandat pembaruan. Baginya, pembaruan adalah kebutuhan semua orang.

Ketika tahun 1970-an bersama Nurcholish Madjid dan kawan-kawan mengulirkan gagasan pembaruan, Utomo tetap tidak membuat jarak dengan para aktivis Islam yang berbeda pandangan. Ia mengunjungi teman-teman militan yang dipenjara rezim Suharto, sambil tetap menyatakan tidak setuju dengan cara-cara yang mereka tempuh. ■ HT

● DR. BOMER PASARIBU, Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (1999-2000)

# Perburuhan Bukan Faktor Tunggal Investasi

**B**omer Pasaribu adalah salah seorang pakar tentang ketenagakerjaan yang dimiliki Indonesia. Di masa pemerintahan Presiden, KH. Abdurrahman Wahid, dia dipercaya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1999-2001).

Kini, selain beraktivitas sebagai anggota Fraksi Partai Golkar dan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI, Doktor lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini juga seorang akademisi yang mengabdikan ilmunya sebagai pengajar bidang studi Sumber Daya Manusia dan Pembangunan pada Program S2- dan S-3.

Selama 19 tahun terakhir, Bomer ikut dan memimpin delegasi Indonesia ke Konferensi ILO (*International of Labour Organisation*) atau Organisasi Buruh Dunia. Dia sering diundang ke luar negeri sebagai pembicara dalam seminar soal dunia ketenagakerjaan dan kemiskinan.

Saat berbincang-bincang tentang kondisi dunia ketenagakerjaan di Indonesia dengan Anis Fuadi dari *Berita Indonesia*, di ruang kerjanya Gedung DPR/MPR, Jakarta, pertengahan April silam, Direktur CLDS (*Center of Labour and Development Studies*) ini mengungkapkan pandangannya dengan jelas, kritis, dan obyektif. Berikut petikan wawancara lengkapnya.

**Awal April silam terjadi gelombang demonstrasi pekerja di sejumlah daerah di tanah air, menentang rencana pemerintah merevisi UU Ketenagakerjaan. Apa makna di balik peristiwa tersebut, menurut Anda?**

Sewaktu berlangsung aksi demonstrasi buruh berskala sangat besar di berbagai penjuru tanah air, saya tengah berada di Vietnam menjadi salah seorang pembicara utama dalam sebuah seminar internasional yang diselenggarakan oleh Organisasi Parlemen se-Asia, bertema 'Pengangguran dan Kemiskinan', (4-7 April 2006).

Selama berlangsung seminar, melalui dua televisi besar yang disediakan panitia seminar, seluruh peserta dapat menyaksikan liputan CNN seputar dua peristiwa besar di dunia, yakni demonstrasi berskala besar oleh pekerja di beberapa daerah di Indonesia dan aksi demonstrasi gabungan mahasiswa dan buruh yang mengguncang Perancis.

Tak ayal, dua isu itu menjadi perbincangan hangat seluruh peserta seminar. Apalagi, hampir setiap jam, CNN menyiarkan *breaking news* tentang per-

kembangan demonstrasi pekerja di tanah air dan Perancis.

Di sela-sela seminar tersebut, saya diwawancarai wartawan asing dari TV Belanda, TV Australia, TV Jepang, dan TV Perancis. Mereka menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di balik aksi demonstrasi pekerja di Indonesia.

**Apa sebenarnya masalah ketenagakerjaan di Indonesia?**

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia boleh dikatakan mengalami satu periode panjang 'ketertekanan'. Pertama, pada zaman Orde Lama pekerja (sering disebut buruh) dulu tertekan karena hanya dilibatkan menjadi kuda tunggangan politik golongan yang disebut Nasakom waktu itu. Jadi, para pekerja saat itu bukan diberdayakan untuk kepentingan pelipatgandaan kesejahteraannya. Berarti selama Orde Lama, nasib pekerja sangat tertekan dan menderita.

Di masa Orde Baru, gerakan pekerja juga tertekan di berbagai aspek, bukan hanya di dalam hak politiknya, hak berdemokrasi, hak ekonomi, dan hak asasi. Ke-



DR. BOMER PASARIBU

hidupan pekerja saat itu tertekan akibat strategi pertumbuhan investasi sehingga dari tiga unsur Tripartit (unsur pimpinan serikat pekerja, unsur pimpinan pengusaha, dan pemerintah) yang seharusnya setara, unsur pekerja dan serikat-serikat pekerja berada di posisi terlemah. Yang paling kuat tentulah pemerintah dan pengusaha serta organisasi pengusaha.

Baik pada Orde Lama maupun Orde Baru, selalu yang didominasi adalah pekerja dan yang selalu mendominasi adalah pemerintah dan pengusaha.

Selanjutnya, pada periode 1995-1997, ada tanda-tanda pergeseran pola hubungan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja/serikat pekerja. Hal itu disimboliskan oleh keputusan Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 144 tentang Tripartit pada tahun 1995.

Akhirnya dibentuklah lembaga Tripartit mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia mengikatkan dirinya pada mekanisme Tripartit yang berlaku secara internasional, yang menempatkan tiga pihak:

pemerintah, pengusaha, dan pekerja; dalam posisi yang setara. Yang selama ini di era Orla dan Orba *bargaining position* pekerja Indonesia selalu berada di bawah supremasi pemerintah dan pengusaha.

Pada 1995-1996, ada keinginan mengganti UU No. 12 tahun 1964 karena dinilai sudah terlalu ketinggalan zaman dan tidak senafas dengan semangat Konvensi ILO 144.

Rencana perubahan UU itu kemudian didiskusikan di forum Tripartit Nasional (Tripartitnas) dan berlangsung sangat alot, komprehensif, dan relatif menyita waktu lama sekitar 1,5 tahun. Itu adalah hasil pekerjaan yang melelahkan dan sebagai konsensus dari forum Tripartitnas.

Draft hasil perumusan Tripartitnas itu selanjutnya disampaikan ke Presiden dan DPR untuk dibahas oleh Pansus DPR secara mendalam sampai akhirnya keluarlah UU No. 25 tahun 1997. Saya waktu itu ikut terlibat dalam Pansus itu.

Pada 2002 kembali muncul keinginan untuk memperbaiki substansi UU 25/1997. Merespons itu, forum Tripartitnas kembali membahasnya selama hampir 1,5 tahun juga sampai lahir UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Satu hal yang perlu digarisbawahi, meskipun proses evaluasi dan revisi atas UU lama berlangsung sangat alot, ketat, dan penuh perdebatan tajam tapi produk yang dihasilkan bisa diterima semua unsur Tripartit, karena semua unsur memang terlibat dan dilibatkan. Dan itu berlangsung di dalam ruangan tertutup. Jadi tidak perlu ada unjuk rasa, apalagi yang mengarah pada tindakan anarkis.

Singkatnya, ada keseimbangan yang bermuara pada titik kompromi dan *consensus building* dari proses perumusan yang melibatkan semua unsur Tripartit.

Kembali pada persoalan kemarin, seandainya memang ada keinginan pemerintah untuk mengevaluasi UU 13/2003 maka hal itu sepatutnya dibicarakan oleh forum Tripartit Nasional.

Menurut saya, berapapun lamanya waktu yang tersita, bagaimanapun alotnya proses yang dijalani, serta betapa besarnya energi yang terbuang dalam rangka mencari titik kompromi di antara ketiga unsur jauh lebih baik dibandingkan besarnya ongkos politik, ongkos ekonomi, ongkos sosial yang diderita oleh bangsa dan negara ini akibat aksi-aksi demonstrasi kalangan pekerja.

### Tripartit adalah keharusan?

Saya sangat berharap forum Tripartitnas benar-benar diberdayakan secara efektif dalam proses evaluasi atau revisi terhadap

UU 13/2003. Keberadaan forum Tripartit sudah merupakan keniscayaan sebab Indonesia sudah meratifikasi Konvensi ILO nomor 144 tentang Tripartit.

Dari aspek substansi, di dalam UU 13/2003 itu jelas termaktub kepentingan pihak pekerja dan pihak pengusaha, termasuk pemerintah. Saya berharap ada *consensus building* yang dihasilkan dari forum Tripartit Nasional. Dengan kata lain, tidak ada pihak yang didominasi dan pihak yang mendominasi. Tripartit mensyaratkan adanya posisi setara di antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

### B • I • O • D • A • T • A

#### NAMA LENGKAP:

DR. BOMER PASARIBU, SH., SE., MS.

Tempat/Tanggal Lahir: Batangtoru  
Tapanuli Selatan, 22 Agustus 1943

Agama: Islam

Istri: Dra. Hj. Sari Ena Lubis

Anak: 5 (lima) orang

Pekerjaan Sekarang:

Anggota DPR RI 2004-2009 dari Partai  
Golongan Karya

#### RIWAYAT PENDIDIKAN:

- SDN Padang Sidempuan (1955)
- SMPN B Padang Sidempuan (1958)
- SLTAN B Padang Sidempuan (1961)
- Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (S1-1976)
- Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (S1-1980)
- Institut Pertanian Bogor (S2-1996)
- Program Doktor Institut Pertanian Bogor (S3-2000)

#### PENGALAMAN KERJA:

- Staf Pimpinan Bank di Medan (1967-1980)
- DPRD Prov. Sumatera Utara (1971-1982)
- Anggota DPR RI Fraksi Karya Pembangunan (1982-1987)
- Anggota MPR RI (1998-1999)
- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2000)

#### PENGALAMAN ORGANISASI:

- Pimpinan Golkar Sumut & Pusat (1964-2004)
- Anggota Manggala BP7 Pusat (1984)
- Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Jakarta (1995-2000)
- Pimpinan Federasi SPSP Pusat (1985-2002)
- Pimpinan ISEI & PADI Pusat (1999-2004)
- Pimpinan IRDES Jakarta (2001-2004)
- Ketua Umum HPWD (2001-2004)
- Direktur CLDS (Center of Labour and Development Studies)

### Soal revisi UU Ketenagakerjaan yang ditentang serikat pekerja?

Di DPR saya bertugas di Badan Legislasi DPR yang urusannya menyangkut pembentukan undang-undang. Berdasarkan UU No. 10 tahun 2004, DPR dalam hal ini Badan Legislasi (Baleg) adalah koordinator penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang melibatkan DPR dan Pemerintah.

Sejauh pengetahuan dan pemahaman

saya seputar perkembangan pembentukan UU yang berlangsung di DPR, apa yang disebut dan belakangan ditentang habis-habisan oleh kalangan serikat pekerja Indonesia sebagai RUU Revisi UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak tercantum di dalam Prolegnas 2004-2009 yang berjumlah 285 RUU.

RUU itu juga tidak ada di dalam Daftar RUU Prioritas 2006 yang berjumlah 43 RUU.

Baleg DPR belum pernah secara resmi menerima usulan pemerintah soal RUU revisi UU Ketenagakerjaan. Saya sendiri juga belum pernah membaca Naskah Akademik yang merupakan hasil pengkajian dari lembaga pendidikan/penelitian yang *qualified*.

Saya juga tidak tahu apakah RUU tersebut, kalau memang pemerintah sudah menyiapkannya, sudah memiliki ataukah belum naskah akademiknya. Yang pasti, di dalam naskah akademik itulah dipaparkan semua aspek secara komprehensif dan detil, seperti latar belakang mengapa UU Ketenagakerjaan mesti direvisi dan apa tujuannya. Naskah Akademik itu yang justru sangat penting dalam konteks pengajuan sebuah RUU, sebab *draft* RUU sendiri paling berapa halaman.

Kendati sudah ada Prolegnas dan RUU prioritas tahunan, pemerintah bisa saja mengajukan RUU yang baru kepada DPR sepanjang itu dianggap sangat urgen, termasuk seandainya pemerintah ingin merevisi UU Ketenagakerjaan, misalnya. Hanya saja, sekali lagi, *draft* RUU itu pun mesti dilengkapi naskah akademik.

### Soal semangat menarik investasi yang melatarbelakangi rencana pemerintah merevisi UU 13 tahun 2003?

Jangan terlalu menyederhanakan persoalan seolah-olah dengan revisi UU Ketenagakerjaan maka iklim investasi pasti tercipta, dan investor asing akan berduyun-duyun datang ke Indonesia.

World Economic Forum (2005) menyebutkan, ada tujuh penghalang peluang investasi, dan perlu dicatat faktor perburuhan sendiri berada di urutan terakhir.

Itu artinya, betapa tidak mudahnya menarik investasi asing sekaligus tidak bisa pula kita menyederhanakan persoalan bahwa minat investasi hanya berkaitan dengan kondisi perburuhan.

Di Prolegnas ada RUU Penanaman Modal. Mungkin itu jauh lebih relevan untuk diberikan perhatian serius oleh pemerintah bila memang berniat meningkatkan minat investasi asing, bukannya merevisi UU Ketenagakerjaan. ■ **RF**

## Sidang Untuk Wakil Rakyat

**K**elanjutan persidangan terhadap 10 mantan anggota DPRD NTB yang terkait kasus dugaan korupsi dana APBD senilai Rp 17 miliar tak berujung. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) L. Winengan berpendapat sebaiknya dihentikan saja agar tidak membingungkan masyarakat. Dia menilai kasus tersebut sangat terkait dengan stabilitas di NTB.

Dikatakannya, masyarakat banyak mempertanyakan kelanjutan proses hukum kasus dugaan korupsi tersebut karena cukup lama mengendap. Bahkan selama kasus tersebut digulirkan sudah tiga kali terjadi pergantian Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati NTB, Mariadi Idham, mengatakan, proses hukum tetap jalan. Dan Kejati sudah menggelar sidang dan memeriksa 20 saksi sejak pertengahan November 2004.

Keterangan saksi H. Lalu Serinata (Gubernur NTB) juga telah dibacakan jaksa pada persidangan dari hasil pemeriksaannya di Kejati NTB beberapa waktu sebelumnya. Sidang terakhir Senin (17/4) pemeriksaan terdakwa dan dinyatakan selesai.

Sebagaimana diketahui, kasus dugaan korupsi dana APBD NTB 2001/2002 tersebut setidaknya-tidaknya melibatkan 10 terdakwa mantan anggota DPRD NTB. Mereka diantaranya, Lalu Kushardi Ang-rat, Lalu Kumala, Lalu Mustakim, I Gusti Komang Padang, Anwar MZ, Abdul Hafidz, Abu Bakar Muchdi, dan Sunardi Ayub mantan Ketua DPRD NTB (1999-2004). Sedangkan anggota DPRD NTB yang aktif dan menjadi terdakwa yaitu Ali Ahmad dan Taqiuddin Mansyur.

Kasus dugaan korupsi yang semula disebut-sebutkan Rp 24 miliar lebih tersebut awalnya melibatkan 12 anggota dan mantan anggota DPRD NTB, namun dua diantaranya yakni, Artawa dan H Mahdan meninggal dunia karena sakit. Demikian ditulis *Media Indonesia online*, 24 April 2006. ■ SB



DOKI

## Jaksa Korek File Pak Harto

**S**eperti yang banyak diberitakan media masa baik cetak maupun elektronik, bahwa mantan presiden di era Orde Baru itu kesehatannya akan diperiksa kembali oleh tim dokter dari Kejaksaan untuk memastikan kondisi terbaru kesehatannya. Boleh jadi pemeriksaan tersebut ada kaitannya dengan rencana jaksa untuk membuka kembali kasus Pak Harto.

Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menegaskan bahwa Presiden SBY tidak akan melakukan intervensi dalam upaya membuka kembali kasus mantan Presiden Soeharto. Arman, demikian ia disapa, juga menegaskan kembali rencana Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan pak Harto minggu depan. Rencana ini telah dikonsultasikan dengan pihak Mahkamah Agung (MA).

Untuk melakukan pemeriksaan tersebut, Kejaksaan akan membentuk tim. Ketika ditanya apakah tim yang dimaksud adalah tim yang dulu merekomendasikan penghentian pemeriksaan terhadap Soeharto, Rahman mengisyaratkan bahwa tim lama akan tetap dilibatkan.

Arman juga menjawab 'tidak' ketika ditanya kemungkinan membawa Soeharto ke luar negeri untuk diperiksa kesehatannya.

Sementara pengacara senior Adnan Buyung Nasution, menilai langkah yang akan ditempuh Kejaksaan untuk memeriksa kembali kondisi kesehatan Pak Harto, sudah tepat. Peralnya, secara kasat mata, Pak Harto sepertinya sudah terlihat sudah sehat. Demikian *Hukumonline.com*, 24 April 2006.

Putusan Pengadilan Jakarta Selatan yang diketuai Lalu Mariyun yang berlangsung pada 28 September 2000 menetapkan bahwa penuntutan perkara pidana HM. Soeharto tidak dapat diterima dan sidang dihentikan. Putusan tersebut lahir setelah majelis hakim menerima masukan hasil test kesehatan Pak Harto di RS Pertamina pada tanggal 23 September 2000 yang menunjukkan bahwa Pak Harto secara fisik sehat, namun mengalami berbagai gangguan syaraf dan mental sehingga sulit diajak berkomunikasi. Demikian *Republika*, 24 April 2006

Apapun yang akan mengemuka atas kasus tersebut, namun Jaksa Agung menolak rencana tersebut sebagai komoditas politik. ■ SB

### KRONOLOGIS

- 3 Agustus 2000 mantan Presiden Soeharto sebagai tersangka penyalahgunaan dana yayasan sosial yang didirikannya.
- 31 Agustus 2000 Soeharto tak hadir dalam sidang pengadilan pertamanya. Tim dokter menyatakan Soeharto tak mungkin mengikuti persidangan. Ketua Majelis Hakim Lalu Mariyun memutuskan memanggil tim dokter pribadi Soeharto dan tim dokter RSCM.
- 14 September 2000, Soeharto tak hadir dalam persidangan dengan alasan sakit.
- 23 September 2000, Soeharto menjalani pemeriksaan di RS Pertamina. Hasilnya menunjukkan Soeharto secara fisik sehat, namun mengalami berbagai gangguan syaraf dan mental sehingga sulit diajak komunikasi.
- 28 September 2000, majelis hakim menetapkan penuntutan perkara pidana HM Soeharto tidak dapat diterima dan sidang dihentikan.

# Rosario Untuk Tibo

**Unjukrasa digelar di mana-mana untuk menunda eksekusi Tibo cs. Ada 16 nama baru para pelaku. Apakah eksekusi akan tetap dilakukan?**

**K**egalauan hati Fabianus Tibo, 60, Dominggus Da Silva, 35, dan Marinus Riwu, 51, karena hukuman mati yang dijatuhkan majelis hakim sedikit terobati ketika Paus Benedictus XVI mengiriminya mereka salib dan rosario. Itu merupakan bentuk dukungan moral pemimpin tertinggi umat Katolik itu terhadap ketiga terdakwa kasus kerusuhan Poso tahun 2000 lalu.

Nasib mereka saat ini memang berada di ujung tanduk, sejak PK dan grasi mereka ditolak. Mahkamah Agung (MA) sedang memproses PK kedua mereka. Namun seperti yang kutip berbagai media massa, MA menyatakan hal itu tidak serta merta menunda eksekusi yang dilakukan Kejaksaan.

Sementara itu, permohonan grasi kedua kepada Presiden SBY diajukan pihak keluarga Tibo cs ke Pengadilan Negeri Palu pada 28 Maret 2006. Namun, pengajuan grasi kedua juga belum dapat dilakukan. Seperti dilaporkan *Detik Com*, pengajuan grasi kedua boleh dilakukan setelah dua tahun sejak pengajuan grasi pertama.

Sedangkan, menurut Kapuspenkum Kejaksaan, Masyhudi Ridwan, grasi terpidana mati Tibo dkk ditolak oleh Presiden pada 10 November 2005. Hitungan 2 tahunnya jatuh pada 10 November 2007. Hal ini, tutur Masyhudi, berdasarkan pasal 2 ayat 3 UU No. 22/2002 tentang Grasi.

Media massa melaporkan pernyataan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh pada 4 April, yang memastikan eksekusi terhadap Tibo cs akan dilaksanakan bulan April ini. Namun tanggal dan waktu spesifik pelaksanaannya belum ditentukan.

Meski Kejaksaan Negeri Palu dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menutup rapat-rapat hari H, *Tempo*, 16 April 2006, mendapatkan bocoran bahwa kejaksaan telah membeli tiga peti mati dan tiga stel jas untuk para terpidana mati tersebut.

Sementara itu, dalam Laporan Utamanya, *Gatra* edisi 22 April 2006, juga mencoba mengupas perkara Tibo cs. Majalah ini menilai, kepastian eksekusi ketiga terpidana mati itu semakin kabur. Berbagai aksi untuk menunda dan me-

nolak eksekusi Tibo, maupun yang menginginkan eksekusi segera dilakukan merebak di mana-mana. Situasi malah menjadi runcing karena ketidakpastian itu.

Yang lebih mengejutkan lagi, Tibo mengajukan 16 nama baru yang menurutnya adalah aktor utama. Ia dan kedua rekannya mengaku dijejek dan dijadikan sebagai tumbal.

Beberapa kesaksian dalam persidangan terdahulu, seperti ditulis *Gatra*, bahkan ada yang meringankan Tibo. Saksi Untung dan Sutarmin, misalnya, tak pernah melihat ketiga terpidana mati itu membunuh warga muslim di tepi sungai Poso, seperti dituduhkan.

## Keterangan sumir

Jika *Gatra* lebih menyoroti kasus ini lebih umum dari segala sudut, *Tempo* memilih untuk menyorot lebih dekat. Majalah ini melakukan wawancara dengan Tibo cs di Lapas Petobo, Palu. *Tempo* juga mencoba mengontak orang-orang dalam daftar 16 nama yang disebut Tibo sebagai aktor utama. Sayangnya, mereka menolak diwawancarai. Hanya Tibo cs yang masih

bersedia diwawancarai wartawan.

Dari wawancara dengan Tibo, Da Silva dan Riwu, *Tempo* mendapatkan keterangan bahwa dalam tahap penyidikan, sebetulnya Tibo sudah akan membeberkan ke-16 nama itu. Namun, ada upaya mencegah dirinya buka mulut. Sehingga, saat ia baru mengungkapkannya sekarang, ia dituduh mengarang cerita.

Menurut Tibo cs, mereka sama sekali tidak ikut membantai orang-orang muslim dalam konflik Poso, 28 Mei 2000. Dalam peristiwa itu, 200 orang tewas, kebanyakan adalah penghuni Pesantren Walisongo yang diserang. Tibo cs berada di tempat kejadian karena dijejek. Dan saat terjadi kerusuhan, hanya berusaha menyelamatkan anak-anak yang terjebak di tengah kerusuhan.

Menurut polisi, keterangan tentang 16 pelaku utama itu masih sumir. Karena ternyata Tibo pun mendapatkannya berdasarkan keterangan seseorang yang kini tak diketahui rimbanya. Pemeriksaan polisi terhadap nama-nama tersebut juga tidak menghasilkan bukti atau keterangan baru. Polisi akan membatalkan eksekusi jika ada yang sukarela bersaksi untuk menunjukkan pelaku utama pembantaian Mei 2000 itu, sekaligus membuktikan bahwa Tibo tidak bersalah.

Saat ini, ketiga terpidana itu masih menunggu kepastian. Entah kapan eksekusi dilakukan. Mereka tetap bersikukuh menyatakan tidak bersalah. ■ RH



**TIBO DAN KAWAN-KAWAN:** Keteranganannya masih sumir.

Oleh: Dr Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang\*

## Syaykh Al-Zaytun

BAGIAN SATU  
DARI DUA TULISAN

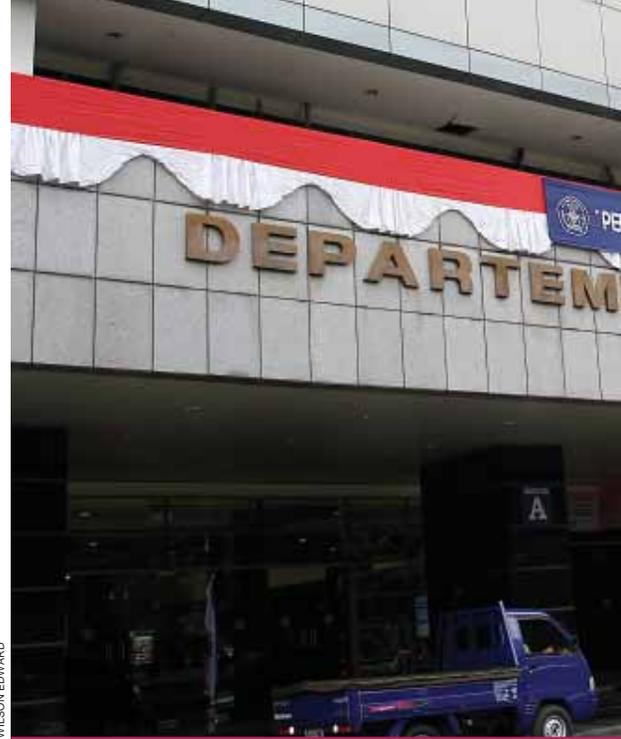


**Di Indonesia kini tumbuh "peradaban" lama dalam kemasan baru: *The end justifies the means*. Dulu "peradaban" itu hanya milik kaum komunis, kini hal itu menyebar menjadi perilaku banyak kelompok di Indonesia. Sikap itu dikemas dalam bentuk perilaku yang tak terkendali, dengan dalih kebebasan, demokrasi, dan reformasi, menghasilkan berbagai kekacauan di Indonesia ini. Beberapa orang Indonesia menyimpulkan, bahwa jika hal ini tidak diantisipasi, Indonesia akan berada di ambang kehancuran?**

**G**una memahami dan mengantisipasi masalah ini, kita perlu lebih dulu menoleh sekilas Indonesia dan sistem pendidikan masa lalunya. Kemudian menelaah bagaimana merancang pendidikan Indonesia masa kini dan masa mendatang. Setelah itu menatap citra pendidikan Indonesia modern dan pencapaian minimal pendidikan Indonesia tahun 2020. Di antaranya, menjelang 2020, kiranya pelajar-pelajar Indonesia modern dapat menjadi *the first in the world* dalam pencapaian sains dan matematik, serta semua produk pendidikan Indonesia modern sudah siap masuk dalam tatanan hidup dalam *zone of peace and democracy*.

Sekilas Indonesia dan Pendidikan Masa Lalu  
Negara kita Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah 1.922.570 km<sup>2</sup>. Penduduk berjumlah 216.268.430 tersebar di 6.850 pulau dari sejumlah 13.667 kepulauan yang ada. Terdiri dari 31 provinsi, 440 Kab/Kota, 5.105 kecamatan dan 70.663 desa. Pertambahan penduduk rata-rata 2,1 % pertahun.

Perkiraan penduduk: Tahun 2000 = 206.262.000. Tahun 2010 = 231.180.000. Tahun 2020 = 254.702.000. Distribusi umur: 0 -14 tahun = 36,6%; 15 -29 tahun = 28,3%; 30-44 tahun = 18,1 %; 45 -59 tahun = 10,6%; 60-74 tahun = 5,2%; 75 tahun ke atas = 1,1 %. Kepadatan penduduk pada tahun 2002 = 109,8 setiap km<sup>2</sup>. Indonesia dengan penduduk 216.268.430 (tahun 2003) menempati urutan keempat besar setelah



WILSON EDWARD

# PENCAPAIAN MI INDONESIA M

RRC, India, dan Amerika Serikat.

Nama Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh etnolog Inggris, GR Logan, pada tahun 1850, ketika ia menulis buku mengenai bangsa yang tinggal di kepulauan penghasil rempah-rempah itu. Logan menggabungkan kata "India" yang waktu itu diartikan oleh kebanyakan orang Barat sebagai daerah penghasil rempah, dengan kata "nesos" yang berarti kepulauan. Dengan menggabungkan dua kata itu terciptalah nama Indonesia.

Yang selanjutnya nama Indonesia diabadikan oleh para pejuang muda Indonesia, untuk menyatukan gerakan mewujudkan kemerdekaan dari penjajahan, yang tersimpul dalam sikap "Sumpah Pemuda" 28 Oktober 1928. Yakni pengakuan: Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa Indonesia. Pada hari itu pula berkumandang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya ciptaan WR Soepratman untuk yang pertama kali (secara formal). Semua itu menjiwai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, sekaligus merupakan tonggak sejarah lahirnya negara dan bangsa Indonesia secara *de facto* dan *de jure*.

Luas area wilayah Indonesia banyak ditentukan oleh kesuksesan Belanda dalam menaklukkan daerah jajahannya sejak awal abad ke-17 hingga menjelang pertengahan abad ke-20. Tidak kurang dari 350 tahun, saudagar dan tentara dari Netherland menang dalam penguasaan kepulauan nusantara dan mengendalikannya yang kemudian membentuk kolonial India Timur Belanda sampai menjelang pertengahan abad ke-20.

Tentara Jepang menaklukkan India Timur



# MINIMAL PENDIDIKAN MENJELANG 2020

Belanda dan menguasai daerah jajahannya, sampai Jepang dikalahkan kembali oleh tentara sekutu di bulan Agustus tahun 1945. Setelah Jepang menyerah, Belanda kembali menguasai wilayah Indonesia. Namun pada Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya dan terus melawan Belanda hingga mencapai kemenangan dengan menyerahnya Belanda secara resmi pada tahun 1949.

Sementara itu, pendidikan Indonesia dipengaruhi oleh beberapa hal yang signifikan, yaitu geografis, Islam, dan kolonial Belanda. Luasnya geografis dan menyebarnya kepulauan yang terjajah berabad-abad, menciptakan perbedaan budaya. Perbedaan masyarakat yang disebabkan oleh terpisahnya penduduk oleh sederetan laut, gunung, dan hutan lebat, hal itu membantu terjadinya proses terwujudnya lebih dari 400 bahasa dan dialek di Indonesia.

Banyaknya etnis dan bahasa (linguistik) menimbulkan kendala baik bagi pemimpin politik maupun pendidik. Karena bahasa yang terbaik yang telah ditetapkan untuk mengantisipasi kendala tersebut, telah ditetapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa pemerintahan, dan *lingua franca* bangsa Indonesia serta bahasa pembelajaran dalam pendidikan Indonesia modern. Bentuk pembelajaran dalam pendidikan Indonesia disusun dan didesain untuk mempromosikan motto nasional: *Bhinneka Tunggal Ika (unity in diversity)*.

Pada dekade awal kemerdekaan, sistem pendidikan belum banyak mendapatkan perhatian dari penyelenggara pemerintahan. Baru sejak tahun 1970-an, mulai dikembangkan perhatian terhadap pendidikan dasar, menengah bahkan Taman Kanak-Kanak.

**Pendidikan Indonesia dipengaruhi oleh beberapa hal yang signifikan, yaitu geografis, Islam, dan kolonial Belanda.**

Sesudah tahun 1997, data pendidikan di Indonesia belum dapat diakses secara jelas namun boleh jadi perkembangannya akan lebih menurun jika dibandingkan dengan data tahun 1997. Sebab di berbagai daerah banyak unit-unit pembelajaran yang gedung-gedungnya telah rusak bahkan roboh dan tidak dibangun kembali. Bahkan di daerah konflik seperti di Aceh, banyak tempat-tempat pembelajaran yang sengaja dibakar oleh pihak-pihak yang sedang bertikai. Banyak yang menyimpulkan bahwa pendidikan Indonesia sedang menurun dan merosot tajam dari tahun-tahun sebelumnya.

Selama setengah abad lebih setelah kemerdekaan, sistem pelaksanaan pendidikan Indonesia tersentralisir dari Jakarta, semua kebijakan pelaksanaan ditentukan oleh pusat, sedangkan geografis, sistem penyeberangan pulau yang tersebar begitu banyak belum tertangani dengan jelas, karenanya sentralisasi pendidikan menjadi sangat tidak efektif dan tidak efisien. Penyelenggaraan sekolah dan pendidikan di pulau-pulau terpencil, bahkan dibanyak pedesaan yang dekat dengan perkotaan pun belum dapat terdeteksi dengan jelas kualitasnya, karenanya statistik serta informasi yang akurat tentang pelaksanaan pendidikan untuk membangun lebih berkualitas sulit didapatkan.

Kenyataan real pelaksanaan pendidikan selama ini, perbedaan kualitas pendidikan desa dan kota sangat mencolok. Perbedaan yang mencolok itu selama ini belum menjembatani secara sistematis. Yang tampak bahwa pendidikan di desa terus tidak berdaya mencapai tingkatan kualitas yang diinginkan, sedangkan data kependudukan Indonesia sampai tahun 2002 penduduk Indonesia sebagian besar (57,0%) tinggal di desa dan sisanya tinggal di kota.

## Merancang Pendidikan Indonesia Kini dan Mendatang

Membangun pendidikan Indonesia, mestinya berfokus kepada pembangunan pedesaan, sebab mayoritas penduduk Indonesia berada di pedesaan. Menata dan membangun pedesaan sangat berakibat besar kepada kestabilan kehidupan kota, baik sektor ekonomi maupun keamanan. Mempercepat pembangunan pendidikan pedesaan akan mempercepat pembudayaan masyarakat secara luas, yang pada gilirannya akan mempercepat pemerataan budaya kemajuan yang ada di dalam masyarakat Indonesia secara keseluruhan perkotaan maupun pedesaan. Karenanya perlu diciptakan suatu sistem terpadu untuk

menjembatani kualitas pendidikan kota dan desa secara serius.

Keberdayaan pendidikan desa, yang merupakan tempat tinggal 57,0% penduduk Indonesia menjadi sangat mutlak adanya. Dengan menata pendidikan desa, dapat tercipta sumber daya insani yang siap dan sanggup secara mandiri membangun desanya, sanggup menghadapi tantangan kerja berdasar kompetensi yang mereka peroleh melalui penga-

laman pendidikan formal di sekolah. Menata pendidikan desa bukan bertujuan mempertahankan untuk menjadi tenaga kerja pertanian, sekalipun pada kenyataannya sektor pertanian sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat desa dan pindah ke sektor lainnya.

Sikap seperti itu bukan satu indikasi kemajuan berpikir masyarakat desa, namun suatu keterpaksaan yang didorong oleh tantangan hidup sedangkan di sektor pertanian mereka tidak menemukan apa yang mereka harapkan. Penyebabnya pasti minimnya kompetensi mereka di sektor pertanian tersebut.



**Berbagai kekurangan dan kelemahan masyarakat urban Indonesia masih sangat tampak dengan jelas. Budaya tidak bersih, tidak sihat, tidak disiplin, tidak taat hukum dan lain-lain masih sangat dominan di perkotaan Indonesia.**

Faktor pendidikan sebagai penyebabnya.

Sekali lagi jika peningkatan kualitas pendidikan desa termasuk sasaran utama pendidikan nasional, bukan berarti mempertahankan penduduk desa menjadi "petani", sebab tanpa pendidikanpun kenyataan tenaga kerja potensial Indonesia terbanyak berada dalam sektor pertanian (42,5% tahun 1998). Kini sektor pertanian banyak ditinggalkan, sedangkan hajat dan kebutuhan bangsa Indonesia semakin tinggi terhadap produk pertanian. Pasti penanganan instannya adalah impor. Ini bermakna semakin jauh jarak kemampuan bangsa Indonesia untuk mencegah kelaparan formal yang dideritanya.

Kompetensi yang rendah di bidang apapun akan membawa kehidupan bangsa yang tidak menentu. Hanya pendidikan yang dapat mengatasinya. Meningkatkan kualitas SDM sektor pertanian menjadi sangat mutlak adanya. Kuantitas SDM sektor pertanian Indonesia cukup besar, dibanding dengan Amerika Serikat dan Jepang. Indonesia 42,5%, Amerika 2,7% dan Jepang 5,1% (1998). Namun dari produk pertanian yang dihasilkan menunjukkan jarak yang sangat jauh. SDM sektor pertanian Amerika berjumlah 3.952.514 (2,7%) dapat menghasilkan produk pertanian berupa biji-bijian sebanyak 292.217.000 ton metrik (2000), rata-rata 74 ton per petani.

Di Jepang, SDM sektor pertanian berjumlah 3.487.652 (1988) dapat menghasilkan 12.769.000 ton (2000), rata-rata 3,7 ton per petani. Sedangkan Indonesia, SDM sektor pertanian berjumlah 40.716.888 (42,5%) hanya menghasilkan

60.169.000 ton (2000), rata-rata 1,48 ton per petani. Ditinjau dari satu sektor produksi pertanian saja kemampuan masing-masing jelas nampak jauh, Indonesia : Jepang : Amerika = 1 : 2,5 : 50. Faktor utama penyebabnya pasti kualitas pendidikan yang mereka miliki.

Ditinjau dari sisi kemanusiaan, petani Amerika mampu menyumbangkan ketenteraman urusan perut umat manusia, jika hajat per kapita kepada biji-bijian sebanyak 0,18 ton per tahun, maka petani Amerika yang hanya 3.952.514 orang itu mampu menyumbang ketenteraman perut umat manusia sebanyak: 1.335.825.778 orang = 26,23% penduduk dunia (6.188.991.000 tahun 2002) berarti juga seorang petani Amerika mampu memenuhi hajat pangan dasar (biji-bijian) untuk 411 orang. Sedangkan petani Indonesia baru mampu menyumbang kemanusiaan untuk 8,22 orang per petani.

Dalam pembangunan masyarakat kota (*urban development*), di mana Indonesia 43% penduduknya terdiri dari masyarakat urban. Namun masyarakat urban Indonesia belum memiliki budaya urban yang jelas. Sebab sebagian besar penghuni perkotaan di Indonesia masih didominasi oleh warga desa yang berbondong-bondong mengadakan urbanisasi, dengan segala keterbatasan budaya urban yang mereka miliki.

Berbagai kekurangan dan kelemahan masyarakat urban Indonesia masih sangat tampak dengan jelas. Budaya tidak bersih, tidak sihat, tidak disiplin, tidak taat hukum dan lain-lain masih sangat dominan di perkotaan Indonesia. Ini lagi merupakan objek pendidikan nasional.

Kota belum pasti kualitas tingkat pencapaian pendidikannya, begitu juga pendidikan pedesaan sudah jelas tampak kelemahan dan kekurangan kualitasnya.

Contoh pembangunan pendidikan masyarakat kota yang paling dekat dari lingkungan Indonesia adalah negara kota Singapura. Singapura merupakan masyarakat urban 100%. Singapura menjadi contoh pendidikan termaju di dunia. Pencapaian kemajuannya dititi dari penataan pendidikan, sehingga ciri-ciri dan praktik masyarakat modern sangat jelas dalam aktivitas kehidupan.

Masyarakat Singapura selalu bergerak berdasar pengetahuan, berprogram jelas, berdisiplin tinggi, beretos kerja kuat, taat hukum dan menghormati kemampuan dan pencapaian individu dan lain-lain ciri modern lainnya. Semua itu ditempuh melalui pendidikan yang jelas. Singapura berjalan dengan sistem yang jelas, sehingga siapapun yang berada di dalam masyarakat kota itu, terbawa oleh sistem yang telah mapan itu. Dalam kenyataan harian, orang Indonesia yang kurang berdisiplin pun jika masuk ke dalam Singapura dapat menjadi lebih disiplin dari pada bangsa Singapura itu sendiri.

Dalam mengambil contoh mempersiapkan dan menyongsong Indonesia 2020 kali ini, kita banyak mengambil dari

negara-negara yang telah terlebih dahulu mencapai kemajuannya. Untuk itu kita tidak boleh apriori, hanya karena yang kita jadikan contoh kali ini memang bukan negara Islam (negara berbasis syariah Islam), juga bukan satu etnis kebangsaan.

Masyarakat Singapura mayoritas penduduknya beretnis Tionghoa (bukan Islam), Amerika Serikat adalah negara mayoritas Protestan terbesar di dunia, yang belakangan ini presidennya getol “menyerang” dan mengkritik berbagai pendidikan yang sedang dijalankan oleh negara-negara “Islam” di seluruh dunia.

Namun kenyataan dalam kehidupan umat manusia, semangat piagam Madinah dapat berjalan di negara-negara yang kita sebut tadi. Juga semangat ayat Alquran surat 106 ayat 3 dan 4, “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar

dan mengamankan mereka dari ketakutan.”

Memang Ka’bah tidak berada di Singapura maupun di Amerika, namun semangat dan pesan pemilik Ka’bah dijalankan oleh Singapura dan Amerika. Mereka menjalankan sistem yang mampu mengangkat kesejahteraan hidup umat manusia agar terhindar dari kelaparan dan terlindungi dari rasa ketakutan.

Sedangkan penjaga haramain, belum mampu mengamankan peribadatan tahunan yang dijalankan oleh umat manusia sedunia, karena sistem modern belum tampak dalam kehidupan di wilayah “penjaga” haramain. Tiap tahun terjadi kematian sia-sia yang dialami oleh umat Islam dengan dalih ibadah dan mati syahid, karena kelemahan sistem pelaksanaannya.

Dari apa yang telah diurai terdahulu, tampak jelas berbagai problem pelaksanaan pendidikan nasional Indonesia. Semua problem tersebut harus dicarikan jalan keluar yang humanis dan rasional. Berbagai problem pendidikan dapat disimpulkan dalam: 1. Keterpaduan sistem, 2. Geografis, 3. Desa Kota, 4. Transportasi, 5. Sarana prasarana, 6. Kualitas pelaku didik, 7. Keseimbangan dana.

### Keterpaduan Sistem

Sebagai bangsa Indonesia, kita bersyukur kepada Tuhan YME, bangsa Indonesia telah mewujudkan UU Sistem Pendidikan Nasional (UU No 20 Th 2003), sebagai *follow up* maupun rentetan dari undang-undang yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, semenjak bangsa Indonesia merdeka. Kita merupakan lapisan masyarakat Indonesia yang memiliki keterkaitan terhadap pendidikan, tentunya berusaha dengan segala upaya untuk mewujudkan dan memiliki pemahaman yang baik terhadap isi undang-undang tersebut.

Kita sebagai masyarakat pendidikan ingin memaknai jiwa undang-undang itu dengan makna yang seluas-luasnya, bahwa pendidikan adalah suatu usaha bertujuan mengarahkan kepada *full development of personality*, yakni membangun, membentuk watak maupun kepribadian yang utuh dalam sistem pengasuhan peserta didik yang berkesinambungan (tiada henti), sehingga terwujud *sound in mind and body* yang tercermin dalam pribadi bangsa yang cerdas (intelektual, emosional, spiritual), bangsa yang bijak dan bajik yang mau memosisikan diri dalam berbagai kondisi yang tersimpul dalam berbagai sikap: *who love truth and justice, esteem individual values, respect labor, have a deep sense of responsibility*.

Bangsa yang menguasai sains dan teknologi, bangsa yang sanggup mencintai negaranya dengan penuh tanggung jawab, mampu menciptakan perdamaian masyarakat dan negaranya. Bangsa yang sanggup bergaul dengan bangsa-bangsa lain dengan peradaban yang tinggi.

**Membangun, membentuk watak maupun kepribadian yang utuh dalam sistem pengasuhan peserta didik yang berkesinambungan (tiada henti), sehingga tercermin dalam pribadi bangsa yang cerdas (intelektual, emosional, spiritual).**





**Harus dapat lebih mengakselerasikan pencapaian kualitas pendidikan nasional di daerahnya, mengacu kepada visi, "Pendidikan milik dan tugas kita bersama, milik bangsa Indonesia, milik umat manusia secara keseluruhan".**

Kita yakin, kesemuanya itu merupakan *power* suatu bangsa dan keistimewaan-nya. Dan, itu pula yang menjadi ciri utama manusia dan bangsa yang bertakwa kepada Tuhan YME, yang selanjutnya akan menjadi manusia dan bangsa mulia di sisi-Nya.

Pencapaian pendidikan nasional seperti yang tercermin itu memerlukan keterpaduan sistem. Sehingga akan menjadi milik kita semua, milik bangsa Indonesia, bahkan akan menjadi milik umat manusia secara keseluruhan.

Pendidikan yang dimiliki secara bersama, akan mampu melibatkan segala lapisan bangsa, peserta didik, pelaku didik, masyarakat, pemerintah, dan sistem itu sendiri, semuanya menyatu dalam usaha mencapai cita-cita pendidikan nasional yang telah disepakati bersama. Keterpaduan seperti itulah yang akan membawa kejayaan pendidikan, dan keterpaduan seperti itulah yang harus diwujudkan dalam aktivitas pendidikan secara nyata.

### Geografis

Problem luasnya geografis dalam bentuk kepulauan yang menyebar, yang mewujudkan berbagai bentuk budaya dan bahasa, yang telah dihadapi dengan sistem pendidikan sentralistis, ternyata membuahkan hasil yang kini dituai oleh pendidikan nasional yakni sumber daya insani Indonesia yang belum mampu bangkit secara berarti. Kini sikap keberanian mengadakan evaluasi telah tumbuh dalam kalangan kita bangsa In-

donesia, terhadap jalannya pendidikan nasional kita.

Kita telah berani masuk dalam perubahan-perubahan baik sikap maupun pikir menuju perbaikan. Otonomi pemerintahan daerah dan pendidikan telah dicanangkan. Pemerintahan daerah dan kota telah mendapat wewenang luas dalam mengatur kebijakan pendidikan nasional.

Indonesia kita yang telah menganut sistem otonomi daerah, dengan segala kewenangannya, harus dapat lebih mengakselerasikan pencapaian kualitas pendidikan nasional di daerahnya, mengacu kepada visi, "Pendidikan milik dan tugas kita bersama, milik bangsa Indonesia, milik umat manusia secara keseluruhan". Otonomi daerah bukan untuk mempersempit kiprah pendidikan nasional dan makna pendidikan secara luas.

Otonomi daerah tidak boleh menciptakan fanatisme sempit kedaerahan yang dengannya akan menjadi tertutup dari cita-cita kemajuan yang diharapkan. Otonomi daerah justru harus mampu mewujudkan pendidikan sebagai industri daerah yang berkualitas dan mampu bersaing, sehingga dapat menjadi daya tarik konsumen pendidikan dari berbagai daerah bahkan mancanegara.

### Transportasi

Transportasi, jika tidak ditata dengan seksama, justru akan membawa efek yang sangat krusial dalam pelaksanaan pendidikan. Negara kepulauan memiliki risiko yang sangat tinggi dalam hal transportasi. Transportasi yang termenej dengan baik, akan sangat menunjang kesuksesan pendidikan.

Sentra-sentra pendidikan dalam satu daerah mestinya mendapat perhatian khusus dari pemerintah berupa kemudahan transportasi bagi siapa saja yang mengadakan hubungan dengan sentra pendidikan tersebut. Terkadang, perhatian pemerintah dalam hal tersebut masih belum berimbang.

Berbagai contoh nyata, betapa lemahnya visi pemerintah daerah tatkala berdiskusi tentang penggunaan jalan raya yang menghubungkan dari dan ke suatu tempat pendidikan, karena adanya tindakan pembatasan penggunaannya oleh Pemda tersebut, dengan tiada beban pimpinan daerah itu mengatakan: "Kasih tahu mereka yang akan datang berkunjung, agar menggunakan bus kecil". Kejadian ini menimpa pada Manajemen Pendidikan Al-Zaytun, untung Al-Zaytun berakidah toleransi dan perdamaian, sehingga mampu mengukur isi kepala

orang yang mengucapkan kata-kata itu di zaman globalisasi ini, kita yang ber peradaban ini menjadi malu sendiri mendengar ucapan tersebut. Mudah-mudahan tidak terjadi di lain daerah.

## Desa Kota

Distribusi penduduk, 57% tersebar di 70.000 desa, di dalam 6.850 kepulauan besar dan kecil, menjadi problem tersendiri bagi pelaksanaan pendidikan nasional. Tipe, kondisi, dan lokasi desa-desa seperti itu, mesti terjamah oleh program pemerataan kualitas pelaksanaan pendidikan nasional secara sistematis. Warga pedesaan Indonesia menjadi penentu perubahan tampilan Indonesia masa depan dalam segala bidang, baik yang bersifat positif maupun sebaliknya.

Kesatuan dan persatuan keutuhan dan integritas, nasional masa depan sangat ditentukan oleh keberhasilan bangsa ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan di pedesaan. Jika kita berbicara kualitas pendidikan, sasarannya harus seutuhnya, yakni bagi seluruh masyarakat desa dan kota. Perbedaan yang selama ini sangat menonjol, harus dibuatkan jalan dan jembatan yang kokoh menuju persamaan. Program meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan pendidikan *excellence* adalah untuk seluruh bangsa, perkotaan maupun pedesaan. *Excellence in education imperative to national survival* (itu yang kita simpulkan).

## Sarana Prasarana

Lebih dari lima puluh tahun kita bangsa Indonesia dengan bebas menjalankan pendidikan nasional, bebas menentukan sistem, kurikulum, pendanaan dan lain-lain. UU sistem pendidikan pun telah datang silih berganti, semua bertujuan mencari solusi untuk mewujudkan kualitas pendidikan nasional. Namun, dalam aplikasi selama ini sesuatu yang dicari dan didambakan masih belum kunjung terwujud. Banyak hal memang yang menjadi penghalang.

Banyak penanggung jawab dan pelaku pendidikan yang masih menganggap sepele sarana dan prasarana pendidikan. Masih banyak yang menyimpulkan hal itu tidak merupakan problem rusial, sehingga perwujudannya tampak dan terasa sangat apa adanya, tidak mengikuti

perkembangan hajat dan zaman.

Sarana pendidikan, yakni segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan pendidikan, yang selama ini pengadaannya di sekolah-sekolah Indonesia khususnya di pedesaan, sudah sangat kedaluwarsa, justru dengan sarana yang ada itu, dapat melumpuhkan makna dan cita-cita pendidikan itu sendiri (dalam kata lain menciptakan kebodohan).

Sarana yang tersedia di sekolah-sekolah pedesaan (juga di perkotaan) tidak mencerminkan kesiapan bangsa Indonesia menyambut gegap-gempitanya perubahan zaman. Zaman manual berubah kepada kecerdasan otak dan ilmu pengetahuan, namun sarana penghantar ke arah itu

belum diekspos di dalam pembelajaran formal. Zaman yang serba bersih dan sehat, dan sekolah belum mempersiapkan sarana untuk membiasakan hidup bersih dan sehat. Zaman serba disiplin, sekolah juga belum menciptakan sarana yang dapat menunjang ke arah itu.

Juga prasarana pendidikan, sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pendidikan.

Kita dapat mencermati keberadaannya. Bangunan-bangunan fisik sekolah khususnya di pedesaan terkesan rapuh, tidak bervisi pendidikan yang luas, loksinya tidak strategis dalam pandangan pendidikan, asal-asalan.

Bahkan banyak orang Indonesia berpandangan bahwa bangunan fisik pendidikan tidak menentukan hasil dan kualitas pendidikan. Jika pandangan itu dianut oleh banyak orang sudah barang pasti apa yang terjadi dan kita rasakan selama ini tentang terhambatnya kualitas pendidikan nasional kita akan terus abadi bercokol.

Kami yakin, kitapun harus yakin bangunan fisik sekolah tetap punya peranan penting untuk mengantar pencapaian pelaksanaan pendidikan yang berkualitas. Fisik bangunan sekolah harus terprogram dengan baik kokoh, dapat mewartakan visi pendidikan yang berjangka panjang ke depan. Hari-hari yang panjang telah kita lalui, namun seluruh hari yang kita lalui selama lebih lima puluh tahun ini masih mengatakan bahwa pendidikan Indonesia tertinggal jauh dari tetangganya.

Tapi kita sebagai bangsa masih berkeyakinan bahwa kita masih memiliki masa depan, masa depan itu pasti ada dan datang karenanya sejak dini kita persiapkan, agar kita sebagai bangsa tidak ditunjuk dengan isyarat yang sama oleh hari-hari yang akan kita lalui di masa mendatang. ■

**Bangunan fisik sekolah tetap punya peranan penting untuk mengantar pencapaian pelaksanaan pendidikan yang berkualitas.**



WILSON EDWARD

● MENTERI NEGARA PAN RI DRS. TAUFIQ EFFENDI, MBA.

# Pionir Pakta Integritas

**Dia menteri yang memelopori Pakta Integritas pemberantasan korupsi meski, secara bersamaan, diterpa isu terlibat korupsi.**

**M**enteri Negara Pembedayaan Aparatur Negara (Meneg PAN), Taufiq Effendi, menjadi orang pertama dalam gerbong Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang memelopori penandatanganan Pakta Integritas.

Dia menandatangani Pakta Integritas sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berlandaskan kepada integritas diri yang tinggi.

Taufiq Effendi menandatangani Pakta itu terkait dengan kontrak politiknya selaku Meneg PAN dengan Presiden SBY untuk menjadikan Kementerian PAN ujung tombak pemberantasan korupsi.

Bersamaan itu, diluncurkan pula situs internet (<http://www.kormonev.org>), dimaksudkan untuk menyebarkan informasi yang berhubungan dengan segala aktivitas pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang dikeluarkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 5 Desember 2004.

Situs yang dihasilkan Kelompok Kerja (Pokja) Nasional Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi (Kormonev) Inpres No. 5 itu dirancang *user friendly*. Masyarakat dapat berinteraksi secara *online* dengan pengelola situs, ataupun dengan pengguna lainnya.

Sebagai pelopor, Taufiq tetap saja tegar melangkah maju kendati dalam waktu bersamaan, tepat pada siang hari pukul 14.00 WIB tanggal 17 April 2006 namanya dilaporkan oleh Ade Daud Nasution, anggota DPR RI dari F-PBR, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan itu berisi dugaan korupsi sebesar 13.777.663 euro

(setara Rp 150 miliar) pada proyek NCSIS (*National Civil Service Information System*) atau Sistem Informasi Kepegawaian Nasional di Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPDN) yang bernaung di Kementerian PAN. Proyek NCSIS sendiri ditetapkan pada 6 Desember 2005 oleh Kepala BKN Prapto Hadi.

Ade menuding, Taufiq telah menunjuk langsung Knowment AIE, perusahaan Spanyol, sebagai pelaksana pengerjaan

proyek NCSIS. Penunjukan tanpa melalui proses tender, kata Ade, tidak sesuai dengan Keppres No. 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Menariknya, media massa nasional lebih tertarik mengangkat isu dugaan korupsi itu ke permukaan ketimbang penandatanganan Pakta Integritas ataupun peluncuran situs.

Terbukti, saat acara sosialisasi situs kepada pers, sebagian besar pertanyaan yang diajukan wartawan banyak ditujukan kepada Meneg PAN. "Kalau dipanggil KPK saya akan datang dan menjelaskan masalahnya. Kalau saya salah, ya, siap dijabloskan ke penjara. Sebaliknya, jika tidak terbukti, harus ada klarifikasi posisi

saya," ucap Taufiq tenang menjawab pertanyaan wartawan soal dugaan korupsi yang menerpa dirinya.

Yang pasti, Taufiq membantah tuduhan Ade meski dia mengaku sangat menghargai sikap kritis Ade karena maksudnya baik. "Tapi, tolong jangan bawa persoalan ini ke arena politik," imbau Taufiq.

## Janji dan Larangan

Keberhasilan implementasi Pakta Integritas yang ditandatanganinya, Taufiq Effendi mengingatkan, sangat tergantung pada partisipasi dari lembaga-lembaga pemantau korupsi independen.

Tak aneh bila acara penandatanganan Pakta Integritas, sejumlah lembaga pemantau korupsi seperti Indonesia Procurement Watch (IPW), Transparansi Internasional Indonesia (TII), dan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) diundang untuk menjadi saksi.

Ada tujuh janji yang termuat dalam Pakta Integritas dimaksud. *Pertama*, menggunakan segala potensi yang dimiliki untuk mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia sesuai Inpres No. 5/2004. *Dua*, berperan secara proaktif dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.



DRS. TAUFIQ EFFENDI, MBA.

*Tiga*, melaksanakan Pakta Integritas di lingkungan Kementerian Negara PAN sesuai Modul Pakta Integritas yang ditetapkan, sehingga Kementerian Negara PAN menjadi perwujudan suatu 'Pakta Integritas' yang efektif di Indonesia.

*Empat*, memerintahkan seluruh pejabat dan karyawan di lingkungan Kementerian PAN untuk menandatangani Pakta Integritas dan melaksanakannya secara konsisten.

*Lima*, melibatkan lembaga independen untuk memantau penerapan Pakta Integritas di lingkungan Kementerian Negara PAN. *Enam*, melindungi saksi yang menyampaikan informasi penyimpangan pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Kementerian Negara PAN.

Dan, "bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi segala konsekuensinya," demikian butir ketujuh Pakta Integritas tersebut.

Taufiq sangat terobsesi, Kementerian PAN akan menjadi panutan (*role model*) dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan instansi-instansi pemerintah.

Sebagai langkah awal, Taufiq akan memfokuskan pelaksanaan pada: (1) larangan memberi dan menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan; (2) pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan Keppres No. 80/2003; (3) prinsip pelaksanaan anggaran harus berbasis kinerja; dan (4) penegakan disiplin di berbagai bidang.

## Penuh Keajaiban

Setamat kuliah Taufiq bergabung ke Polri dan ditempatkan di Divisi Hubungan Internasional. Sejumlah kesempatan pendidikan ke luar negeri pernah dia peroleh sampai akhirnya menggeluti bidang reserse.

Ketika menjabat Sekretaris Deputy Operasi Mabes Polri, Taufiq menciptakan beberapa motto populer, seperti 'Polisi Sahabat Anak', 'Polisi Masuk Desa', dan 'Polisi Pariwisata'.

Terakhir kali dia ditempatkan di sektor Pembinaan Masyarakat, Mabes Polri. Pada 1996, ketika Bintang Satu tersemat di bahunya, dia justru memutuskan pensiun dari Polri.

Taufiq lantas dikaryakan ke Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Sayang di sini dia kurang diterima dengan ra-

mah. Taufiq seolah tersisih, posisinya tak dihiraukan sama sekali. Menempati sebuah ruangan di BPPT, mulanya setiap bulan ia memperoleh gaji hanya Rp 450 ribu.

"Kami nggak tahu siapa yang memin-dahkan Bapak ke sini," ujar salah seorang karyawan BPPT, yang coba disapa Taufiq.

Dia lalu memberanikan diri menemui Prof. B.J.Habibie—saat itu menjabat Kepala BPPT—sampai berhasil berbicara dalam satu mobil dalam perjalanan pulang kantor. "Pak, saya mau bicara sama Bapak," cetus Taufiq. Ia lalu berbicara terus tanpa henti. Habibie memang menyuruhnya berbuat demikian, untuk harus berani menyampaikan pendapat.

Hasilnya? Seminggu setelah bertemu Habibie gajinya naik menjadi Rp 1 juta, seminggu lagi Rp 2 juta, dan seminggu kemudian menanjak menjadi Rp 3 juta. Sebagai Kepala Divisi Proyek Khusus, dia tetap berkantor di BPPT sampai tahun 2000.

Dia lalu mengikuti ajakan untuk berkiprah ke pentas politik, yang datang dari

Susilo Bambang Yudhoyono saat masih menjabat Menko Polkam. Dia kemudian duduk sebagai Wakil Sekjen Partai Demokrat. Naluri intelijen Taufiq berbicara, SBY adalah pemimpin yang tepat di masa datang.

Sebelum menjadi menteri, Taufiq adalah anggota DPR-RI hasil Pemilu 2004 dari Partai Demokrat. Dia berhasil melenggang ke Senayan tanpa harus mengeluarkan banyak uang.

Di panggung-panggung kampanye ia hanya berjoged sebentar tanpa dilatari spanduk atau selebaran kampanye dan semacamnya. Saat itu ada saja orang lain yang membiayai perjalanan pesawat, hotel dan lain-lain.

Taufiq lalu berkesimpulan hidupnya penuh keajaiban. Dia pun tak menolak bila dijuluki sebagai *The Man So Many Miracles*. Maklum, secara ajaib dia bisa terpilih menjadi anggota DPR, bahkan terpilih pula menjadi anggota kabinet SBY-JK.

Mobil pun pernah secara ajaib datang menghampiri Taufiq. Ceritanya, pada suatu waktu, setelah pensiun, seseorang datang ke rumahnya. Tamu itu lantas mengajak Taufiq jalan-jalan ke Kelapa Gading. Sesampai di sebuah *show room* mobil, dia diminta: "Pak, ambil mobil satu".

Taufiq sejenak tercengang, sembari melontarkan ucapan: "Apakah Anda waras atau gila?" Dan dijawab: "Saya sehat, Pak. Saya diperintah Tuhan mengantarkan mobil ini kepada Bapak".

Kini, selaku pelopor Pakta Integritas tentu Taufiq tak bisa lagi menerima berbagai keajaiban, termasuk hadiah mobil keluaran Kelapa Gading tempat sebuah *showroom* mobil terbesar di Jakarta berada. Sebab, dia pasti tak ingin melanggar satu dari dua obsesinya: memberantas korupsi di kementeriaannya dan memberlakukan KTP Tunggal bagi semua warga negara Indonesia.

Dia memang mempunyai filosofi hidup "Teh Manis". Teh akan manis karena ditaburi gula. Jika tanpa gula teh itu pahit rasanya. Analog dengan itu, mungkin bisa disebut Pakta Integritas ditandatangani untuk menjadi gula dari program pemberantasan korupsi di tanah air agar rasanya tidak melulu pahit. ■ HT, AF, TI

## B • I • O • D • A • T • A

### NAMA:

Brigjen Pol. (Purn) Drs. Taufiq Effendi, MBA

### TEMPAT/TGL LAHIR:

Barabai, Kalimantan Selatan, 12 April 1941

### AGAMA:

Islam

### JABATAN:

Menteri Negara PAN RI

### PENDIDIKAN:

- Master of Business Administration (S-2) dari Institut Bisnis Manajemen Jayabaya, 1993.
- International Police Academy, Washington DC, AS

### PENGALAMAN KERJA:

- Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, 2004-2009
- Wakil Sekjen Partai Demokrat
- Staf Ahli Kapolri, pensiun berpangkat brigadir jenderal polisi
- Liaison Officer Dinas Hubungan Luar Negeri Polri, 1966
- Banyak berkecimpung di dunia intelijen Kepolisian RI, sejak Kasi Intel hingga Wakil Asisten Intel Polda Nusa Tenggara
- Pernah di bagian Reserse Narkotika Kepolisian RI
- Mengikuti Drug Enforcement di AS tahun 1977

### ALAMAT KANTOR:

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI, Jalan Jend. Sudirman Kav. 69  
Jakarta 12190

## Iran Pantang Mundur

**Iran menantang. Negeri kaya minyak ini telah bergabung dalam klub negara pembuat nuklir.**

Ujuc kekuatan dilakukan oleh pemerintah Iran di dalam parade angkatan bersenjata di Teheran (18/4), di mana Presiden Mahmoud Ahmadinejad mengeluarkan pernyataan yang menantang setiap agresor akan menyesali perbuatannya jika menyerang negeri itu. Ahmadinejad sekaligus menanggapi sejumlah laporan bahwa AS sedang mempersiapkan serangan ke Iran jika krisis nuklir tidak menemukan solusi di meja perundingan. Namun laporan itu disangkal oleh Presiden AS George W Bush, menyebutnya sebagai spekulasi liar.

Ahmadinejad mengumumkan sebelumnya bahwa Iran telah bergabung dalam klub negara pembuat nuklir setelah berhasil memperkaya uranium sampai ke tingkat untuk digunakan sebagai pembangkit

tenaga listrik. Iran menjamin program nuklirnya untuk tujuan sipil, menepis tuduhan Barat bahwa republik Islam itu berencana memiliki senjata nuklir. AS tidak mengenyampingkan opsi militer bilamana konflik nuklir itu tidak menemukan solusi diplomatik.

“Hari ini angkatan bersenjata Iran termasuk salah satu yang terkuat di dunia. Mereka akan mempertahankan wilayah perbatasan dan kedaulatan negara,” kata Ahmadinejad dalam pidato singkat menjelang parade tentara dan peralatan militer.

Para diplomat Inggris, Prancis, Jerman bersama direktur politik AS, Rusia dan Tiongkok menggelar pertemuan di Moskow untuk membahas krisis nuklir Iran, pekan lalu. Rusia dan China tetap mengupayakan jalur diplomasi meskipun AS terus menekan Dewan Ke-



amanan PBB untuk segera menindak tegas Iran.

Tidak ada keterangan lebih rinci tentang pertemuan tersebut, karena sifatnya informal dan pribadi. Namun AS semula berniat memanfaatkan pertemuan jamuan makan untuk meloloskan desakannya pada DK-PBB. Dalam pernyataan

yang disampaikan ke Kedubes Moskow di Washington, pemerintah AS memberitahukan bahwa Nicholas Burns, Wakil Menlu untuk Urusan Politik, akan membahas tindakan yang perlu diambil DK-PBB.

Departemen Luar Negeri Rusia tetap menentang segala macam bentuk sanksi terhadap

## Perang Dalam Damai

Di balik senyuman pada pertemuan puncak, China bisa saja menjadi penantang Amerika dan visi globalnya. China dan AS memiliki hubungan yang rumit tetapi hangat sejak George W. Bush terpilih sebagai presiden tahun 2000. Ketika Bush dan Presiden China Hu Jintao bertemu pekan lalu, yang lebih ditonjolkan sisi hangatnya, sambutan dengan tembakan meriam 21 kali, salaman, dan hubungan kedua negara yang harmonis. Hu menepis kecamasan Bush tentang kekuatan China. Tetapi Bush menekan Hu dalam soal nilai tukar yuan dan konflik nuklirnya dengan Iran.

Pertemuan puncak itu layaknya pertemuan dua raksasa yang saling curiga. Di jalanan, para aktivis HAM mencecar Hu dengan pelanggaran HAM di China ketika pemimpin dari negeri yang berpenduduk terbesar di dunia itu menginjakkan kaki di Washington.

Dubes di Jepang Thomas Schiefer mengingatkan kembali tentang bahaya pembangunan militer China. Dan koran *South China Morning Post* melaporkan bahwa Bush akan mendapat hadiah sebuah buku, *Seni Perang*, karya Su Tzu, dari Hu. Buku itu berisi nasihat penting, “Menang tanpa perang adalah strategi terbaik untuk semua”.

Dalam lawatan lanjutannya ke Timur Tengah yang sedang bergejolak, Hu membawa pesan perdamaian dan kerja sama untuk semua negara Arab. Dari AS, Hu terbang ke Riyadh, Arab



Saudi untuk kunjungan tiga hari. “Tidak ada perdamaian atau kemakmuran di dunia tanpa stabilitas dan pertumbuhan di Timur Tengah,” kata Hu di depan Dewan Konsultatif Arab Saudi (23/4).

Hu menambahkan untuk membangun Timteng yang harmonis, semua pihak harus dapat menyelesaikan konflik dan perbedaan lewat dialog dan cara-cara politik. Karena menurut Hu, cara itulah yang benar dan realistis. ■ *SH-Time dan berbagai sumber*



Iran. Seperti yang dikemukakan oleh Jubir Deplu Rusia Mikhail Kamynin, pihaknya tetap mengupayakan jalur diplomasi. “Kami yakin krisis nuklir Iran tidak bisa dipecahkan melalui jalur kekerasan atau sanksi,” kata Kamynin.

Masyarakat internasional disarankan agar tidak kecil hati dengan sikap ngotot Iran untuk melanjutkan program nuklirnya. “Kita semua tahu, Iran negara yang sangat sulit diajak bernegosiasi. Tetapi kita harus yakin hasil akhirnya akan positif,” kata Andrey Denisov, Dubes Rusia di PBB. ■ Reuters-SH

## Dukungan Papua Merdeka dari Ausi

Tiada maaf dari Australia. Banyak kalangan di negeri kanguru ini mendukung gerakan Papua Merdeka. Percuma saja menanti ucapan permintaan maaf dari Perdana Menteri Australia John Howard. Sikap menduanya tidak bisa digertak dengan reaksi keras dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas visa sementara yang diberikannya kepada 42 WNI keturunan Papua yang mencari suaka di Australia.



PM HOWARD

“Pemerintah saya tidak akan meminta maaf,” kata Howard kepada stasiun Radio Australia (ABC). Namun dia berjanji untuk berbicara langsung dengan Susilo.

Dalam nada yang penuh diplomasi, Howard mengatakan: “Saya mengerti masalah Papua begitu peka di Indonesia. Tetapi Australia telah mengikuti proses tertentu, karena negeri kami punya aturan sendiri”.

Howard masih bersikukuh bahwa permintaan maaf bukanlah sebuah solusi untuk memperbaiki hubungan Australia dan Indonesia. Dia mengakui

masalah tersebut pelik, tetapi bisa dilewati, butuh untuk menemukan jalan keluar. Kelompok HAM Australia mengancam cara pemerintah menyelesaikan persoalan mereka yang mencari suaka. Meskipun membantah bahwa pengetatan kebijakan terhadap para pencari suaka perahu sebagai salah satu jalan untuk meredakan ketegangan dengan Jakarta, Howard mengatakan: “Kami tidak mundur sama sekali, tetapi membuat perubahan. Jika berdampak pada perbaikan hubungan bilateral, ini hal baik.”

Pihak Imigrasi Australia memperketat kebijakan terhadap para pengungsi. Dalam aturan baru yang diumumkan pekan lalu, para imigran yang mengaku sebagai pengungsi berperahu dilarang masuk wilayah daratan Australia.

Dalam pada itu, Persekutuan Gereja Australia (Uniting Church in Australia), menurut Dubes RI di Canberra Tengku Muhammad Hamzah Thayeb, memiliki keterkaitan dengan gerakan separatis di Papua. “Dalam kampanyenya yang pro kemerdekaan Papua, mereka memanfaatkan jaringan gereja,” kata Hamzah di depan DPR belum lama ini.

Alasan mereka untuk mendukung pemberian visa kepada 42 orang Papua karena terjadinya *genocide* (pembasmian etnis) di Papua. Pihak Australia tidak menggubris informasi yang disampaikan Hamzah dan lebih percaya pada informasi Persekutuan Gereja.

Selain itu, gerakan Papua merdeka didukung oleh sejumlah LSM dan senator. Kampanye-kampanye Papua merdeka difasilitasi oleh mereka dan sejumlah senator, seperti Natasha Despoja (Partai Demokrat), Bob Brown (Green Party), Greg Sword (Partai Buruh). ■ ABC-SH

## Praharah Guncang Nepal

Ibukota Kathmandu dirundung malang. Hampir setiap hari warga turun ke jalan menuntut peletakan jabatan Raja Gyanendra.

Siraman gas air mata tidak bisa menghentikan arus massa yang memasuki distrik Kalimati, Kathmandu. Puluhan ribu pengunjung rasa memenuhi jalan-jalan di ibukota 17 hari berturut-turut. Namun di tengah gempuran protes, Raja Gyanendra bersikukuh untuk bertahan. Dia bahkan kembali memberlakukan jam malam selama 11 jam.

Polisi anti huru-hara berulang kali bentrok dengan para pengunjung rasa. Mereka menyemprotkan gas air mata dan tembakan peluru karet ke arah



demonstran. Puluhan korban luka-luka. Di tengah gemuruh demo, Minggu (23/4), seorang demonstran berteriak: “Kami akan membakar, menghancurkan dan mengambil alih kerajaan ini. Gyanendra pencuri, segera tinggalkan Nepal”.

Kekacauan yang terjadi sejak tiga pekan lalu tidak kunjung reda. Padahal Gyanendra bersedia mengalah dengan menyerahkan kekuasaan kepada aliansi tujuh partai politik yang memimpin unjuk rasa. Dia juga meminta partai-partai itu menunjuk seorang perdana menteri baru. Mereka tetap meminta amandemen undang-undang dasar untuk mengendalikn kekuasaan Gyanendra. ■ AFP-Kompas-SH

# URGENSI RUU PERPAJAKAN

M. Aziz Syamsuddin, SH., MH.”

Sampai saat ini, kontribusi terbesar pada APBN dari tahun ke tahun berasal dari sektor pajak. Begitu besarnya peranan sektor pajak sampai-sampai pemerintah mencanangkan pada tahun anggaran 2007, kas APBN bisa ditopang sepenuhnya dari sektor penerimaan pajak.

Penguatan infrastruktur dunia perpajakan kini tengah dilakukan Pemerintah dan DPR dengan mereformasi substansi peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.

Sebagai catatan, dewasa ini DPR sedang membahas tiga rancangan undang-undang (RUU) Perpajakan, sebagai revisi atas tiga undang-undang (UU) Perpajakan yang berlaku selama ini.

*Kesatu*, RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang akan mengubah UU No. 16 tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 6 tahun 1983.

*Kedua*, RUU tentang Pajak Penghasilan (RUU PPh) yang akan mengubah UU No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1983.

*Ketiga*, RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) serta RUU Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang akan mengubah UU No. 18 tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 8 tahun 1983.

Ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi dari RUU Perpajakan yang kini memasuki tahap masukan dari kelompok masyarakat, LSM, dan para pakar.

Diharapkan, UU Perpajakan yang baru kelak akan menciptakan satu sistem perpajakan yang sederhana, efisien, dan efektif sehingga memberikan kemudahan kepada wajib pajak memperoleh informasi pajak, mengisi formulir pajak, dan membayar kewajiban pajaknya.

Pengisian formulir pajak bagaimanapun harus sederhana, efisien alias tidak berbelit-belit agar wajib pajak tidak akan merasa terbebani membayar kewajiban pajaknya, dan efektif dalam pengertian tercapai target penerimaan negara dari sektor pajak.

Jangan sampai data-data yang sebelumnya sudah diserahkan wajib pajak ke institusi pajak menjadi *spread up* (beredar ke luar). Sebab, data-data itu menyangkut kerahasiaan perusahaan.

Pengalaman selama ini, munculkses yakni beredarnya data-data perusahaan ke luar dan itu potensial memotivasi perusahaan-perusahaan yang menjadi lawannya untuk masuk ke wilayah itu.

Perlu adanya satu perhatian khusus menyangkut bagaimana meng-*cut off* masalah-masalah pajak yang terjadi di masa sebelumnya agar tidak berlarut-larut.

Penulis melihat proses pembangunan dan pembaruan hukum di negeri ini belum mengarah pada terbentuknya satu sistem penegakan hukum yang terpadu (*integrated legal system*).

Salah satu contoh yang penulis kritisi, walaupun ada institusi Polri sebagai pihak paling berwenang menyidik,



ada lagi penyidik di sejumlah instansi pemerintah yang disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Ada PPNS di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai, PPNS Ditjen Pajak, PPNS Badan POM, dan PPNS Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Menurut hemat penulis, tugas penyidikan atas kasus-kasus pidana yang terjadi di instansi-instansi tersebut jangan lagi diserahkan kepada PPNS sebab potensial sekali mengarah pada konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Khusus mengenai keberadaan PPNS Pajak, dalam beberapa kesempatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang digelar oleh Pansus DPR yang membahas RUU Perpajakan, penulis mengutarakan gagasan agar wewenang PPNS Pajak sebaiknya dialihkan kepada pihak kepolisian.

Konkretnya, terhadap kasus-kasus perpajakan baik itu yang dilakukan wajib pajak maupun petugas pajak sendiri, proses penyidikannya sepatutnya ditangani langsung oleh pihak kepolisian, bukan oleh PPNS Pajak, guna menghilangkan wilayah abu-abu dan mencegah konflik kepentingan.

Pertimbangan penulis, institusi Polri punya bagian khusus yang menangani kejahatan ekonomi, termasuk di dalamnya kasus-kasus perpajakan.

Di satu sisi, aparat institusi pajak bertugas sebagai pemeriksa dan pemungut pajak. Tapi, di lain sisi, aparat institusi pajak juga berperan sebagai petugas PPNS. Ada konflik kepentingan di situ.

Keberadaan PPNS Pajak justru bisa dijadikan ‘senjata’ oleh oknum petugas (pemungut) pajak untuk memaksa wajib pajak agar mau berkolusi atau, berbuat lebih ekstrim lagi, dengan sengaja dan dengan segala cara merugikan wajib pajak.

Misalnya, petugas pemeriksa dan pemungut pajak bisa saja mengancam wajib pajak: “Kalau tidak mau saya ‘urus’, Anda akan saya laporkan kepada petugas PPNS Pajak!”

Dengan tidak adanya aparat pajak yang berperan sebagai petugas PPNS, akan tercipta satu transparansi dalam proses pemeriksaan dan pemungutan pajak dari wajib pajak. Sebab, tidak ada peluang penyalahgunaan wewenang.

Kita berharap, dengan UU Perpajakan (1) tercipta iklim yang kondusif bagi perkembangan dunia usaha di tanah air, (2) meningkatnya penerimaan APBN dari sektor pajak, dan (3) diterapkannya asas keadilan yang setara bagi setiap pihak berkepentingan.

Tak kalah pentingnya pula, masyarakat luas dan kalangan dunia usaha sebagai wajib pajak tetap bisa mengawasi kinerja institusi pajak di Indonesia, dan melaporkannya melalui Desk Pajak pada Komisi Ombudsman, Kotak Pos Pengaduan bagi wajib pajak, dan Komite Kode Etik Nasional.

\*M. Aziz Syamsuddin: Anggota Panitia Khusus RUU Perpajakan DPR-RI dan Anggota Komisi III (Hukum) dari Fraksi Partai Golkar DPR-RI. ■

◆ RAMA PRATAMA, SE.AK.

# Politikus dengan Spirit Aktivis

**Dia seorang legislator reformis yang ingin konsisten mengelola amanah, menciptakan perubahan, dan melayani kepentingan masyarakat.**

Usianya belum genap 32 tahun. Masih muda memang. Semuda 'jam terbangnya' sebagai wakil rakyat. Pada Pemilu 2004, Rama Pratama terpilih menjadi anggota DPR-RI periode 2004-2009 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Saat itu, dia ditetapkan sebagai calon legislatif (Caleg) PKS mewakili Daerah Pemilihan DKI Jakarta I (Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, dan beberapa WNI di negeri jiran).

Alumnus jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UI ini menanggapi penunjukan dirinya sebagai Caleg oleh PKS sebagai sebuah penugasan yang merupakan wujud pembelajaran politik bagi dirinya dan untuk masyarakat, sekaligus tantangan untuk membuktikan konsistensi perjuangannya.

Tentu ada alasan tersendiri mengapa PKS mengusung Rama sebagai Caleg. Untuk dicatat, di awal gerakan reformasi (1998) bergulir, Rama Pratama termasuk tokoh mahasiswa yang populer.

Lebih-lebih ketika berlangsung gelombang demonstrasi mahasiswa sejabotabek yang merangsek ke gedung DPR/MPR sebagai simbol penentangan kepada kekuasaan pemerintahan Orde Baru.

Selaku Ketua Umum Senat Mahasiswa Universitas Indonesia (SM UI), Rama memimpin dan membawa ribuan mahasiswa UI ke luar kampus untuk berdemonstrasi. Padahal, saat itu, ada larangan mahasiswa unjuk rasa ke luar areal kampus.

Singkatnya, Rama Pratama adalah salah seorang aktivis mahasiswa 1998 yang bersama mahasiswa dari perguruan tinggi lain mengusung tema reformasi pada kehidupan bangsa dan negara ini. Waktu itu, dia juga menyerahkan sebuah draft kepada MPR agar segera digelar sidang istimewa.

Apakah spirit perubahan masih menyala di dalam jiwa dan benak Rama Pratama setelah menjadi wakil rakyat? Mantan Anggota Tim 11 Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu menggarisbawahi, kapasitas sebagai

anggota DPR tidak pernah sama sekali dia persiapkan sebagai 'hadiah' atau, apalagi, 'hasil' perjuangannya dulu dalam aktivisme kemahasiswaan.

"Peranan saya sekarang sebagai wakil rakyat semata-mata merupakan wujud pertanggungjawaban moral, publik, dan politik. Sebab, gagasan perubahan yang saya dan rekan-rekan aktivis '98 dulu pernah usung dan perjuangkan ternyata sampai hari ini belum terwujud sama sekali," kata Rama Pratama mengungkapkan klarifikasi kepada **Anis Fuadi** dari *Berita Indonesia*, belum lama ini.

"Jadi, semacam beban moril atas sebuah perjuangan yang belum dituntaskan. Di forum parlemen ini konsistensi per-



RAMA PRATAMA, SE.AK.

juangan kami diuji. Untuk itu, saya selalu berdoa agar saya dan rekan-rekan seperjuangan lainnya senantiasa dikaruniai Allah SWT keyakinan, keikhlasan, serta semangat untuk terus *istiqamah* dalam beramal shaleh...Kapanpun dan di manapun!"

Selama satu tahun lebih bertugas di Senayan sebagai anggota Fraksi PKS, daya kritis Rama Pratama semakin terasah. Seharian, mantan auditor di KAP Ernst & Young (1999-2001) itu berkecimpung di Komisi XI DPR.

Selain di komisi yang mengurus soal Keuangan Negara, Perencanaan Pembangunan, dan Perbankan itu, Rama juga bertugas di Panitia Anggaran DPR.

Pandangan politiknya yang idealis, kritis

dan reformis tentang berbagai persoalan anggaran, keuangan, perbankan, dan ekonomi nasional secara umum kerap mewarnai dinamika politik yang berlangsung di gedung DPR.

Tak pelak, pernyataan-pernyataan dari politikus muda yang berpandangan hidup "Melakukan Semua Aktivitas Diikuti Nilai Kebaikan dan Amal Shaleh" ini mendapat apresiasi dari anggota-anggota Dewan lain, termasuk dari media massa.

Satu persoalan yang disoroti Rama adalah masalah manajemen utang. Menurutnya, Indonesia harus mengubah manajemen utang (luar negeri)-nya agar keluar dari perangkap utang (*debt trap*) yang sudah seperti lingkaran setan.

Pemerintah belum bisa dikatakan serius memerhatikan hak-hak rakyat apabila beban pembayaran cicilan pokok utang masih mencapai 50 persen dari APBN. Indonesia masih disibukkan membayar beban pokok utang dengan cara berutang lagi.

"Utang yang dibuat pemerintah masa lalu yang sebagian besar tidak sampai kepada kepentingan rakyat justru harus dibayar oleh rakyat. Rakyat dipaksa menanggung beban yang bukan menjadi tanggung jawabnya," cetus Rama Pratama mengingatkan. ■ **RF**

## BIODATA

Nama : RAMA PRATAMA, SE. Ak.  
Lahir : Jakarta, 17 November 1974  
Pendidikan : Sarjana Ekonomi Akuntansi FE-UI  
Pekerjaan : Anggota DPR RI/Komisi XI/  
Panitia Anggaran  
Status : Menikah (2000)  
Nama Istri : Alin Halimatussadiyah, SE, ME.  
Pendidikan : Pascasarjana Ilmu Ekonomi FE-UI  
Pekerjaan : Staf Pengajar FE-UI  
Nama Anak : 1. Muhammad Alauddin Zufar (5 tahun)  
2. Muhammad Rahman Fadhil (2 tahun)

## PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Forum Studi Islam, FEUI (Periode 1996-1997)
2. Ketua Senat Mahasiswa UI (Periode 1997-1998)
3. Wakil Ketua ILUNI FEUI (Periode 2003-2006)

## PENGALAMAN KERJA

1. Senior Auditor di Kantor Akuntan Publik Ernst & Young, Jakarta (1999-2001)
2. Partner di MBS Consulting, Jakarta (2001-2004)
3. Anggota Tim 11 (Panitia Pembentukan Komisi Pemilihan Umum) yang dipimpin (Alm.) Prof. DR. Nurchlisch Madjid.

## AKTIVITAS SAAT INI

1. Anggota DPR-RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Periode 2004-2009).
2. Ketua Umum GEMA KEADILAN, Organisasi Pemuda *underbow* PKS (Periode 2005-2010)
3. Ketua DPP KNPI (periode 2005-2008).
4. Wakil Sekjen IIFSO (*International Islamic Federation of Student Organizations*) yang bermarkas di Belgia (Periode 2006-2009)

# “Mbah Buyut” Siap “Hajatan”

**“Mbah Buyut” (Gunung Merapi) siap-siap “hajatan” (meletus). Sejak 12 April lalu statusnya ditingkatkan dari Waspada menjadi Siaga. Namun masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa.**

**D**ari kerucutnya, asap putih keabu-abuan kerap muncul ke udara. Asap solfatara ini mencapai ketinggian sekitar 400 meter. Kandungan SO<sub>2</sub> yang terpantau mencapai 170 ton per hari. Jumlah tersebut sedikit menurun dari pantauan sebelumnya yang mencapai 179 ton per hari.

Sampai tanggal 20 April lalu, sebagaimana diberitakan *Kompas* (21/4), deformasi atau pembengkakan tubuh gunung Merapi terus berlangsung dengan kecepatan yang berbeda.

Deformasi ke arah selatan yang terpantau di Pos Kaliurang mencapai 14,64 cm, pengembangan ke arah tenggara yang terpantau dari pergerakan reflektor di Deles, Klaten mencapai 6 cm. Sedangkan pemantauan dari reflektor Babadan di barat mencapai 3,5 cm.

Tanggal 20 April, gunung Merapi yang

mempunyai ketiggian 2.968 m dari permukaan laut dan terletak di kawasan Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Kabupaten Magelang, Bojolali serta Klaten (Jawa Tengah) terjadi dua kali gempa. Yakni pukul 06.00 dan 13.00.

Kepala Seksi Gunung Merapi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi (BPPTK) Subandrio menyatakan, gempa vulkanik yang mungkin dirasakan masyarakat itu belum bisa dijadikan indikator akan meletusnya Merapi. Menurutnya, gempa berkekuatan 2,2 skala Richter yang disertai bunyi gemuruh itu merupakan dampak aktivitas naiknya magma ke permukaan. Guguran material gunung itu masih terus terjadi di puncak dan sekeliling kubah lava. Guguran batu dalam jumlah besar menimbulkan suara yang menggemuruh.

Kendati status Merapi sudah dinyata-

kan Siaga, namun sebagian warga masyarakat di sekitar lereng Merapi masih melakukan aktivitas seperti biasa. Mereka membenarkan ada tanda-tanda alam yang mereka yakini menunjukkan aktivitas gunung Merapi, tetapi warga percaya letusan belum akan terjadi dalam waktu dekat ini.

Mujiono (32 tahun) warga Batur Ngisor yang merupakan dusun tertinggi di Desa Ngargomulyo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang dan berbatasan langsung dengan Merapi mengaku melihat banyak kijang mulai turun dari gunung. “Kijang memang sudah banyak yang turun dan berkeliaran di lahan sawah kami,” ujarnya.

Hal tersebut, menurut Mujiono, menunjukkan suhu di badan gunung mulai meningkat. Namun dia meragukan Merapi akan meletus dalam waktu dekat mengingat suhu di desanya masih tetap sejuk. “Kami tetap waspada meski sepertinya tidak ada perubahan cuaca di sini,” tambahnya.

Sundani (50 th) penambang pasir manual di Kali Blongkeng, Kecamatan Srum-



Gunung Merapi mulai serius keluarkan asap tebal

## STATUS BEBERAPA GUNUNG API DI INDONESIA

### STATUS SIAGA :

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Gunung Merapi      | (perbatasan DIY- Jateng) |
| 2. Gunung Karangetang | ( Sulawesi Utara)        |

### STATUS WASPADA :

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Gunung Merapi        | (Sumatera Barat)          |
| 2. Gunung Talang        | (Sumatera Barat)          |
| 3. Gunung Kerinci       | (Jambi)                   |
| 4. Gunung Anak Krakatau | (Lampung)                 |
| 5. Gunung Papandayan    | (Jawa Barat)              |
| 6. Gunung Dieng         | (Jawa Tengah)             |
| 7. Gunung Semeru        | (Jawa Timur)              |
| 8. Gunung Lokon         | (Sulawesi Utara)          |
| 9. Gunung Dukono        | (Sulawesi Utara)          |
| 10. Gunung Soputan      | (Sulawesi Utara)          |
| 11. Gunung Egon         | (Flores, NTT)             |
| 12. Gunung Ibu          | (Halmahera, Maluku Utara) |

bung, memiliki firasat Merapi akan meletus. Dia mengaku beberapa kali mendengar runtuhnya di Gunung Merapi. "Biasanya kalau sering kali terjadi runtuh atau guguran di gunung, itu menandakan Merapi sedang aktif," ujarnya sambil tetap mengumpulkan pasir.

### Lama tidak hajat

Lain halnya dengan warga Dukuh Stabelan dan Belang Desa Tlogolele, Kecamatan Selo, Kabupaten Bojolali, Jawa Tengah. Hari Kamis (20/4) lalu mereka menggelar upacara selamatan.

"Sudah lama Mbah Buyut (sebutan warga setempat terhadap Gunung Merapi) tidak 'hajat' (meletus) dan kami percaya kalau hal itu akan segera terjadi. Apalagi petugas dari BPPTK juga mengatakan bahwa aktivitas Merapi terus meningkat," ujar Kiman (45 th ) salah seorang warga Stabelan.

Kendati demikian, sampai hari itu Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yousana Siagian di Bandung menyatakan Merapi belum perlu ditingkatkan statusnya dari Siaga menjadi Awas.

Sedangkan untuk mengantisipasi bencana, wisatawan dan penduduk dilarang mendaki ke puncak gunung. Demikian pula warga masyarakat yang biasa beraktivitas di badan sungai yang berhulu di gunung Merapi seperti kali Woro, Gendol, Boyong dan Krasak diminta menghentikan kegiatannya.

Bahaya yang ditimbulkan dari letusan gunung Merapi ini bukan saja berupa material lahar panas tetapi juga awan panas yang oleh warga setempat disebut '*wedhus gembel*'.

Kalau lava panas bisa mencapai jarak 5

Km dalam waktu 10 menit, maka luncuran awan panas ini bisa lebih cepat lagi. Bisa mencapai kecepatan 120 Km per jam. Letusan gunung Merapi pada tahun 1994 lalu tercatat lebih dari 60 orang tewas akibat tersambar *wedhus gembel* yang bersuhu hingga 4.000 derajat Celcius tersebut.

Mengantisipasi letusan gunung Merapi, pihak Pemda Kabupaten maupun Provinsi dan bahkan Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai langkah. Ratusan kendaraan truk dan bus disiapkan masing-masing Pemda untuk mengangkut para pengungsi. Tenda dan dapur umum juga mulai disiapkan di beberapa lokasi pengungsian.

Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X memperkirakan Merapi akan meletus 10 - 14 hari mendatang. (*Bisnis Indonesia*, 19/4). Untuk itu dia minta Pemda Kab Sleman segera mengungsikan penduduk yang tinggal di kawasan terdekat dengan Merapi. Sultan minta penduduk di 10 dusun di kawasan rawan bencana segera diungsikan karena rawan terkena material vulkanik letusan.

Meski masih dalam tahap siaga, pemerintah agaknya tidak mau kecolongan. Departemen Sosial misalnya, seperti diberitakan *Indo Pos* (19/4), telah mengalokasikan dana Rp 400 miliar untuk persiapan evakuasi akibat letusan Merapi. Selain itu, untuk kebutuhan pokok pengungsi, Depsos juga mengirimkan masing-masing 100 ton beras ke semua kabupaten di sekitar Merapi. Selain itu dikirim pula minyak bakar, air bersih dan peralatan darurat seperti senter, megaphone, genset dan tenda serta alat-alat dapur umum untuk pengungsi. Mensos Bachtiar Chamsyah bahkan meninjau langsung persiapan itu.

Sementara Menteri Kesehatan Siti

Fadilah Supari menyiapkan tim medis dari Jakarta untuk membantu tenaga medis di daerah-daerah rawan terimbas letusan Merapi. "Kita sudah siapkan semua, sampai kantong mayat segala sudah kita kirim ke Merapi,"ujarnya. Pihaknya juga akan mengerahkan 30 dokter ke daerah sekitar Merapi, 15 dokter dari Solo dan 15 dokter lagi dari Yogya.

### Gunung api aktif

Kepala Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunung Api PVMBG Atje Purbanata menyebutkan dari 129 gunung api aktif yang ada di Indonesia sebanyak 14 gunung statusnya di atas aktif normal. (lihat boks). Diantaranya adalah Gunung Semeru di Jawa Timur. Gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian 3.676 meter ini pada 14 April lalu mengeluarkan letusan yang abunya sampai ke kota Malang. Hujan abu ini cukup mengganggu aktivitas pengguna jalan (pengendara sepeda motor dan pejalan kaki) dan menyebabkan iritasi mata dan batuk-batuk.

Gunung Merapi yang terletak di kawasan perbatasan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah ini merupakan salah satu dari dua gunung api yang berstatus Siaga. Satunya lagi adalah Gunung Karangetang di Pulau Siau, Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara.

Di Indonesia saat ini tercatat ada 129 gunung api aktif yang tersebar mulai dari Pulau Sumatera, Selat Sunda, Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara hingga Maluku. Jumlah ini mencapai sekitar 13 persen dari jumlah gunung api yang ada di dunia. Kondisi ini sekaligus menasibkan Indonesia sebagai negara yang memiliki gunung api terbanyak di muka bumi.

Banyaknya gunung api di bumi Nusantara ini disebabkan karena posisi Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik raksasa yakni Lempeng Euro - Asia, Lempeng Pasifik dan Lempeng Indo - Australia. Area sepanjang garis pertemuan itu dikenal dengan sebutan busur Cincin Api Pasifik (*Pacific Ring of Fire*).

Dan karena berada pada *Ring of Fire*, maka tak heran jika Indonesia tercatat sebagai negara yang paling banyak mengalami letusan gunung berapi yang kerap meminta korban jiwa. Letusan Gunung Tambora di NTB misalnya pada tahun 1815 menelan korban 100.000 jiwa, Gunung Kelud pada 1919 meminta 5.000 jiwa sementara tragedi gunung Krakatau pada 1883 meminta korban 36.000 jiwa. ■ SP

## Sosialisasi Perpres 78

# Bahas Rencana Aksi Pengelolaan Pulau

**Menindaklanjuti keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 tanggal 29 Desember 2006 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) mengadakan seminar, sosialisasi, dilanjutkan rapat kerja pertama berlangsung di Jakarta 19 April 2006 lalu.**

**S**eminar dihadiri oleh sejumlah gubernur dan bupati serta pejabat terkait. Dibuka oleh Menko Polhukam Widodo AS, selaku Ketua Tim Koordinasi PPKT, hadir memberikan arahan Wakil Ketua I Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Wakil Ketua II Menteri Dalam Negeri Moh. Ma'ruf, serta Panglima TNI diwakili Asisten Operasi Mayjen TNI Syamsul Maarif.

Sementara, Ketua Tim Kerja I Widi A. Pratikto, Dirjen KP3K, DKP, dan Ketua Tim Kerja II Sodjuangon Situmorang, Dirjen Pemerintahan Umum, Depdagri, secara khusus tampil memaparkan rencana induk dan rencana aksi pengelolaan PPKT.

Menko Polhukam Widodo AS mengatakan, pengelolaan PPKT sangat penting karena pulau ini berada pada wilayah paling luar dengan perbatasan laut. PPKT juga memiliki nilai strategis sebagai titik dasar koordinat geografis untuk referensi penarikan garis pangkal kepulauan.

Widodo menyebut lima bidang yang akan ditangani Tim Koordinasi dalam mengelola PPKT. Yakni, *pertama* bidang sumber daya alam dan lingkungan, *kedua* infrastruktur dan perhubungan, *ketiga* ekonomi, sosial dan budaya, *keempat*

pembinaan wilayah, dan *kelima* pertahanan dan keamanan.

"Kita berharap apa yang akan dilakukan ini akan lebih mampu menghimpun pemikiran, sekaligus membulatkan rencana aksi yang nantinya merupakan referensi pengelolaan pulau-pulau kecil terluar," ujar Widodo.

### Berubah ke *Outward Looking*

Menteri Dalam Negeri Moh. Ma'ruf dalam arahannya lebih banyak menyoroti pentingnya asas kepastian hukum (*rechts-sicherheit*) dalam penyelenggaraan negara di era otonomi daerah saat ini. Menteri Ma'ruf, pamong yang selama memerintah selalu taat asas dan mendasarkan diri pada aturan serta ketentuan hukum, ini mengakui asas kepastian hukum belum dapat dilaksanakan secara optimal karena masih ditemukan beberapa kekurangan aturan hukum.

Kata Ma'ruf, penerbitan Perpres 78/2006 telah membuka cakrawala baru distribusi kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, yang selama ini dilaksanakan masih secara parsial oleh masing-masing instansi terkait.

Demikian pula arah kebijakan pembangunan kewilayahan, masih cenderung berorientasi *inward looking* seolah-olah pulau-pulau kecil terluar hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan negara.

Perubahan mulai semakin terasa sejak dikeluarkannya Perpres 7/2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Di situ, disebutkan arah dan pengembangan kebijakan pembangunan wilayah perbatasan antar negara akan cenderung berorientasi *outward looking*.

Ketika RPJMN diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006 perubahan itu semakin nyata. RKP menempatkan pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal sebagai prioritas pertama dalam mengurangi disparitas pembangunan antar daerah.

Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi menyebutkan, berdasarkan PP No. 38/2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia ditetapkan 92 pulau-pulau kecil yang mempunyai titik-titik garis pangkal. Ke-92 pulau itu tersebar di 20 provinsi dan 38 kabupaten, 50% diantaranya berpenghuni, luasnya berkisar 0,02-200 Km persegi.

Pengelolaan PPKT menurut Freddy harus didasarkan pada pendekatan kedaulatan dan ekonomi, serta tiga prinsip dasar yaitu wawasan nusantara, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat.

Menurutnya, rumusan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan PPKT harus memenuhi kriteria pembangunan berkelanjutan. Yakni, secara ekonomi efisien dan optimal (*economically sound*), secara sosial-budaya berkeadilan dan dapat diterima (*socio-culturally accepted and just*), dan secara ekologis tidak melampaui daya dukung lingkungan (*environmentally friendly*).

"Kebijakan tersebut juga harus berorientasi kepada kepentingan umum, bukan kepentingan perorangan atau golongan, apalagi untuk kepentingan pejabat birokrasi," tegas Freddy.

Widi A. Pratikto, Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K), memaparkan secara detil kebijakan dan strategi pemberdayaan pulau-pulau kecil terluar. Dia juga mengangkat program dan kegiatan pemberdayaan pulau-pulau kecil terluar, serta bagaimana rencana aksi, kelembagaan, dan pembiayaan.

Berdasarkan rekapitulasi rencana aksi pengembangan pulau-pulau kecil terluar, pada tahun anggaran 2007 direncanakan kebutuhan biaya pengelolaan PPKT paling tidak sebesar Rp 936,322 miliar. ■ HT,WE



Menko Polhukam Widodo AS dan mendagri Moh. Ma'ruf

# Tim Kanguru Kejodohan Jerman

Untuk kedua kalinya kesebelasan Australia berlaga di pentas piala dunia. Selama 32 tahun menanti akhirnya Socceroos berlaga kembali di tempat yang sama. Australia rupanya kejodohan Jerman.

**S**alah satu kontestan piala dunia di Jerman pada tahun 1974 adalah tim negeri Kanguru (Australia). Sejarah mencatat setelah itu tim Australia tidak pernah lagi mengenyam ketatnya persaingan di ajang putaran final Piala Dunia hingga Jerman kembali menjadi tuan rumah 2006 ini. Nasib memang berpihak kepada negeri John Howard itu. Di babak penyisihan, tim ini hampir kandas. Untungnya ada babak *play off* dan lawan yang dihadapi adalah Uruguay.

Pada laga pertama yang berlangsung di Montevideo, tuan rumah Uruguay unggul 1-0. Pasukan Guus Hiddink pelatih bertangan dingin asal Belanda itu mampu membuat skor yang sama dengan 1-0 di Stadion Telstra, Sydney Australia. Untuk menentukan siapa yang berhak melaju ke Jerman pertandingan harus ditentukan dengan adu penalti. Dengan dukungan supporter kesayangannya, Australia pun berhasil keluar sebagai pemenang dan melangkah menuju Jerman.

Selama 32 tahun penantian tersebut nasib buruk memang selalu hinggap ke tim negeri kanguru tersebut. *Socceroos* julukan tim Australia berulang kali gagal

menembus babak final Piala Dunia. Kesesakan yang paling sering dialami adalah gagal saat tinggal selangkah lagi. Baik itu ketika masuk dalam group Amerika Selatan, Eropa maupun Asia. Nasib baik rupanya berpihak ketika mereka masuk dalam group Oseania dan buktinya mereka berhasil melaju ke putaran final di Jerman untuk kedua kalinya.

Tim ini juga mempunyai sederetan pemain yang ikut meramaikan kompetisi di Benua Eropa. Di sana ada kiper Mark Schwarzer, kapten Mark Viduka, Herry Kewell, dan sederet nama lainnya. Di sektor belakang mereka diperkuat Tony Vidmar dan Tony Popovic.

Persaingan di final Piala Dunia bukanlah hal yang ringan. Tim ini dinilai punya kelemahan di lini belakang. Keberadaan dua Tony begitu riskan karena mereka bakal kehabisan tenaga di arena yang super ketat tersebut. Tampaknya kelemahan tersebut menjadi pekerjaan rumah yang paling berat dihadapi oleh pelatih asal Belanda tersebut. Namun di Piala Dunia, Australia pun harus berkerja keras. Dalam Group F mereka berada satu group dengan juara bertahan Brazil yang juga favorit juara, Kroasia dan Jepang.

## Sosok di Balik Tim

Keberhasilan *Socceroos* memang tidak dilaluinya dengan mudah. Dalam sebuah tim, keberadaan seorang pelatih sangat berarti akan keberhasiannya. Tak heran bila publik Kanguru menilai kehadiran pelatih kawakan asal Belanda Guus Hiddink yang memoles tim setelah paroh perjalanan merupakan catatan tersendiri. Guus Hiddink tidak sekadar mengangkat tim itu, melainkan juga mencoba menerapkan sebuah konsep permainan menyerang yang identik dengan kebiasaan pelatih asal Belanda yang menganut *Total Football*.

Awalnya keputusan untuk mengambil Hiddink di tengah perjalanan menanggung resiko. Namun, melihat catatan prestasi yang ditorehkan Hiddink selama ini membuat induk organisasi sepak bola Australia (FFA) kepincut terhadap Hiddink. Dalam catatan kepelatihannya Hiddink pernah membawa dua Timnas ke semifinal Piala Dunia, Belanda pada tahun 1998 dan Korea Selatan empat tahun lalu. Itulah alasan terkuat mengapa Australia tertarik terhadap Hiddink.

Rapor pelatihan kelahiran 8 November 1946 itu semakin cemerlang dengan naiknya prestasi PSV Eindhoven di Liga Belanda. Padahal pada saat yang bersamaan kedua tim sama-sama ditukangkannya. Mampukah Hiddink mengulang sukses ketika membawa Korea Selatan dan Eindhoven? Sebuah pertarungan mahal Hiddink di Jerman mendatang. ■ SB



Tim Nasional Kesebelasan Australia

## SKUAD TIM

**Pelatih :** Guus Hiddink

**Kiper:**  
Mark Schwarzer  
Zeljko Kalac

**Gelandang:**  
Scott Chipperfield  
Stan Iazaridis  
Vincenzo Grella  
Tim Cahill  
Brett Emerton  
Josip Skoko  
Jason Culina  
Marco Bresciano  
Ahmad Elrich  
Harry Kewell

**Penyerang:**  
Mark Viduka  
John Aloisi  
Archie Thompson  
Joel Griffiths

**Bek:**  
Lucas Neill  
Tony Vidmar  
Ljubo Milicevic  
Tony Popovic  
Luke Wilkshire

# Kehandalan Si 'Baret Merah'

**Sebagai satuan elit dengan sasaran operasi strategis dan terpilih, prajurit Kopassus siap menjawab tantangan. Semboyan lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas, terus tertanam dalam jiwanya.**

**S**atu persatu, tujuh belas balon yang berjejer di bawah baliho di depan para tamu dan undangan pada upacara Hari Ulang Tahun ke-54 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pecah. Rentetan timah panas yang dimuntahkan oleh tim penembak runduk Kopassus tak ada satu pun yang meleset. Para undangan dan hadirin pun berdecak kagum dan memberi aplaus dengan bertepuk tangan menyaksikan kemahiran prajurit-prajurit Kopassus memperagakan kemampuannya.

HUT Kopassus kali ini terbilang meriah, lebih dari seribu anggota Kopassus dan undangan hadir dalam upacara di Mako Kopassus Cijantung, Jakarta. Diantaranya mantan Wapres Jenderal TNI Try Sutrisno, para mantan Danjen Kopassus seperti Jenderal TNI (Purn) Wismoyo Arismunandar, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, Jenderal TNI (Purn) Subagio HS

dan sesepuh Kopassus lainnya seperti Jenderal TNI (Purn) Feisal Tanjung dan Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan. Juga hadir sejumlah Atase Pertahanan negara sahabat.

Kopassus memang dikenal sebagai satuan elit yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Korps baret merah ini merupakan kesatuan yang mempunyai tugas melakukan operasi khusus terhadap sasaran operasional yang strategis dan terpilih, baik lewat darat, laut, maupun udara. Tak heran bila dengan kekhususannya itu di dalam tubuh Kopassus juga terdapat satuan-satuan elit yang punya kemampuan di atas rata-rata satuan lainnya. Di sana ada satuan 81 atau sering disebut Sat-81 antiteror yang selalu siap setiap saat.

Prajurit Kopassus merupakan prajurit-prajurit pilihan yang datang dari seluruh Kodam yang ada di seluruh Indonesia. Kesatuan dengan pakaian khas loreng

“darah mengalir” tersebut begitu gagah dengan semangat yang menyala. Sebuah kebanggaan tersendiri bagi prajurit bila mereka masuk di dalam kesatuan elit ini.

Selain kemahirannya dalam menggunakan persenjataan dan peralatan organik, prajurit Kopassus juga dibekali dengan keahlian beladiri seperti karate, wushu, taekwondo dan pencak silat. Lewat tendangan, pukulan bahkan dengan kekuatan kepalanya, mereka mampu memecahkan tumpukan genteng dan mematahkan balok es batu, besi maupun beton. Semua atraksi itu mereka tampilkannya dengan sempurna.

Tak ketinggalan 49 orang penerjun handal Kopassus ikut memeriahkan acara. Mereka melakukan terjun bebas dan mendarat di titik pusat di lapangan upacara. Pasukan ini dipersiapkan untuk melakukan penyusupan dari udara terhadap posisi-posisi strategis dan melakukan penyerangan dan penyergapan secepat kilat.

Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto, yang hadir pada acara ramah tamah se usai upacara dalam amanat singkatnya mengatakan, keberadaan Kopassus sejak lahir hingga berusia 54 tahun ini sarat dengan prestasi. Panglima TNI juga menekankan agar seluruh korps baret merah ini terus meningkatkan kemampuannya dan tetap menjunjung tinggi jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara profesional, di tengah persaingan global saat ini.

Sebelumnya, selaku Inspektur Upacara, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Djoko Santoso dalam amanatnya, tak henti-hentinya memompa semangat juang para prajurit dengan menekankan berlatih, berlatih dan berlatih untuk mewujudkan profesional para prajurit Kopassus. Jenderal Djoko Santoso juga mengaku bangga dengan hasil yang telah dicapai oleh korps baret merah selama ini.

Upaya dan kerja keras pimpinan dan prajurit Kopassus saat ini sudah mulai tampak. Djoko melihat sudah banyak pasukan-pasukan khusus negara lain yang mengajak Kopassus untuk melakukan latihan bersama dan operasi bersama. Hal itu sejalan dengan visi dan misi yang dikedepankan oleh Komandan Jenderal Kopassus Mayjen TNI Syaiful Rizal psc, S.IP, dalam sambutan singkatnya pada acara ramah tamah.

Dalam sebuah wawancara khusus dengan wartawan majalah *Berita Indonesia*, Mayjen TNI Syaiful Rizal menyatakan, tekadnya untuk membawa kesatuannya setara dengan pasukan khusus negara lain di dunia. Dirgahayu Kopassus ! ■ **SB, SP**



Riang, prajurit Kopassus

# Aksi Penyelundup Pojokan TNI

**Rekanan pemasok peralatan TNI Angkatan Udara tertangkap di Amerika Serikat. Panglima TNI mengaku tak punya rencana belanja senjata baru. Ada apa di balik aksi ilegal Hadianto Cs?**

**P**anglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto, tersenyum ceria tatkala memberikan ucapan selamat HUT ke-54 Kopassus kepada Danjen Kopassus Mayjen TNI Syaiful Rizal, psc. S.IP. Senin (17/4) lalu. Di depannya tampak pula Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Djoko Santoso yang ikut menjemputnya memasuki ruang pertemuan di Gedung Komando Kopassus, Cijantung Jakarta Timur.

Acara syukuran dan ramah tamah dalam rangka memperingati hari jadi korps 'Baret Merah' tersebut berlangsung tertutup bagi para wartawan. Meski begitu, di bawah terik matahari siang itu puluhan kuli disket tetap setia menunggu Panglima sampai acara selesai. Pasalnya, ada sebuah isu penting yang perlu dikonfirmasi kepada orang nomor satu di Cilangkap tersebut. Yakni soal tertangkapnya rekanan TNI oleh FBI di Amerika Serikat. Karenanya, begitu Panglima TNI - yang juga berasal dari Matra Udara - itu keluar dari gedung, langsung diserbu dan dihujani berbagai pertanyaan oleh wartawan.

Keesokan harinya, berita tersebut menghiasi sejumlah media cetak maupun elektronik. Bahkan surat kabar *Media Indonesia* mengangkat masalah itu dalam editorialnya dengan judul 'Sandungan senjata dari penyelundup'.

Tertangkapnya Hadianto Djoko Juliarso, dibawah bendera PT. Ataru Indonesia disebut-sebut sebagai rekanan TNI AU. Hadianto ditangkap dengan tuduhan akan menyelundupkan sejumlah senjata dan peralatan militer ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan TNI AU. Tapi jika dilihat dari daftar peralatan dan senjata yang akan mereka selundupkan mustahil semuanya untuk TNI, mengingat sebagian dari peralatan tersebut masuk dalam daftar embargo. Lalu untuk siapa dan ke mana senjata-senjata tersebut akan dikirim Hadianto. Dan kenapa TNI

yang dibawa-bawa? Sebuah pertanyaan besar yang belum juga terjawab di ranah publik.

Reaksi pun datang dari berbagai pihak. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, mengatakan, Dephan sedang meneliti rekanan TNI/Dephan terutama yang berada di Singapura. "Rekanan di Indonesia ternyata kedompleng rekanan di Singapura yang pesan barang di luar kebutuhan kita," ujar Juwono, Senin (17/4).

Sekjen Dephan Letjen TNI Sjafrudin menambahkan, TNI AU memang pernah memesan radar untuk jet tempur

meminta wacana spekulatif tentang upaya penyelundupan senjata dibalik penangkapan Hadianto cs segera dihentikan.

"Kami kuatir memberi informasi yang salah," kata Happy Bone Zulkarnaen dalam sebuah konferensi pers bersama Djoko Susilo (F-PAN), Arif Mudatsir Madan (F-PPP) dan RK Sembiring (F-PDIP) pekan lalu. Tentang kehadiran dua perwira TNI yaitu Letkol Hadi Suwito dan Letkol Edy Supriyanto saat penawaran senjata di Hotel Renaissance, bersama Hadianto cs bisa dipertanggungjawabkan. "Justru yang jadi soal adalah ke-



Alutsista TNI

F-5 Tiger dan sukucadang pesawat angkut C-130 Hercules kepada Ataru tahun lalu, sebelum embargo senjata oleh AS terhadap Indonesia dicabut. Bahkan kedua barang tersebut tidak termasuk dalam daftar embargo karena bukan senjata. *Republika* (18/4).

Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto, menegaskan dalam tahun anggaran 2005 maupun 2006 TNI sama sekali tak punya rencana belanja senjata baru termasuk rudal *Sidewinder*. Panglima tetap bersikukuh bahwa hubungan TNI dengan Hadianto hanya sebatas pengadaan radar APQ-159 untuk pesawat tempur F-5 Tiger. Bila memesan senjata, TNI akan bertindak sesuai prosedur yaitu melalui fasilitas *Foreign Military Sales (FMS)* atau jalur antar pemerintah (*G to G*).

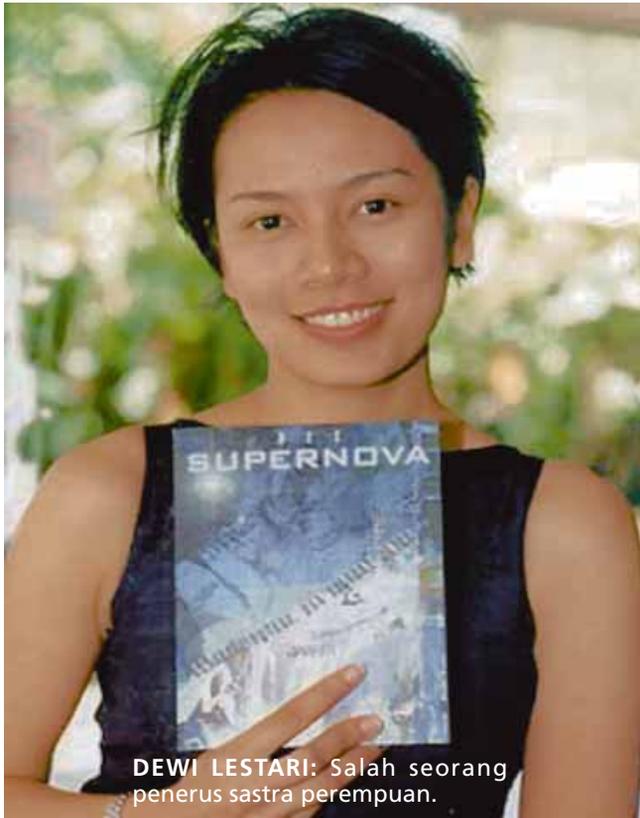
Sejumlah anggota Komisi I DPR RI

beradaan sejumlah pihak dari Singapura, yaitu Alexander David dan Ibrahim bin Amran. Apa kompetensi mereka. Mereka rekanan atau pendompleng," ujar Happy. (*Republika*, 20/4)

Di tempat terpisah Dirjen Strategi Pertahanan, Dephan Mayjen TNI Dadi Susanto kepada *Berita Indonesia* mengatakan, pengadaan Alutsista adalah kewenangan Dephan. Setiap Angkatan dan Mabes TNI hanya memberikan usulan spesifikasi peralatan yang dibutuhkan. Keputusan akhirnya berada di Dephan. Jadi pengadaan Alutsista itu bukan dari matra masing-masing. Sumber *Berita Indonesia* lainnya di Dephan juga menyebutkan pencuatnya isu penangkapan tersebut perlu diselidiki lebih jauh karena bukan mustahil ada kepentingan lain yang justru memojokkan TNI. ■ **SB, SP**

# Persembahkan Kaum Hawa

**Tulisan mereka mampu memberikan pencerahan bagi pembaca dan merupakan karya sastra yang baik.**



**DEWI LESTARI:** Salah seorang penerus sastra perempuan.

**D**atanglah ke toko buku, dan pergilah ke bagian novel lokal. Maka akan terbaca sederet nama pengarang perempuan yang tertera di sampul novel-novel itu. Pengarang pria memang ada. Tetapi entah kenapa, novelis perempuan tampaknya lebih banyak.

Nama-nama penulis perempuan seperti Ayu Utami, Fira Basuki, Djenaar Maesa Ayu, Nova Riyanti Yusuf, Dee (Dewi Lestari), Clara Ng dan sederet nama-nama baru disebutkan sebagai penulis-penulis perempuan generasi masa kini yang saat ini karya-karyanya tengah digandrungi pembaca muda.

Namun, nama pengarang senior seperti NH Dini dan Ratna Indraswari Ibrahim pun masih tetap punya nama. Karya-karya mereka masih dicetak ulang dan karya-karya barunya selalu dinanti pembaca. Tentu saja, gaya penulisan mereka berbeda dengan para juniornya.

Harian *Kompas* mencermati fenomena ini dan menulisnya pada edisi 15 April 2006 di rubrik Pustakaloka dengan judul "Perempuan Penulis Tak Lekang Dimakan Usia".

Ditulis harian ini, novel *Pertemuan Dua Hati* karya NH Dini yang diterbitkan 1986 hingga kini sudah memasuki cetak ulang ke-13. Novelnya yang sangat feminis, *Pada Sebuah Kapal*, sudah dicetak ulang ke-8. Sedangkan *Dari Fontenay ke Magallianes*, adalah novel terbarunya yang diluncurkan tahun lalu.

Dini mengaku masih tetap menulis hingga sekarang. Di usianya yang 70 tahun, ia masih kemana-mana membawa buku catatan untuk mencatat ide-ide yang muncul mendadak.

Mantan isteri seorang diplomat Perancis kelahiran Semarang, 29 Februari 1936 ini mendisiplinkan diri untuk menulis dengan komputernya minimal dua kali seminggu. Ia juga membantu mahasiswa yang sedang menulis skripsi. Waktu luangnya dihabiskan dengan berkebun di halaman rumahnya yang berada dalam kompleks Graha Wredha Mulya, Yogyakarta. Ia juga mengurus Pondok Baca yang didirikannya di dalam kompleks khusus lansia itu.

Sementara Ratna Indraswari yang tinggal di Malang membarengi proses kreatifnya dengan berdiskusi dan menggagas berbagai kegiatan di rumahnya yang sering dijadikan pangkalan para mahasiswa, seniman dan wartawan.

## Sastra perempuan

Roman *Buiten Het Gariel* karya Soewarsih Djojopoespito, 1940, menandai periode pertama kebangkitan perempuan penulis. Seperti ditulis *Kompas* dalam laporannya berjudul "*Sastra Perempuan Tempo Dulu*", karya ini sebenarnya muncul tahun 1930 dalam bahasa Sunda, tetapi ditolak Balai Pustaka karena temanya terlalu maju. Tahun 1975, penerbit Djambatan menerbitkannya dalam bahasa Indonesia dengan judul *Manusia Bebas*.

Tahun 1933, muncul roman *Kalau Tak Untung* karya Selasih yang juga diperhitungkan di jagat sastra. Menyusul Fatimah Hasan Delais dengan karyanya *Kehilangan Mestika*, 1935.

NH Dini memulai debut kepengarangannya periode 1970-an. Pemilik nama lengkap Nurhayati Sri Hardini Siti Nurkatin menjadi penulis perempuan yang paling produktif ketika itu.

Di masa Orde Baru, dimana kepentingan politik penguasa amat dominan, muncul nama-nama penulis perempuan yang produktif dengan karya-karya yang selalu dicetak ulang. Sederet nama-nama itu antara lain Mira W, V. Lestari, Marga T, La Rose, Titie Said, Lastri Fardani Sukarton, Ike Supomo, Maria A. Sarjono, Nina Pane, Tuti Nonka, Sari Narulita dan Marianne Katopo.

Di masa represif itu, setiap lembar depan novel akan dijumpai tulisan: *Tokoh dan cerita dalam novel ini hanya rekaan semata, adanya kesamaan hanya merupakan kebetulan belaka*.

Kalau di masa sebelumnya, penulis perempuan biasanya tumbuh dari kalangan jurnalis dan pendidik, di masa selanjutnya, para penulis perempuan tumbuh dari kalangan komunitas sastra, penerbitan, media massa maupun bidang-bidang lain.

Nama-nama seperti Dorothea Rosa Herliany, Ratna Indraswari, Helvy Tiana Rosa, Abidah El Halieq atau Oka Rusmini muncul pada periode sebelum munculnya periode Ayu Utami dkk. Kebanyakan karya-karya mereka berupa cerpen dan puisi.

Banyak kalangan menilai, para penulis perempuan dalam periode ini lebih punya karakter dan konsisten dalam berkarya dibanding generasi sesudahnya. Karya-karya mereka mampu memberikan pencerahan bagi pembaca dan merupakan karya sastra yang baik, mengutip komentar ahli sastra Indonesia, A Teeuw. ■ RH

▶ Linda Agum Gumelar

# Usulkan Perempuan TNI Turut Ambil Kebijakan

**“Kami mengusulkan kepada bapak panglima, agar memperbanyak jumlah perempuan TNI dan Polri, terutama untuk masuk ke dalam jajaran pengambil kebijakan dalam tubuh TNI.”**

**P**ernyataan itu disampaikan Linda Agum Gumelar dalam acara Silaturahmi Panglima TNI dengan Keluarga Besar TNI, di Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam acara itu, Marsekal TNI Djoko Suyanto sebagai panglima baru, bermaksud mengumpulkan saran dan masukan dari semua elemen dalam tubuh TNI, untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan program. Lembaga-lembaga TNI yang hadir dan memberi masukan tersebut antara lain: Pepabri, LVRI, FKPP, Pemuda Panca Marga, Warakawuri, dan lain-lain, termasuk juga Kowani (Korps Wanita Indonesia).

Sebagai Ketua Umum Kowani, Linda Agum Gumelar mendapat kesempatan untuk mewakili memberikan masukan dan saran. Salah satu point yang ia kemukakan dalam kesempatan itu adalah agar panglima yang baru, membuka peluang bagi Wanita TNI dan Polri untuk ditempatkan pada posisi strategis sebagai pengambil kebijakan dalam tubuh TNI.

“Kami berharap, bapak panglima memberi kesempatan pada wanita TNI dan Polri (Kowad, Kowal, Warared) untuk menempati posisi strategis sebagai pengambil kebijakan. Sebab, sejak dulu hanya ada 1 perwira tinggi wanita dan kini pun sudah pensiun,” lanjut Linda.

Himbauan tersebut disampaikan agar menjadi pemikiran panglima. Menurut pengamatan Linda, jumlah

perwira tinggi wanita dalam tubuh TNI masih sangat terbatas. “Sampai level kolonel memang sudah ada, tapi jumlahnya belum berimbang. Ini harapan kami, agar menjadi perhatian beliau,” tegasnya.

Sebagai ketua umum, istri Ketua KONI Pusat, Agum Gumelar ini merasa memiliki ‘tanggungjawab’ yang besar dalam upaya

memperjuangkan kepentingan perempuan di berbagai lini. “Sekarang yang kami lakukan adalah mendorong perempuan untuk terjun di bidang politik. Melalui mereka, kami berharap perempuan bisa mewakili sebagai pengambil kebijakan. Sebab, siapa yang akan memikirkan kepentingan perempuan kalau bukan perempuan sendiri,” imbuhnya.

Menurut Linda, ada sekitar 12 bidang kegiatan dalam tubuh Kowani. Antara lain, bidang politik, hukum dan HAM, lingkungan hidup, sosial dan kesehatan keluarga, pendidikan. Dalam

bidang pendidikan, kini Kowani sedang bekerjasama dengan Kantor Menteri Pendidikan Nasional untuk pendidikan bebas buta aksara dan pendidikan anak usia dini (PAUD), juga dalam bidang pendidikan keterampilan.

“Di bidang lingkungan, kami salah satu anggota APP yaitu Aliansi Perempuan untuk Pembangunan Berkelanjutan. Bidang ekonomi, pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi,” tambahnya. Dalam bidang sosial, organisasi federasi dari 78 organisasi wanita di tingkat pusat ini bekerjasama dengan salah satu bank, membangun sekolah di pulau Simelu, korban Tsunami dan memberi pelatihan-pelatihan.

“Dalam bidang hukum dan HAM, kami sedang berjuang untuk disahkannya UU Pornografi,” lanjut perempuan yang pernah menjadi anggota DPR RI tahun 1992-1997 ini. Dukungan Kowani atas UU Pornografi itu dilihat dari segi moral dan etika. “Kami mendukung, tapi dengan revisi dan bukan berdasarkan agama, tapi berdasarkan etika dan budaya bangsa”. ■AD



LINDA AGUM GUMELAR

# Kartu Kredit Masa Depan

**Terhitung 1 September 2006, Bank Indonesia mengharuskan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank sudah mengimplementasikan teknologi chip (*smartcard*) yang sudah menjadi standar EMV (Europay-Mastercard-Visa) dan tidak lagi memakai *magnetic stripe* (*magstripe*). Ini adalah awal pemusnahan kartu *magstripe* di Indonesia dan dijadwalkan pada 2010 semua *magstripe* akan hilang dari muka bumi dan akan digantikan dengan *smartcard*.**



**K**ewajiban yang harus dipenuhi oleh bank-bank di Indonesia ini tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia No 7/60 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia No 7/52/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Hal ini berlaku baik untuk pemegang kartu baru ataupun untuk penggantian kartu lama (*renewal*). Adapun penggantian kartu lama wajib dilakukan paling lambat 31 Desember 2008.

BI berharap dengan penggunaan chip, keamanan kartu akan semakin terjaga mengingat jenis teknologi yang dipasang pada kartu ini memuat sejumlah aplikasi dan pengamanan. Salah satu inspirasi aturan ini adalah keberhasilan bank sentral Malaysia menurunkan secara drastis kecurangan (*fraud*) pada kartu dengan menggunakan teknologi chip.

Sebelum aturan chip diberlakukan di Malaysia, tingkat kecurangan sangat tinggi, tidak hanya terhadap kartu kredit, tetapi juga kartu debit dan ATM.

Ide program standar EMV ini dimulai pada 1994 oleh MasterCard, Visa, dan Europay yang telah merger dengan MasterCard. Teknologi chip ini dapat mengurangi risiko pemalsuan data-data kartu kredit seperti pada teknologi berbasis kartu magnetik (*magnetic card*) yang selama ini digunakan. Kartu magnetik relatif lebih mudah ditiru hanya dengan mengopi pita magnetik pada kartu tersebut serta memasangnya pada kartu yang baru.

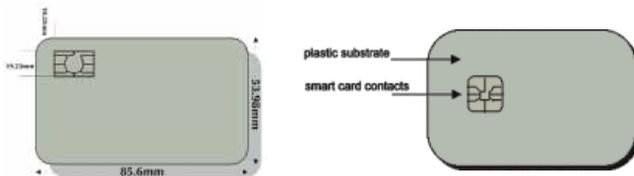
Hal ini terjadi saat kartu magnetik digunakan atau digesek pada *electronic data capture* (EDC), maka secara otomatis semua data yang melekat pada kartu itu biasanya data saldo dan personal identification number (PIN) dapat tertinggal di EDC. Kondisi tersebut sangat me-

mungkinkan bagi pelaku kejahatan kartu kredit dengan mudah melakukan imitasi data-data kartu tersebut. Hal itu tidak mungkin dilakukan pada kartu berbasis chip karena segala data perintah transaksi tidak ada yang ditinggalkan pada EDC karena dalam membacanya tidak bergesekan dengan alat yang lain.

Kartu berbasis chip dengan standar EMV ini tidak hanya dapat diproses dengan sistem *swipe* (digesek) melainkan juga dengan cara *dipping* (dimasukkan) seperti halnya kartu telepon. Selain mengurangi risiko transaksi dengan kartu palsu atau transaksi yang tidak diakui (*dispute*), keuntungan lain yang bisa diperoleh adalah penerimaan menjadi lebih luas karena transaksi tidak hanya dari kartu berbasis *magnetic stripe* saja,

## Apa Itu Smartcard?

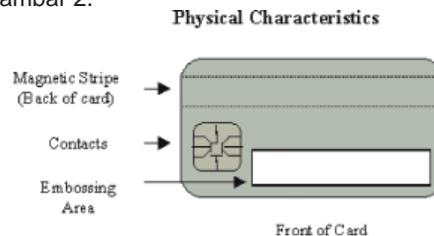
**S**martcard mempunyai banyak kelebihan dibanding dengan Magnetic Card. Smartcard cukup mudah untuk diprogram, sehingga memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut di sisi aplikasinya. Meskipun demikian, teknologi perangkat kerasnya sendiri tidak berkembang dengan cepat dan cenderung statis.



GAMBAR 1. UKURAN STANDAR DAN KOMPONEN SMARTCARD

Ukuran standar dari sebuah SmartCard ditentukan oleh ISO 7816. Jika anda perhatikan dengan seksama ketika membeli kartu baru GSM, maka anda akan melihat bahwa terdapat dua buah komponen yang dapat anda amati yaitu smartcard-nya

sendiri dan substrat plastiknya yang menjaga smartcard-nya dari kerusakan sebelum digunakan. Karakter fisik dari smartcard berdasar standar ISO 7816 dapat anda lihat pada beberapa aplikasi seperti kartu kredit, kartu ATM dan sebagainya seperti Gambar 2.



GAMBAR 2. KARAKTERISTIK FISIK SEBUAH SMARTCARD

Normalnya, sebuah smart card tidak memiliki catu daya, layar, atau keyboard. Smart card berinteraksi dengan dunia luar menggunakan antarmuka komunikasi serial lewat delapan titik kontak atau *contact point* yang ada.

Munculnya teknologi ini, membuka jalan yang seluas-luasnya bagi munculnya aplikasi-aplikasi berbasis kartu yang lebih kompleks dan saling terintegrasi dengan kehidupan manusia. Selama ini teknologi kartu yang kita kenal berkisar pada aplikasi

tapi transaksi dari para turis asing yang memiliki kartu EMV, sehingga potensi transaksi lebih besar.

Sistem EMV juga mengurangi biaya komunikasi pada mesin EDC (biaya telepon) dengan melakukan *off-line transaction*. Selain itu banyaknya program atau aplikasi tambahan yang dapat dikembangkan dari kartu EMV, seperti security/ID, electronic purse, *loyalty, mobile, transit, e-coupon*, hadiah berkala, insentif

berkala bahkan menyimpan data lainnya, seperti KTP, SIM, NPWP, data pribadi, paspor dan sebagainya. Plusnya lagi, kartu ini bisa berumur lebih dari dua tahun.

Untuk mengaplikasikan sistem EMV, penerbit kartu pembayaran harus mengganti kartunya dengan sistem berbasis chip. Meski besarnya bervariasi, saat ini memori yang dapat disimpan di dalam chip tersebut dapat mencapai 256 kilobytes. Standar EMV ini juga harus dijalankan pada sistem perbankan berbasis TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol). Mau tidak mau bank harus mengganti perangkat kerasnya, seperti mesin ATM dan EDC (electronic data capture) sesuai yang dipersyaratkan.

Sebenarnya bank bisa tetap menggunakan mesin EDC, hanya saja diperlukan aplikasi khusus pada mesin EDC yang dapat membaca data *smartcard*. Secara fisik, mesin EDC tetap sama dan per-

ubahan hanya pada *software* EDC yang harus di up-grade menjadi compliance dengan EMV. EMV compliance adalah sertifikasi atas teknologi Electronic Data Capture (EDC) yang telah mampu memproses transaksi dengan menggunakan EMV Card yang berbasis chip. BNI merupakan bank pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi ini.

Barangkali karena tergiur oleh manfaat kartu aliran baru ini, tanpa menunggu hari H yang dipatok BI, beberapa bank langsung merespon mandat tersebut. Contohnya, Bank Central Asia (BCA) yang mulai 21 Desember 2005 mengeluarkan kartu kredit baru yang memakai chip standar EMV. Untuk kartu lama, penggantianinya dicicil setiap jatuh tempo kartu. Kemudian diikuti oleh Bank Buana Indonesia awal tahun 2006 ini.

Tak bisa dipungkiri, biaya investasi yang harus dikeluarkan perbankan untuk melakukan migrasi kartu chip sesuai dengan standar EMV lumayan besar. Bank harus merogoh kocek ratusan miliar rupiah hanya dalam waktu dua tahun. Memang, awal tahun lalu, vendor kartu kredit seperti MasterCard hanya mematok US\$ 0,99 untuk setiap kartu berbasis chip ini. Kenyataannya, bank-bank masih harus melakukan pengisian data dan fasilitas lainnya. Alhasil, untuk keperluan penggantian kartu saja, biayanya bisa bervariasi antara US\$ 3 sampai US\$ 5.

Ambil contoh Bank Mandiri. Total pemegang kartu debit di bank pelat merah ini tercatat sekitar 4,5 juta orang. Untuk kartu kreditnya kurang lebih

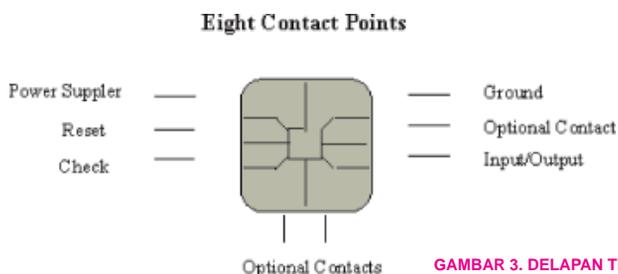
750.000 orang. Dengan asumsi harga US\$ 3 per kartu saja, Bank Mandiri harus merogoh koceknya lebih dari US\$ 15,7 juta hanya untuk penggantian kartunya. Sementara itu, Bank Permata harus menyiapkan dana sekitar US\$ 750.000 untuk penggantian kartu kreditnya saja. Untuk kartu debit sudah pasti angka investasinya lebih besar.

Padahal, di luar itu, bank-bank harus mengganti puluhan ribu anjungan tunai mandiri (ATM) dan ratusan ribu EDC (electronic data capture) yang dipasang di merchant-merchant. Belum lagi ongkos modifikasi informasi teknologi di "back end system" yang harganya diperkirakan mencapai US\$ 400.000. Lalu, mesin untuk memasukkan data ke chip yang harganya sekitar US\$ 50.000-US\$ 60.000 per mesin. Umumnya, setiap bank perlu dua sampai lima mesin. Bank juga harus membeli modul senilai US\$ 5.000, mesin electronic data capture (EDC) yang harganya antara US\$ 300.000 sampai US\$ 500.000, plus mesin ATM baru dengan harga mulai dari US\$ 5.000 hingga US\$ 20.000.

Untuk mengeluarkan investasi sebesar itu, agaknya sejumlah bankir merasa ketar-ketir. Apalagi, mengingat jebloknya kinerja sebagian besar perbankan pada akhir tahun lalu. Alhasil, beberapa bank agaknya ogah-ogahan untuk memenuhi ketentuan PBI untuk memulai penggantian kartu magnetik ke kartu chip pada September nanti.

Sejumlah bankir mengusulkan agar penggunaan chip diterapkan saat kartu pembayaran mulai dimanfaatkan secara optimal. Artinya, kartu pembayaran tidak hanya digunakan untuk transaksi perbankan atau pembayaran di *merchant*, tapi juga meluas untuk, misalnya, pembayaran tol atau parkir. Artinya, lebih baik BI dan pemerintah memasyarakatkan terlebih dahulu pemakaian kartu pada segala bidang.

Dengan demikian, pemasangan chip tidak lagi mubazir karena pemakaiannya optimal dan sesuai dengan potensi fraud yang akan muncul. Beberapa bankir kabarnya malah memberanikan diri meminta agar BI mengundur waktu penggantian kartu tersebut. Apalagi menurut hitung-hitungan waktu, Malaysia saja butuh waktu 2-3 tahun untuk melakukan EMV sedangkan Indonesia baru mulai tahun ini dan butuh waktu 2-3 tahun ke depan untuk menstandarisasi EMV. Jadi, cukup beralasan kalau para bankir meminta waktu dimolorkan mengingat implementasi teknologi informasi di tanah air yang juga sering molor. ■ (dari berbagai sumber)



GAMBAR 3. DELAPAN TITIK KONTAK DENGAN DUNIA LUAR

di mesin ATM, kartu kredit, kartu GSM, dan sebagainya. Namun telah pula dikembangkan sebuah aplikasi dimana anda hanya memerlukan sebuah kartu saja untuk semua aplikasi yang ingin anda akses. Salah satu aplikasi yang telah dikembangkan adalah *Travel Card*.

Dengan menggunakan *Travel Card* ini, anda tidak memerlukan tiket ketika harus bepergian dengan menggunakan pesawat terbang, ketika menggunakan pesawat telepon di bandara, memesan mobil jemputan di bandara tujuan, pembayaran elektronik di beberapa pusat perbelanjaan, maupun reservasi kamar hotel. Bahkan ketika anda, ingin menghubungi keluarga anda di belahan dunia yang lain, kartu ini berubah fungsi menjadi kartu telepon, dan tak lupa anda dapat membeli oleh-oleh dengan menggunakan kartu ini. Atau, bisa saja kartu ATM, kartu kredit, kartu mahasiswa, kartu Askes plus program Single Identity Number (SIN) yang tengah digagas pemerintah ada dalam satu kartu masa depan ini. Tiada yang mustahil...

# Tragedi Tentara di Perbatasan

Ketegangan di wilayah perbatasan masih saja terjadi. Terakhir dua prajurit TNI gugur di medan tugas. Beberapa majalah terkemuka menulis peristiwa tersebut sebagai laporan utamanya.

**P**emberontakan yang terjadi di perbatasan tampaknya belum akan berakhir. Buktinya dua tentara gugur dalam mempertahankan NKRI di bumi Papua. Sersan Satu Basori Ahmad dan Prajurit Satu Sukarno dari Batalion Infanteri 509 Kostrad Jember yang sedang bertugas di wilayah perbatasan Papua-Papua Nugini tewas seketika setelah mendadak sekelompok orang datang dengan menggunakan senjata api, kapak, panah datang tiba-tiba menyerang. Judul di atas dipilih oleh Majalah Mingguan **Forum**, Edisi 23 April 2006.

Memang perbatasan antara Papua dan Papua Nugini sejak dulu menjadi basis perlawanan kelompok separatis. Melibatkan kelompok suku, gereja dan kelompok oposisi negara tetangga. Ironisnya di tengah upaya pemerintah mengawasi pulau-pulau di wilayah perairan, justru terjadi serangan darat.

Berita lain yang juga diturunkan *Forum* adalah pesan Vatikan untuk Jaksa Agung atas terpidana mati Tibo cs, yang terkait kasus Poso tahun 2000. Rencana eksekusi yang tinggal menghitung hari pun urung dilaksanakan.

Sementara itu, Majalah **Gatra**, Edisi 22 April 2006, justru menurunkan laporan utamanya “**Surat Paus dan Nasib Tibo**”. Rencana eksekusi terhadap tiga terpidana mati Fabianus Tibo, Domingus da Silva dan Marinus Riwu ditunda. Penundaan tersebut disinyalir terkait dengan surat yang dikirim Paus Benediktus XVI kepada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono agar meninjau ulang putusan hukuman mati tersebut. *Gatra* menulis, untuk kedua kalinya Tibo cs mengajukan peninjauan kembali.

Majalah **TRUST**, edisi 17-23 April 2006 menulis laporan utamanya berjudul ‘**Indomobil Kegemukan**’. Sebagai perusahaan otomotif terkemuka di negeri ini, nama Indomobil Sukses Internasional memang sudah kesohor. Tampaknya nama besar belum bisa menjamin bisa menarik investor. Buktinya, di mata investor yang bermain di lantai bursa seperti Bursa Efek Jakarta (BEJ), perusahaan itu tak memiliki keistimewaan apa-apa. Mereka pun enggan bermain. Alasannya kinerja perusahaan tak semengkilat cat mobilnya.

Berita lain yang tak kalah penting adalah soal minyak. ‘**Krisis Minyak Datang Lagi**’.

Majalah **Tempo**, Edisi 17-23 April 2006 menulis ‘**Setrum**

**76 Triliun Kalla**’. Nama besar Kalla menjadi sorotan majalah itu. Usulan Achmad Kalla, Direktur Utama Bukaka, agar pemerintah membangun jaringan pembangkit berbahan bakar batubara berkapasitas 10 ribu megawatt bagi PLN menjadi kontroversi. Usulan tersebut memantik kecurigaan akan nepotisme. Sebab Achmad Kalla adalah adik dari Jusuf Kalla yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Di lain pihak ide ini bisa benar karena bisa menyelesaikan problem krisis energi listrik selain bahan bakar minyak.

Laporan *Tempo* lainnya adalah tertangkapnya broker senjata di Amerika Serikat. Hadianto cs, yang mengaku sebagai rekanan TNI.

Majalah **SWA**, Edisi 20 April -3 Mei menurunkan laporan utamanya tentang peran wanita. ‘**Mereka Bukan Perempuan Biasa**’, demikian *SWA* menulis dalam judul utamanya. Majalah ini menuturkan saat otak mengalahkan otot, peran wanita di sektor non domestik kian mendominasi. Mereka memadukan kalkulasi untung-rugi dengan hati dan empati, serta kelembutan dengan keteguhan prinsip. Wanita antara tahta dan keluarga.

Majalah **Tempo**, edisi 24-30 April 2006, menulis judul Utamanya “**Bisnis Gelap Impor Senjata**.” Itu terkait dengan tertangkapnya tiga WNI di Hawaii. Ketiganya dituding hendak menyelundupkan senjata ke luar Amerika dan mereka selama ini dikenal sebagai salah satu rekanan TNI Angkatan Udara.

Berita lain yang tak kalah menarik adalah jejak uang Neloe mantan Direktur Bank Mandiri dalam rekening Bank di Swiss.

Neloe sendiri telah divonis bebas oleh majelis hakim belum lama ini dalam kasus korupsi yang dihadapinya.

Majalah **Gatra**, Edisi 29 April 2006 menulis, “**Jalur Gelap Logistik Tentara**.” Sama dengan *Tempo*, majalah *Gatra* juga memilih tertangkapnya tiga WNI di AS sebagai laporan utamanya. Hadinto mengaku dia belanja senjata untuk kepentingan pemerintah Indonesia. Namun pengakuan itu dibantah oleh Departemen Pertahanan, Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

Ditelaah dari hasil laporan beberapa media terkait dengan masalah tersebut, sasaran tembaknya tak lain adalah tentara. Ada apa di balik semua ini? ■ SB



# Kontroversi Kelinci Berdasi

**Kendati ditolak, majalah *Playboy* Indonesia tetap terbit dan beredar. Aksi protes berlanjut dengan perusakan kantornya.**

**W**ajah cantik Andhara Early terpanjang, lengkap dengan senyumnya yang manis di sampul majalah *Playboy* versi Indonesia yang terbit perdana. Beberapa hari kemudian, kantor redaksinya didatangi ratusan massa yang mengajukan protes atas terbitnya majalah yang di Amerika dan Eropa dikenal sebagai majalah porno.

*Koran Tempo*, 13 April 2006, melaporkan 300 anggota Front Pembela Islam (FPI) mendatangi kantor *Playboy* di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, (12/4). Mereka melakukan perusakan di gedung ASEAN Aceh Fertilizer (AAF), tempat *Playboy* berkantor. Massa FPI datang ke gedung itu sekitar pukul 14.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor dan mobil bak terbuka.

Ketika akan memasuki gedung itu, 200 anggota polisi menghadang mereka dengan membuat pagar betis di depan gedung AAF. Massa lalu melakukan orasi di luar gedung sambil membentangkan spanduk bertuliskan "*Playboy* terbit, mau dibawa ke mana bangsa ini". Aksi itu mulai memanas ketika massa FPI melemparkan batu ke arah barikade polisi.

Sebelumnya, Ketua FPI Habib Rizieq melaporkan *Playboy* dan 26 perusahaan yang berkaitan dengan majalah tersebut ke Markas Besar Kepolisian RI. "Mereka telah menyebarkan pornografi dan melanggar undang-undang tentang kesusilaan," kata Rizieq. Juru bicara Markas besar Polri, Brigadir Jenderal Anton Bachrul Alam, mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan FPI. Namun, dia menghimbau agar massa FPI tidak berbuat anarkis.

Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal menyalahkan tindakan FPI yang merusak gedung AAF, tempat *Playboy* berkantor. "Perbuatan FPI bisa menyebabkan kebebasan pers terganggu," kata Ichlasul kepada *Tempo*.

Nyatanya dunia juga tak habis pikir dengan terbitnya *Playboy* di Indonesia. *Republika*, 12 April 2006, dalam laporannya yang berjudul "*Playboy* dan Dunia yang Tercengang" mengetengahkan keheranan itu.

"Negara berpenduduk Muslim terbesar

di dunia mulai mengedarkan '*Playboy*, sebuah majalah porno asal Amerika,' bunyi teras berita harian *Al Rayah*, Qatar. Judul yang dipampang pun tegas, "Negeri Muslim Terbesar di Dunia Terbitkan Majalah *Playboy*."

Sementara situs harian Arab Saudi, "*Al Watan*, menulis dengan judul lain, "Banyak Protes Atas Penerbitan *Playboy* Indonesia," Tetapi intinya tetap bernada cemas. Lihat saja mereka menulis, "Dikhawatirkan majalah porno itu akan berkembang sebagaimana di negara asalnya, meski edisi pertama di Indonesia itu tidak memuat gambar telanjang, tulis Al Watan.

Kekawatirkan itu juga bahkan telah merebak ke negara tetangga, Malaysia. Hanya sehari setelah terbitnya *Playboy* di Indonesia, pihak bea dan cukai negara itu memberlakukan pemeriksaan ketat terhadap para pendatang dari Indonesia, tetapi terutama warga Malaysia yang baru pulang dari Indonesia.

## Kenekatan

Erwin Arnada, Direktur PT Velvet Silver Media, pemegang lisensi *Playboy* Indonesia, menyatakan sudah ada perjanjian antara pihaknya selaku pemegang lisensi dengan pemilik lisensi *Playboy*. "Kami berorientasi pada masalah gaya hidup. Dalam perjanjian pemberian lisensi itu

kami diberi hak untuk mengisi hingga 70 persen isi majalah sesuai dengan pilihan kami," ujarnya seperti dikutip *Suara Pembaruan*, 7 April 2006.

Selain berisi wawancara dengan modelnya, edisi perdana *Playboy* Indonesia itu memuat pula sejumlah artikel mengenai buku-buku terbaru. Selain itu, beberapa novelis yang karyanya muncul dalam majalah itu ialah FX Rudi Gunawan dan Dewi 'Dee' Lestari.

Meski terbukti tidak memuat foto-foto telanjang, namun tetap saja foto-foto yang dimuat, terutama foto Andhara Early, dianggap terlalu seksi dan sensual. *Playboy* juga dinilai menyalahi janjinya yang akan membungkus majalahnya dengan sampul tebal. Nyatanya, tidak dilakukan.

Praktisi media senior, Farid Gaban, mempertanyakan keistimewaan yang diperoleh *Playboy* Indonesia untuk tampil lain. "Membeli *franchise* sebuah majalah asing, setahu saya, tidak semata mata membeli *brand* tapi juga serangkaian *standard operating procedure* (SOP): tata cara operasi secara bisnis, dalam pemasaran, penyajian, bahkan dalam keseluruhan *corporate culture*," tulis Farid di internet. Hal itu, menurutnya berlaku sebagaimana McDonald's, Starbuck, atau *National Geographics Indonesia*.

Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pornografi dan Pornaksi Balkan Kaplale malah meminta pemerintah mengusut peredaran majalah ini. ■ RH, SR



Dunia pun tercengang dengan terbitnya *Playboy* di negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

# Perang Armada di Jalanan

**Turunnya daya beli masyarakat menyebabkan menurunnya penumpang taksi. Para pengemudinya ikut susah. Persaingan tarif pun berlangsung.**

**S**eorang pengemudi taksi dari armada terkenal di Jakarta bercerita. Sejak tarif taksi naik seiring kenaikan BBM, banyak teman-temannya ditinggal isteri pulang kampung. Beberapa bahkan minta bercerai. Kehidupan yang semakin sulit dan penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari kerap menyulit pertenggaran.

Di beberapa *pool* taksi itu, ujarnya, ada pengemudi yang terpaksa menitipkan anaknya yang masih kecil, sementara ia bekerja. Di rumah tak ada yang menjaga anak itu, karena ibunya meninggalkan rumah. Teman-teman si pengemudi yang kebetulan ada di *pool*, bergantian membayari makan siang anak yang dititipkan itu.

Kisah itu dituturkan dengan serius kepada *Berita Indonesia* yang sedang menumpang taksinya. Entah benar entah tidak, tetapi cukup membuka mata bahwa kesulitan hidup berimbas begitu getir terhadap kehidupan para pengemudi taksi yang mengalami penurunan konsumen secara drastis.

Beberapa media rupanya menyoroti masalah ini pula, meski dari sudut persaingan bisnis yang mulai tajam antar armada. Jika dulu tarif taksi seragam, kini ada yang menerapkan tarif lama dan tarif baru.

*Kompas*, 6 April 2006, menyuguhkan laporan "*Berebut Penumpang di Ja-*

*karta*. "Berbagai strategi dilakukan untuk menggaet konsumen. Dari mulai perang tarif sampai sistem kerja.

Astro Taksi menerapkan sistem "*minimum payment*," yaitu menetapkan batas bawah uang yang harus dibayarkan penumpang. Besar tarif minimum yang harus dibayar Rp 25 ribu-Rp 30 ribu. Meski argo kurang dari harga itu, penumpang harus membayar *minimum payment*-nya. Armada Astro juga menerapkan sistem *ngalong*, beroperasi malam hari. Dengan demikian mereka berani menerapkan tarif baru, dengan tarif *flag fall* Rp 5.000 dan penambahan Rp 2.500 per kilometer,

Menurut laporan harian *Warta Kota*, beberapa armada taksi skala kecil-menengah sejak 16 Maret lalu, memutuskan menurunkan tarifnya. Mereka kembali ke tarif lama, dengan *flag fall* Rp 4.000 dan penambahan Rp 1.800 per kilometer. Langkah ini diambil menyusul menurunnya jumlah pengguna taksi hingga 50 persen setelah diberlakukannya tarif baru Oktober 2005 lalu.

Hasilnya, sudah mulai dirasakan. Tingkat pemesanan lewat telepon dan panggilan di jalan naik sampai 50 persen. Penghasilan para pengemudi juga naik sekitar 20 sampai 30 persen. Mereka bahkan berencana menggulirkan tarif taksi murah, buka pintu Rp 3.000 dan tarif per kilometer Rp 1.500.

Saat ini, ada sekitar 14 pengusaha taksi

kecil-menengah yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengusaha Taksi Skala Kecil-Menengah yang dipimpin Adi Sofyan. Sekitar 10 perusahaan menurunkan tarif menjadi tarif lama, di antaranya Golden (460 unit), Mitra (300 unit), Bistrot (100 unit), Bintang, dan Merlin. Beberapa perusahaan taksi skala besar seperti Putra, Kosti, dan Family, juga termasuk yang tidak ikut menerapkan tarif baru.

## Faktor *safety*

Menurunnya konsumen taksi tidak hanya disebabkan oleh tarif yang melonjak, melainkan juga karena berbagai kasus kejahatan di dalam taksi, terutama dialami oleh kaum perempuan yang naik taksi di malam hari.

Dalam banyak kasus, pengemudi taksi bersekongkol dengan pelaku perampokan. Dia berhenti di suatu tempat dan menaikkan para pelaku. Membawa korban berputar-putar, setelah hartanya terkuras, korban dibuang di pinggir jalan. Dalam beberapa kasus, perampokan taksi juga dibarengi pemerkosaan.

Maka faktor *safety* menjadi salah satu syarat calon penumpang dalam memilih taksi. Taksi Blue Bird termasuk yang diakui konsumen aman dan terjamin. Suherman (47), supir Blue Bird yang telah melakoni profesinya sebagai supir taksi sejak tahun 1975 mengakui, meski Blue Bird tetap bertahan pada tarif buka pintu Rp 5.000, tetapi jumlah penumpang tidak terlalu merosot.

Persoalan utama sekarang adalah *over capacity* armada taksi, sementara daya beli masyarakat menurun. Menurut Presiden Direktur Blue Bird Group, Purnomo Prawiro, dengan tarif lama, jumlah rit maksimal 20 per taksi. Dengan penurunan tarif tidak mencapai 50 persen, sulit meningkatkan jumlah konsumen hingga dua kali lipat. Sekarang ini saja kilometer isi hanya 20-30 persen.

Melihat kemacetan lalu lintas yang bertambah parah di Jakarta, tidak mungkin satu taksi bisa beroperasi sehari membawa penumpang 25 rit. Bila 25 rit tidak terpenuhi, sulit rasanya bagi pengemudi untuk memenuhi setoran dan mendapatkan penghasilan yang cukup. Akibatnya, sulit pula mempertahankan atau meningkatkan pelayanan sehubungan kenyamanan dan keamanan. ■ RH, DA



**DAMPAK KENAikan TARIF:** Jumlah konsumen menurun, kehidupan pengemudi taksi semakin sulit.

# Sepakat Tanggung Bersama Dana Pendidikan

**Pemerintah pusat dan daerah sepakat untuk menanggung bersama dana pendidikan. Besarnya, masing-masing daerah tentu berbeda-beda sesuai kesiapan daerah. Ini menjadi bukti bahwa pembangunan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama.**



SEKJEN DEPDIKNAS, DODI NANDIKA.

**K**omitmen bersama ini mengemuka saat acara Rembuk Nasional Pendidikan 2006 di Sawangan Bogor, 20-22 April lalu. Kesepakatan tersebut untuk mencapai target menengah Rencana Strategis (Restra) Depdiknas 2005-2009. Bahkan dari komitmen itu langsung dipertegas dengan kesepakatan soal prosentase pembagian dana atau pola *sharing* yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, antara 50:30:20 atau 60:20:20. Kemudian saat itu juga sudah ada daerah yang menandatangani MoU (*memorandum of understanding*).

Pola itu selanjutnya diharapkan bisa menjadi acuan bagi pendanaan program-program pendidikan di daerah, yang bukan hanya pembangunan fisik seperti gedung sekolah baru, atau sekolah rusak, tapi juga pemberantasan buta aksara, peningkatan mutu guru, program pendidikan anak usia dini dan lain-lain.

Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, Dodi Nandika me-

ngatakan, "Untuk pertama kalinya dalam pertemuan yang melibatkan para *stake holder* pendidikan di seluruh pelosok Tanah Air mampu menghasilkan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk membiayai secara bersama-sama."

Lebih lanjut dikatakan Dodi, bahwa rembuk nasional juga menghasilkan pemahaman kolektif lintas instansi terhadap permasalahan, tantangan dan program pendidikan. Komitmen tersebut bukan hanya terjadi antara pemerintah pusat dan provinsi, tetapi juga dengan DPRD yang untuk petamakalnya ikut dilibatkan dalam memberikan masukan pada persoalan pembangunan pendidikan nasional. Sebab menurut Dodi, "Komitmen membangun pendidikan tidak bisa dicapai tanpa melibatkan DPRD sebagai bagian dari pemerintah daerah."

Pemda yang telah menyatakan komitmennya dalam pembangunan sekolah, terutama sekolah rusak sama besar dengan pusat antara lain Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Maka, diharapkan

daerah lain akan mencontoh. Kendati demikian, masih diakui bahwa belum semua daerah menyatakan kesiapan. "Mereka masih perlu koordinasi dulu dengan para pejabat pemerintah daerah. Namun, dalam waktu dekat ini mereka akan segera menandatangani MoU yang sudah kami persiapkan ini," kata Dodi. Namun, jika daerah tidak melakukan MoU seperti yang ditawarkan pusat, "Pemerintah akan menyalurkan dana ke daerah lain yang sudah siap," imbuhnya. Saat ini menurut Dodi, pemerintah telah menyediakan dana Rp. 4,1 triliun untuk pembangunan pendidikan.

## Pembangunan Sekolah Kejuruan

Sementara itu dalam rangka memperbanyak jumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) Depdiknas mengalokasikan dana Rp. 500 miliar untuk membantu Pemda. Menurut Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Depdiknas Suyanto, pihaknya siap membantu melakukan studi kelayakan bagi Pemda yang berniat untuk mengubah SMA menjadi SMK. Hal ini sesuai dengan rencana pemerintah memperbanyak SMK dan mengurangi SMA, hingga rasio perbandingan antara SMK dan SMA menjadi 70:30 pada 2009. Saat ini rasionya 30:70. ■ AD, RH



Pemda mulai turunkan dana

# Banjir Mengisolasi Trenggalek

**Air adalah sumber kehidupan. Namun jika datang dalam volume besar, bisa berubah menjadi bencana. Itulah yang terjadi di Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur, Kalimantan Tengah serta di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur bulan April lalu.**

**D**atangnya begitu tiba-tiba di hari Kamis (20/4) dini hari. Sementara sebagian warga masih tertidur lelap dan dibuai mimpi, air bah itu datang menerpa kota Trenggalek, Jawa Timur. Sejumlah rumah roboh dan korban jiwa pun tak terelakkan. Sedikitnya 16 orang dikabarkan tewas. Tak ayal, kepanikan pun terjadi di pagi hari itu.

Curah hujan sejak awal tahun hingga bulan April memang masih cukup tinggi. Kondisi alam dan cuaca yang demikian mudah mengundang terjadinya bencana banjir dan longsor. Sebagaimana halnya yang terjadi di awal tahun lalu yang menimpa Kabupaten Jember, Jatim dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Dalam dua kejadian yang berdekatan waktunya itu ratusan orang tewas dan ratusan rumah porakporanda diterjang banjir bandang. Bencana banjir ini tak ayal mendapat liputan luas media massa, baik media cetak maupun elektronik.

Banjir bandang yang melanda wilayah Kabupaten dan Kota Trenggalek ini disebabkan oleh hujan lebat yang turun tiga hari berturut-turut dan luapan sungai Ngasinan, Bagong dan Bendungan. Tanah longsor pun terjadi di beberapa tempat. Selain merusak rumah penduduk, banjir bandang ini menyebabkan terputusnya salah satu akses jalan menuju Trenggalek, rusaknya fasilitas telekomunikasi Telkom serta padamnya aliran listrik. "Kini, Trenggalek layaknya kota mati," kata Adi, seorang anggota tim SAR di tengah kesibukannya mengevakuasi korban. (*Republika*, 21/4).

Hal ini dibenarkan Ali Sar-tono, Manajer Telkom Daerah Trenggalek. Akibat bencana ini 7.000 sambungan telepon rumah dan 2.000 sambungan Telkom Flexi rusak. Selain itu beberapa peralatan seperti *power supply*, genset dan modul sentral rusak berat dihajar banjir, bahkan kantor Telkom di Jalan Basuki Rachmat terendam lumpur.

Bencana banjir bandang ini nyaris membuat Kota Trenggalek dan tujuh kecamatan di Kabupaten Trenggalek terisolir karena digenangi air, bahkan ada yang mencapai ketinggian 1,5 meter.

Kadis Infokom Jatim Soewanto yang mendampingi Gubernur Jatim Imam Utomo saat meninjau lokasi bencana menyatakan Pemda Provinsi Jatim telah mendrop 15 ton beras serta dua mobil boks berisi mie instan serta uang Rp 15 juta untuk membantu para korban yang ditampung di tenda-tenda. Juga dua buah perahu karet serta sejumlah obat-obatan.

## Kalteng Kebanjiran

Sebelumnya, bencana serupa melanda kawasan Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur di Kalimantan Tengah. Hujan yang turun dalam beberapa hari menyebabkan Sungai Kahayan meluap dan menggenangi Kecamatan Dusun Selatan.

Hampir seluruh rumah penduduk yang berada di dataran rendah itu terendam air. Hanya rumah panggung yang selamat dari genangan air seperti yang terdapat di Bumbulam, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Kalteng.

Sementara itu arus lalu-lintas yang menghubungkan Palangkaraya – Banjarmasin nyaris terputus. Ketinggian air di ruas jalan sempat mencapai setengah meter dan kemudian berangsur menyusut. Setiap kendaraan yang mencoba melintas harus ekstra hati-hati kalau tidak ingin terperosok ke dalam lumpur.

"Masih bisa dipaksakan asalkan kita hati-hati agar tidak terpelosok ke dalam lumpur," kata Yayan sopir bus travel jurusan Banjarmasin – Palangkaraya sebagaimana diberitakan *Kompas* (19/4).

Namun pengendara sepeda motor tak mungkin menerobos genangan air. Mereka pun terpaksa memanfaatkan fery kayu untuk menyeberangkan motornya dengan ongkos

lima sampai sepuluhribu rupiah per kendaraan.

Kepala Stasiun Meteorologi Palangkaraya, Hidayat menjelaskan, selain bulan Desember 2005 lalu, bulan April 2006 merupakan puncak musim hujan, terutama daerah Sektor Utara Kalteng yang bertopografi pegunungan. "Tingginya curah air hujan mengakibatkan besarnya debit air sungai di Kalteng yang berhulu di dataran tinggi. Tingginya curah hujan juga mempengaruhi daerah Kalteng bagian hilir," paparnya. ■ **AM, SP**



Evakuasi korban banjir di Trenggalek

# Kontroversi Sebab Lesi

**Ditemukan adanya komponen bahan kimia yang mengendap secara akumulatif dalam rentang waktu lama pada ruang rongga pernapasan para penderita.**

**L**esi atau infeksi menahun pada kulit, gatal-gatal dan pengecilan rongga paru menyerang warga Kec.Porsea, Tobasa. 18 warga dari 13 desa dilaporkan menderita sejak dua bulan belakangan ini. Demikian dilaporkan harian *Waspada* Medan, 2 April 2006.

Masyarakat yang terserang penyakit umumnya bermukim di sekitar PT Toba Pulp Lestari (TPL). Karena tidak ada perhatian pemerintah, mereka menggugat Presiden, melalui kuasa hukumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan.

Selain itu, 18 warga dari Desa Lumban Jingga Manulus, Lumban Rihit Silamosik, Simpang Tiga Sirait dan Desa Petani menggugat Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Perindustrian, Gubernur Sumatera Utara, Bupati Tobasa dan Kepala Dinas Kesehatan Tobasa.

Hasil pemeriksaan di RS Pirngadi, RS Adam Malik dan RS Gleanegles Medan, menunjukkan ke-18 warga menderita penyakit gatal-gatal atau lesi dan pengecilan rongga paru. Ada indikasi penyakit itu timbul akibat masuknya zat kimia ke dalam darah.

Sebelumnya, harian *Kompas*, 28 Maret 2006 juga melaporkan kasus yang sama. Menurut harian ini, kasus Porsea merupakan isu lama yang kembali diangkat.

Adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan yang kembali melakukan advokasi atas kasus ini. Menurut Ketua Pendiiri LBH Kesehatan Iskandar Sitorus yang dikutip *Kompas*, dari hasil pemerik-

saan ditemukan adanya komponen/bahan kimia yang mengendap secara akumulatif dalam rentang waktu lama pada ruang rongga pernapasan penderita.

Dari hasil pemeriksaan itu juga ditemukan perubahan bentuk dan besaran tulang rusuk. Penyakit lainnya adalah ruam kulit dengan rentang waktu menahun yang mengakibatkan penyebaran infeksi di seujur tubuh.

Seorang warga, Efendi Butarbutar, menyatakan, selama dua tahun terakhir mengalami gatal-gatal di lengan dan kaki kiri. Ruam kulit muncul di kedua bagian tubuhnya itu.

Dia juga sering mengalami sesak napas, terutama di malam hari. Pengobatan yang biasa dia lakukan ke bidan atau mantri kesehatan. Biasanya ia disuntik. Tetapi, sesudah pengaruh obatnya hilang, penyakitnya datang lagi.

Warga lainnya, Mery Sihombing, mengaku sering kali menahan rasa sakit saat bernapas, terutama ketika sedang makan. Sesak napas yang dideritanya, menurut Mery, telah berlangsung selama lima tahun terakhir.

## Sampel acak

Saat ini, kasus tersebut tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sitorus mengatakan, LBH Kesehatan melakukan upaya hukum setelah hasil pemeriksaan 18 warga tersebut. LBH Kesehatan menyangkan belum adanya perhatian pemerintah.

Akan tetapi media juga melaporkan

bahwa kasus tersebut kembali menuai kontroversi. Saat ini, situasi di PT TPL terbilang kondusif. Karena itu, *Waspada* menulis, LBH Kesehatan sempat dikritik beberapa pihak karena dikhawatirkan mengganggu situasi kondusif tersebut dengan mengangkat kasus terganggunya kesehatan penduduk itu.

Sementara Direktur Umum PT TPL Juanda Panjaitan menyatakan, terlalu sederhana jika semua keluhan warga di sekitar pabrik dihubungkan dengan beroperasinya PT TPL.

Seperti diketahui, PT TPL yang dulu bernama PT Indorayon Inti Utama (IIU) pernah ditutup pada Juni 1998 karena menyebabkan pencemaran lingkungan hidup dan gangguan kesehatan terhadap penduduk.

Sempat terjadi kerusuhan. Penduduk merusak rumah karyawan pabrik, 125 rumah dirusak, lima mobil pikap, lima sepeda motor, satu mini market, satu stasiun radio, dan satu traktor dibakar massa. Kerusuhan berlanjut dengan blokade jalan konvoi truk IIU. Muspida setempat menutup pabrik untuk sementara.

Berdasarkan keterangan yang diterima *Berita Indonesia* dari LBH Kesehatan, setelah diperiksa RS Pirngadi, RS Adam Malik dan RS Gleanegles Medan, RS Hasan Sadikin Bandung dan Laboratorium Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, diketahui bahwa di tubuh 18 warga yang menjalani pemeriksaan darah lengkap dan urin lengkap, terdapat unsur kimia dan logam berat *plumbum*, *zinkum*, *cuprum*, *kromium*, *kadmium* dan *mercury*, yang mengakibatkan pengecilan organ paru-paru, berubahnya bentuk tulang rusuk, sesak napas dan lesi kulit atas tubuh mereka. ■ RH



**KASUS LAMA:** Toba Pulp Lestari yang dulu bernama Indorayon pernah ditutup karena pencemaran.





## Tambora Mengguncang Jagad

**Dalam bahasa Bima, 'Ta Mbora' artinya; mari menghilang atau ayo lari atau ayo sembunyi. Ditinjau dari sudut terminologi bahasa, boleh jadi nama Doro (Gunung) Tambora muncul setelah terjadinya ledakan dahsyat tanggal 10 April 1815.**

**T**iga bola api raksasa meluncur ke udara dari muntahan ledakan Gunung Tambora, pukul tujuh malam tanggal 10 April tahun 1815. Raja Sanggar yang memerintah sebuah kerajaan kecil tidak seberapa jauh dari Tambora, melihat dengan jelas kejadian dahsyat bersejarah itu. Sesaat setelah itu, seluruh gunung yang menjulang 4.200 meter dari permukaan laut itu, tampak seperti sebuah benda api yang cair yang menyebar ke semua penjuru.

Sang raja, tak lama kemudian, juga melihat hujan debu bercampur batu mulai turun di Sanggar. Lantas disusul angin puting beliung dahsyat yang merobohkan hampir semua rumah. Kerusakan sangat parah terjadi di wilayah Sanggar. Pohon-

pohon besar dan akarnya tercerabut, terlempar ke udara bersama manusia, ternak, rumah, segalanya. Gelombang laut sangat tinggi menyapu bersih semua bangunan yang diterjangnya.

Menurut laporan Raja Sanggar, angin puting beliung berputar-putar lebih dari satu jam sehingga dentuman letusan tak terdengar. Namun setelah badai itu berlalu dentuman sangat dahsyat terjadi silih berganti sampai tanggal 11 April 1815. Fenomena alam yang timbul tidak hanya menciptakan kengerian, tetapi juga keindahan.

Debu dan kerudung sulfur menciptakan efek optikal yang spektakuler. Matahari senja menyinari kerudung sulfur di lapisan stratosfer, sehingga tampak merah sampai matahari terbenam sekalipun. Pada mu-

sim panas dan gugur, tahun 1815, langit senja indah juga muncul di Inggris. Ini memberi inspirasi bagi pelukis romantis Inggris, Joseph William Turner.

Kenangan kepada 191 tahun letusan Tambora, fenomena alam dan musim yang terjadi akibat ledakan dahsyat tersebut, ditulis kembali oleh sejumlah media massa, seperti Harian *Kompas*, *Republika* dan Majalah *Tempo*. Begitu juga media dan penulis asing, mereka menampilkan artikel-artikel dan kisah-kisah yang menarik. Sebut saja, misalnya, Bernice de Jong Boers menulis artikel dalam bahasa Inggris; *Mount Tambora in 1815: A Volcanic Eruption in Indonesia and its Aftermaths*. Menurut Boers, letusan Tambora juga memicu pecahnya epidemik kolera pertama di dunia.

Pernahkah anda membaca artikel tentang tragedi Pompei? Sebuah kota di kaki Gunung Vesuvius yang terkubur bersama warganya, suatu pagi di tahun 79 Masehi. Kebudayaan Pompei terkubur 1.669 tahun sampai diketemukan di dalam penggalian tahun 1748. Semula Vesuvius memberi

hidup dengan kesuburan tanahnya, tetapi juga mengirim malapetaka yang menghancurkan kota itu bersama warga dan budayanya. Warga Pompei sedang menyelenggarakan pesta, tiba-tiba Vesuvius meledak.

Jika Pompei terkubur 1669 tahun, pusat kerajaan di Tambora dan kerajaan lainnya yang berdekatan, hanya butuh waktu seabad lebih untuk menemukannya dari timbunan material letusan. Pemukiman tersebut belum lama ini diketemukan oleh sekelompok arkeolog.

Letusan Tambora menyebarkan gas beracun, memusnahkan semua tanaman dan mahluk hidup di sekitarnya. Kampung-kampung binasa, tak kurang dari 100.000 jiwa melayang. Para pakar gunung berapi memperkirakan letusan tersebut, paling tidak, empat kali lebih hebat dibandingkan dengan bencana Krakatau tahun 1883.

Pakar vulkanologi dari Universitas Rhode Island, AS, yang memimpin penggalian di Tambora, memperkirakan 10.000 orang terkubur hidup-hidup di lokasi penggalian sedalam tiga meter atau lebih. Tim Sigurdsson, termasuk tim arkeologi Indonesia, menemukan aneka gerabah, tulang dan berbagai perhiasan logam dari perunggu. Mereka juga menemukan dua kerangka manusia yang terkubur bersama rumah mereka.

“Bagi saya, ini Pompei dari timur. Semua orang, rumah dan budaya mereka seolah terkubur sebagaimana yang terjadi saat itu,” kata Sigurdsson.

Dia percaya tak seorang pun selamat dari amukan letusan. Bayangkan, menurut catatan para ahli vulkanologi, letusan itu memuntahkan tidak kurang dari 400 juta ton uap belerang beracun ke angkasa. Tidak hanya pembunuh massal, awan belerang itu juga menyebabkan pendinginan global. Dampaknya sungguh luar biasa.

Para ahli sejarah mencatat, di Eropa setahun kemudian (1816) menjadi tahun tanpa musim panas. Ladang-ladang jagung di Maine, AS, musnah akibat cuaca beku. Di Prancis dan Jerman ratusan hektar ladang anggur dan jagung mati. Kalaupun selamat, panen tahun itu terjadi lebih lambat.

Menurut Sigurdsson, budaya yang berkembang di Sumbawa sebetulnya telah mengusik kepenasaran para intelektual Eropa, terutama dari Inggris dan Belanda, sejak awal 1800-an. Saat itu ilmuwan kedua negara datang ke Sumbawa seiring penjajahan yang dilakukan pemerintahnya. Mereka kaget mendengar bahasa yang digunakan jauh berbeda dengan yang berkembang di Indonesia umumnya.

Beberapa kalangan ilmuwan yakin bunyi bahasa Sumbawa lebih dekat dengan bunyi bahasa yang berkembang di Indochina, terutama dengan bahasa Mon-Khmer. Belum lagi para ilmuwan kedua negara melakukan penelitian, masyarakat di sekitarnya musnah tersapu amarah Tambora. Letusan itu juga ikut memusnahkan bahasa yang berkembang di sana, kata Sigurdsson yang 20 tahun mencermati lokasi yang ditelitinya.

Beberapa penemuan awal menunjukkan bahwa masyarakat yang terkubur memang punya hubungan erat dengan Indochina, mungkin hanya hubungan dagang. Contohnya, berbagai gerabah dan keramik yang diketemukan di sana memiliki kedekatan dengan barang sejenis di Vietnam.

Arkeolog dari Universitas Nasional Singapura, John Miksic,

percaya lokasi yang diketemukan Sigurdsson memang situs kota yang terkubur letusan Tambora. Namun dia tidak percaya, baik orang-orang maupun bahasanya berasal dari Indochina. Miksic menyimpulkan jika ada keramik dari Vietnam, itu bisa saja diperoleh dari pedagang perantara.

Sejarah Kerajaan Bima mencatat bahwa tiga kerajaan kecil di kawasan itu; Tambora, Sanggar dan Pekat, tunduk di bawah Kerajaan Bima yang melebarkan wilayah taklukannya sampai Dompu dan Flores. Karena itu masyarakatnya menggunakan

bahasa Bima. Dan sampai sekarang ketiga daerah itu menggunakan bahasa Bima untuk pergaulan sehari-hari. Demikian pula kebudayaan mereka. Sekarang, kawasan Tambora, Pekat dan Sanggar, bisa dijangkau lewat darat, melalui jalan dari kota Bima-Kore-Kilo-Sanggar-Tambora.

### Kekalahan Napoleon

Satu hal yang mencengangkan, dikaitkannya peristiwa itu dengan kekalahan Napoleon Bonaparte di Waterloo, 18 Juni 1815. Jika begitu adanya, maka dampak ikutan letusan Tambora sangat luar biasa, mengubah peta politik dunia saat itu. Peta kekuasaan dunia

berubah akibat kekalahan Napoleon. Bukan saja di daratan Eropa, tetapi juga perubahan kondisi politik di Nusantara di abad ke 19.

Kenneth Spink, pakar geologi, tampil dengan teori tersebut, tetapi masih perlu diuji kebenarannya. Dalam satu pertemuan ilmiah tentang *Applied Geosciences* di Warwick, Inggris (*The Geographical Magazine*, Juni 1996), Spink mencoba menggambarkan betapa besar dampak letusan Tambora terhadap tatanan iklim dunia saat itu. Materi vulkanik yang terlontar ke udara dari letusan Tambora diyakini mempengaruhi cuaca di seluruh dunia.

Fenomena alam yang abnormal itu, paling dirasakan di Amerika Utara dan Eropa Barat. Awal Juni 1815, hanya berselang 1,5 bulan setelah letusan Tambora, di Eropa Barat terjadi hujan salah musim. Jalan-jalan berlumpur, sulit dilalui oleh mesin-perang, seperti tank dan kendaraan lapis baja lainnya. Kondisi ini tentu menghadang ambisi Napoleon untuk menginvasi sejumlah negara tetangga di Eropa.

Gerakan bala bantuan militer dengan senjata berat terhambat. Ruang gerak tokoh militer Prancis yang baru saja lolos dari pengasingan di P. Elba, Maret 1815, menjadi terbatas. Sementara itu pasukannya dihantam tentara Sekutu di Waterloo, 18 Juni 1815. Napoleon tertangkap dan menghabiskan sisa hidupnya sampai 1821 di pembuangannya, Saint Helena.

Kemenangan Sekutu di Waterloo, berdampak pada peta penjajahan di Indonesia. Wilayah-wilayah jajahan Belanda, seperti Riau, yang diduduki Inggris dikembalikan ke Belanda. Penguasa Inggris di Indonesia, Thomas Stamford Raffles segera mengumpulkan laporan tentang letusan Tambora.

Deru letusan sejak tanggal 5 April 1815, di Yogyakarta semula disangka tembakan meriam. Keesokan harinya, langit gelap, matahari tertutup awan tebal. Hari-hari berikutnya jatuh hujan debu. Tanggal 10 April 1815, ledakan-ledakan terdengar semakin keras, sampai di Cirebon. Letusan memuncak tanggal 11 April 1815. Siang itu gelap gulita. Bumi bergetar seperti mau oleng. Debu memenuhi angkasa, angin bertiup. (*Raffles Report of the Eastern Isles, Oxford University Press-1984*). ■ **SH - dari berbagai sumber**



# Gajah Mati Tinggalkan Cemas

**Gajah jantan itu mati karena mengalami infeksi parah. Jeratan rantai dan tembakan panah tumpul yang tidak steril saat penangkapan.**

**M**edia tengah menyoroti nasib gajah-gajah liar Sumatera yang diperlakukan semena-mena. Setelah kasus tewasnya lima ekor gajah karena diduga diracun beberapa waktu lalu, kini protes dari aktivis lingkungan semakin santer setelah kasus matinya seekor gajah jantan yang ditangkap BKSDA Riau.

Dari analisis WWF, gajah jantan yang berusia 9 tahun itu mati karena mengalami infeksi parah disebabkan jeratan rantai dan tembakan panah tumpul yang tidak steril saat penangkapan.

*Sinar Harapan*, 17 April 2006, dalam laporannya menulis, 70 botol infus, suntikan vitamin, antibiotik, serum anti tetanus, tak mampu juga menyelamatkan nyawa gajah itu. Jumat, (14/4), satu dari sepuluh gajah tangkapan tersebut akhirnya menemui ajalnya setelah sebelumnya harus menderita lantaran tetanus yang mendera.

Bahkan kini solusi penangkapan tersebut makin satir ceritanya. Sepuluh gajah yang tertangkap, hanya didekati tanpa diberi makan dan minum. Satwa-satwa itu juga terikat rantai kuat.

Kalau mau ditelusuri jumlah gajah yang tertangkap dan tak jelas juntrungannya, ternyata banyak juga. World Wildlife Fund (WWF), baru-baru ini mencatat sedikitnya ada 201 gajah liar ditangkap sejak tahun 2000, 46 ekor diantaranya tewas. Disinyalir kematian disebabkan proses penembakan tak profesional. Sebanyak 41 dilepaskan tanpa dicek kembali keadaannya. Sementara itu, 103 gajah tangkapan dan peliharaan tidak pernah diketahui nasibnya antara tahun 2000-2006.

*Media Indonesia*, 17 April 2006, memberi judul laporannya "Populasi Gajah Sumatera Berkurang." Populasi gajah di Riau berkurang sekitar 75%. Pada tahun 1983 diperkirakan terdapat 1.067-1.617 ekor gajah menjadi hanya tinggal 353-431 ekor gajah pada tahun 2003.

Tuntutan dari lembaga swadaya masyarakat lingkungan hidup, World Wild-

life Fund (WWF) Indonesia mencuat. Penangkapan seharusnya menjadi alternatif terakhir dalam penanganan konflik gajah liar, dan hanya dilakukan oleh tim penangkap profesional yang didampingi ahli medis dan tim pemantau terkait lainnya.

Populasi gajah tersebar di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Lampung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara dan Aceh. ■ RH

**TEWAS KARENA SEMBRONO:**  
Penangkapan seharusnya menjadi alternatif terakhir dalam penanganan konflik gajah liar.



## Bencana Ketika Badai

**P**epohonan di Jakarta sudah terlalu tua sehingga rawan ditumbang angin. Sedikitnya 42 pohon tumbang di Jakarta akibat hujan deras disertai angin kencang pada Selasa (11/4) sore. Sejumlah pohon tumbang itu menimpa beberapa mobil yang tengah melintas di jalanan.

Insiden seperti terjadi di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, misalnya, mengakibatkan tiga orang tewas dan empat lainnya luka-luka. Pohon-pohon tumbang tersebar di tiga kecamatan di Jakarta Pusat yakni di Gambir (3 pohon), Menteng (19 pohon), dan Senen (20 pohon). Pohon tumbang yang menimpa mobil, selain di Jalan Abdul Muis, juga terdapat di Menteng Raya. Di lokasi itu, tiga mobil tertimpa pohon dengan kondisi satu rusak berat dan dua rusak ringan. Sementara, di Jalan Probolinggo, sebuah pohon tumbang menimpa satu mobil.

Peristiwa itu menimbulkan kritikan tajam kepada Pemda DKI yang dianggap lalai. Harian *Sinar Harapan*, 13 April 2006, melaporkan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta polisi untuk mengusut aspek pidana atas timbulnya sejumlah korban jiwa akibat rubuhnya pohon-pohon di sekitar Jabotabek tersebut. Menurut mereka, peristiwa itu merupakan kegagalan Pemda DKI melindungi keselamatan warga kotanya.

Namun, seperti yang dilaporkan *Rakyat Merdeka*, 13 April 2006, Pemda DKI akan bertanggung jawab terhadap para korban, baik yang luka maupun meninggal. Keluarga korban yang tewas akan diberi santunan, besarnya maksimal Rp 10 juta. Selain itu, Pemerintah DKI Jakarta akan menggusur pohon-pohon perindang yang akarnya sudah lemah. Langkah itu untuk mencegah pepohonan tumbang pada saat hujan deras disertai angin kencang, seperti yang terjadi sebelumnya.

Rekomendasi datang dari Pusat Studi Kebijakan Strategis, yang mengusulkan kepada Pemerintah DKI Jakarta agar meningkatkan keragaman pohon perindang. Direktur Eksekutif Pusat Studi, Husin Yazid, seperti dikutip *Tempo Interaktif*, menjelaskan bahwa keragaman itu berlandaskan pada teori ekologi. Semakin beragam, ketahanan ekologi semakin kuat. Apabila jenis pohon perindang beragam, pohon-pohon itu akan saling memperkuat.

Hasil kajian Pusat Studi menunjukkan bahwa teknis penanaman pohon perindang di Jakarta kurang memperhatikan keragaman. Selain itu, pemilihan jenis pohon juga kurang lengkap. ■ RH

# Kaum yang Selalu Ceria

**Kesukaan orang Madura atas warna-warna cerah sebenarnya merupakan ekspresi kegembiraan mereka.**

**S**iapa pun yang butuh terapi warna, datanglah ke Madura. Menginjak pesisirnya, pemandangan yang semarak didominasi perahu-perahu penangkap ikan yang dicat beraneka warna. Hati yang mendung pasti akan menjadi ceria seketika itu juga.

Perahu-perahu itu yang tidak sekedar dicat agar tahan dari bahaya lapuk karena air laut. Tiang-tiang anjungan kecilnya diukir dengan gambar burung merak. Warna-warna menyala seperti merah, hijau dan kuning menjadi pilihan kebanyakan pemilik perahu.

Orang Madura memang terkenal sebagai penyuka warna-warna cerah. Tidak cuma perahu, pakaian dan semua benda yang mereka miliki berwarna menyolok. Harian *Kompas*, November 2005, pernah membahas fenomena budaya ini.

Seperti ditulis harian itu, Masjid Jami Sumenep juga mencerminkan kebudayaan Madura yang penuh warna-warni. Gerbangnya yang dibangun saat Panembahan Sumala bertakhta pada abad ke-17 sebagai Adipati Sumenep itu, dihiasi warna kuning emas dan putih. Tampak megah dan *glamour* seperti gerbang keraton.

Lalu tengoklah ke Kecamatan Karduluk. Di salah satu sentra ukir Pulau Madura itu sulit menemukan perabot yang hanya dipernis agar warna asli kayu menonjol. Produk Karduluk identik dengan warna dasar hijau tua dan sisipan warna merah, putih, serta kuning.

Dandanan warna-warni juga menjadi

ciri khas orang-orang Madura. Di Surabaya, ada seloroh jika seseorang memakai pakaian berwarna cerah, maka ia akan disebut seperti orang Madura. Kenyataannya, orang Madura, terutama generasi mudanya memang gemar berpakaian warna cerah. Para gadisnya suka sekali berdandan tebal dengan perhiasan emas yang bergemerincing di leher dan tangannya.

Budaya warna cerah juga tidak luput dari kompleks pemakaman mereka. Jika daerah-daerah lain lazim menacat nisan dengan warna putih, maka nisan-nisan di pemakaman Madura didominasi warna hijau atau merah.

Budayawan Madura D. Zawawi Imron, seperti dikutip *Kompas*, menuturkan budaya warna orang Madura yang serba cerah dan menyolok itu merupakan ekspresi karakter mereka yang selalu gembira dalam menjalani hidup.

Di Madura, merah berarti gembira, bukan berani atau marah. Sedangkan hijau diartikan sebagai kedamaian.

Karakter orang Madura juga selalu ingin menonjolkan diri. Pengamat sosial Madura Edhi Setiawan menuturkan, kesukaan orang Madura atas warna-warna cerah dan bersolek tidak lepas dari keinginan menonjolkan diri.

Kehidupan keras dan persaingan yang amat ketat di kalangan masyarakat Madura membuat orang yang sukses ingin memperlihatkan keberhasilannya. Bukan berarti orang Madura itu sombong, melainkan lebih kepada eksistensi dalam lingkungannya.

## Berlandaskan Tradisi

Meski demikian terlihat suka menonjolkan diri, orang Madura punya ungkapan *kar-kar-kar colpek* (mengais lalu dipatuk) seperti ayam. Artinya, betapa pun kecilnya pendapatan asal didapat dengan cara halal, itu sah. Dengan demikian, jangan harap mereka menghambur-hamburkan uang hanya untuk sesuatu yang tak begitu perlu.

Sikap sederhana di satu sisi dan kesukaan bersolek



Perahu warna-warni

di sisi lain, juga punya landasan tradisi yang cukup kuat. Ada ungkapan yang membuat orang Madura harus memisahkan kehidupan privat dan pergaulannya. Ungkapan *ngakan tompe sakale tak kera bada reng tao, mon tengka tak teppak daddi sa disa* (Kalau makan, dengan dedak pun tak ada yang tahu. Tetapi, tingkah laku dan pergaulan, salah sedikit saja, jadi pembicaraan orang). Jadi, kalau mereka suka bersolek atau berdandan, itu tak lain sekedar ingin menunjukkan ketegaran dalam hidup.

Inilah keunikan masyarakat Madura dibandingkan masyarakat tradisional lainnya. Mereka memilih cara penonjolan diri yang unik untuk diakui sebagai bagian dari masyarakat Madura. Meski bagi sebagian orang, busana berwarna cerah yang dipakai orang Madura yang kebanyakan berkulit gelap amat tidak cocok.

Selain karena karakternya, warna-warna tradisional Madura juga dipengaruhi budaya China. Seperti lazimnya daerah pesisir, leluhur mereka berkontak langsung dengan para saudagar China. Karena itu, budaya Madura menyerap banyak unsur budaya China. Hal itu bisa dilihat dari pemilihan warna tradisional dan ornamen ukir mereka. Seperti halnya budaya China, orang Madura menyukai warna hijau, merah, kuning emas dan putih. ■ RH



Mewarnai perahu

**Datang dan Pastikan Kunjungan Anda di :**

# EDUCATION & TRAINING EXPO 2006

PAMERAN INTERNASIONAL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KE-15

**25 - 28 Mei 2006**

Gedung Semanggi Expo, Kawasan Bisnis Terpadu Sudirman (SCBD), Jl. Jend. Sudirman, Jakarta (Belakang Polda Metro Jaya)

**DAPATKAN INFORMASI LENGKAP TENTANG PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM DIPLOMA, S1, S2 DAN S3**

**PRESENTASI GRATIS PROGRAM PENDIDIKAN SELAMA 4 HARI**

**PESERTA :**

Perguruan tinggi negeri, swasta, kedinasan, agama, kursus, pusdiklat dan berbagai institusi terkemuka dari dalam dan luar negeri.

Penyelenggara :

PT Wahyu Promocitra

**HANYA 1X  
SETAHUN**

INFORMASI : 021-7892938 (HUNTING)

## Apakah Anda ingin :

Berusaha atau berinvestasi di bidang agribisnis?

Mengembangkan usaha agribisnis?

Mencari produk-produk agribisnis?

Mencari produk-produk makanan dan minuman?

**DATANG KE :**

## Agro & Food Expo 2006

Menampilkan :

- Informasi Potensi Investasi Sektor Agribisnis
- Komoditi Tanaman Hortikultura
- Komoditi dan Hasil Olahan Tanaman Pangan
- Komoditi dan Hasil Olahan Perkebunan
- Komoditi dan Hasil Olahan Kehutanan
- Komoditi dan Hasil Olahan Peternakan
- Komoditi dan Hasil Olahan Perikanan
- Agrowisata
- Produk Makanan dan Minuman
- Jasa Keuangan, Perbankan & Konsultan

Pameran dagang internasional ke-6 tentang produk pertanian, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, makanan dan minuman

**18 - 21 Mei 2006**

Gedung Semanggi Expo, Kawasan Bisnis Terpadu Sudirman (SCBD), Jl. Jend. Sudirman, Jakarta

**Ikuti juga** 

INFORMASI : TELP : 021-7892938 FAX : 021-7890647

### FORUM TEMU BISNIS BUYERS MEET SELLERS

Jumat 19 Mei 2006, Semanggi Expo, Jakarta

- Menampilkan :
- Perusahaan Retail-Supermarket
  - Perusahaan Makanan Olahan
  - Ekspor Agribisnis
  - Pengusaha makanan cepat saji

**COCOK UNTUK UKAM DAN KOPERASI, TEPAT BAGI ANDA YANG BERJAWA BISNIS**

HUB : 0815.880.5935

Ditanggungjawabkan oleh kerjasama:

Ditukung oleh :

**BERITA INDONESIA**  
Majalah Berita Dwi Mingguan

